

# **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2009**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2008**

## DAFTAR ISI

### **PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009**

#### **LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>  |
| 1. 1 Latar Belakang  | 1         |
| 1. 2 Landasan Hukum  | 2         |
| 1. 3 Maksud dan Tujuan   | 3         |
| 1. 4 Sistematika Dokumen RKPD  | 4         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007</b>                    | <b>6</b>  |
| 2. 1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah                           | 6         |
| 2. 2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah | 6         |
| 2. 2. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 | 7         |
| 2. 2. 2 Titik Kemacetan  | 8         |
| 2. 2. 3 Titik Banjir   | 9         |
| 2. 2. 4 Cakupan Layanan Air Bersih                                       | 9         |
| 2. 2. 5 Unit Pengelolaan Sampah  | 9         |
| 2. 2. 6 Kawasan Kumuh  | 10        |
| 2. 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi   | 10        |
| 2. 2. 8 Pendapatan Asli Daerah   | 11        |
| 2. 2. 9 Indeks Pembangunan Masyarakat                                    | 11        |
| 2. 3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007           | 15        |
| 2. 4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak                                  | 17        |
| 2. 4. 1 Pelayanan Publik   | 18        |
| 2. 4. 2 Kemiskinan   | 21        |
| 2. 4. 3 Transportasi   | 23        |
| 2. 4. 4 Pelayanan Persampahan  | 23        |
| 2. 4. 5 Pemberdayaan Masyarakat  | 25        |
| 2. 4. 6 Tata Ruang   | 25        |
| 2. 4. 7 Air Bersih   | 26        |
| 2. 4. 8 Banjir   | 26        |
| 2. 4. 9 Investasi  | 27        |
| 2. 4. 10 Pemilu  | 27        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH</b>                         | <b>29</b> |
| 3. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008          | 29        |
| 3. 2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009                | 31        |
| 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah                                       | 31        |
| 3. 4 Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah                      | 32        |
| 3. 4. 1 Pendapatan Asli Daerah   | 32        |
| 3. 4. 2 Dana Perimbangan   | 33        |
| 3. 4. 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah                                    | 34        |
| 3. 4. 4 Belanja Daerah   | 35        |
| 3. 4. 5 Pembiayaan Daerah  | 36        |
| 3. 5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah                                      | 37        |
| 3. 5. 1 Pendapatan Daerah  | 37        |
| 3. 5. 2 Belanja Daerah   | 38        |
| 3. 5. 3 Pembiayaan Daerah  | 40        |

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| <b>BAB IV</b>     | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009</b>                                    | <b>41</b> |
| <b>BAB V</b>      | <b>RENCANA KERJA</b>  | <b>47</b> |
| <b>BAB VI</b>     | <b>KAJIAN PELAKSANAAN</b>   | <b>48</b> |
| <b>LAMPIRAN 2</b> | <b>: PRIORITAS PROGRAM DAN SKPD PELAKSANA</b>                                     |           |
| <b>LAMPIRAN 3</b> | <b>: RENCANA KERJA MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>TAHUN ANGGARAN 2009</b> |           |



## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 2. 1 | Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007  | 9  |
| Tabel 2. 2 | Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2007                   | 16 |
| Tabel 2. 3 | Realisasi Langsung Tiap-tiap Urusan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007           | 20 |
| Tabel 2. 4 | Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006                                   | 30 |
| Tabel 2. 5 | Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)                                | 33 |
| Tabel 3. 1 | Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Berlaku | 41 |
| Tabel 3. 2 | Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008            | 45 |
| Tabel 3. 3 | Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008                  | 45 |
| Tabel 3. 4 | Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008     | 47 |
| Tabel 3. 5 | Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008                        | 47 |
| Tabel 3. 6 | Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008                           | 48 |
| Tabel 3. 7 | Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008                   | 49 |
| Tabel 3. 8 | Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008                        | 49 |





**WALIKOTA DEPOK**

---

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok untuk Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf b, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan.....

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
27. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Depok Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

35. Peraturan .....

35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009.**

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006.
- (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pembangunan tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi, isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2...

## Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009
- BAB V : RENCANA KERJA
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

## Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd**

**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 12**

**BERITA DAERAH  
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2008 NOMOR 12**

---

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

---

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok untuk Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf b, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR : 12 TAHUN 2008  
TANGGAL : 29 Oktober 2008  
TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah upaya berkesinambungan yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP Nasional. Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD berkedudukan strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Secara garis besar dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2009 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011. RKPD Kota Depok disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari SKPD, oleh karena itu proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.

Terdapat delapan tahapan proses penyusunan RKPD, yaitu 1) Persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, 2) Penyusunan rancangan awal RKPD, 3) Penyusunan rancangan Renja SKPD, 4) Penyusunan Rancangan RKPD, 5) Musrenbang, 6) Penyusunan rancangan akhir RKPD, 7) Penyiapan dan penetapan Peraturan RKPD, dan 8) Pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok disusun berdasarkan:

- 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota.
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- 25 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;
- 26 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;
- 27 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025;
- 28 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan rencana strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD ke dalam rencana operasional tahun 2009.
- b. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD tahun 2009.
- c. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2009.
- d. Menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.
- e. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
- f. Menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan SKPD.
- g. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- h. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.
- i. Mewujudkan sinergitas antara program dan anggaran, antara pelaksanaan dan pengawasan, serta efisiensi alokasi sumberdaya

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar urusan pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.

#### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2009, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang pengertian, proses penyusunan dan kedudukan RKPD, keterkaitannya dengan RPJMD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Menjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Depok tahun 2009.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

###### **1.4. Sistematika**

Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

##### **BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007**

Menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kedudukan RKPD tahun 2009 dalam kerangka pembangunan jangka menengah, capaian kinerja makro dan indikator kesejahteraan rakyat tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, serta isu strategis/aktual yang berkembang dan masalah yang mendesak ditangani.

##### **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan sumber ekonomi daerah, sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah.

#### BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan masalah yang mendesak, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

#### BAB V. RENCANA KERJA

Menjelaskan program dan kegiatan pokok RKPD, instansi pelaksana, indikator capaian tiap-tiap program dan kegiatannya yang disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam rumpun Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah.

#### BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

## BAB II

### EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007

---

#### 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011, Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok adalah

***“Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan”***

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

***Pertama***, Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.

***Kedua***, Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.

***Ketiga***, Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.

***Keempat***, Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

RKPD tahun 2009 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2006-2011 dengan program dan kegiatan pokok sesuai yang tercantum dalam arahan RPJMD dengan prioritas sesuai dengan dinamika yang berkembang. Selain itu program dan kegiatan juga diselaraskan dengan arahan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2009.

#### 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sebagai landasan dan sekaligus untuk menjamin kesinambungan program tahun 2009 dengan tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sampai saat ini. Status dan kedudukan pencapaian kinerja ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMD. Berdasarkan indikator makro Kota Depok Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam RPJMD, pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007**

| No | Misi   | Indikator                        | Tahun 2007 | Keterangan   |
|----|--|----------------------------------|------------|--|
| 1  | Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan,   | Indeks Kepuasan Masyarakat       | 71,17 %    | Sebagai data awal, dan termasuk kategori Baik menurut Menpan |
| 2  | Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang cukup, baik dan merata.                      | Titik macet                      | 2 titik    | Sesuai target  |
|    |  | Titik banjir                     | 1 lokasi   | Sesuai target  |
|    |  | Layanan air baku                 | 637 SR     | Tidak tercapai target  |
|    |  | Unit Pengolahan Sampah           | 0          | Tidak tercapai target  |
|    |  | Kawasan kumuh                    | 3 lokasi   | Sesuai target  |
| 3  | Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah   | Laju Pertumbuhan Ekonomi         | 6,65       | Melampaui target   |
|    |  | Pendapatan Asli Daerah           | 14,43 %    | Melampaui target   |
| 4  | Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 78,1       | Melampaui target   |

### 2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (SK Menpan No.

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah).

Melalui kegiatan Kajian IKM Kota Depok terhadap 21 jenis pelayanan Pemerintah Kota Depok oleh SKPD, diperoleh preferensi positif dari masyarakat Kota Depok, yaitu dengan didapatkannya nilai IKM sebesar 71,17 %. Menurut Kep-Menpan angka ini masuk dalam kategori BAIK. Ada empat kategori tingkatan pelayanan menurut SK Men-PAN tersebut, yaitu: *tidak baik* (nilai 25-43,75), *kurang baik* (nilai 43,76-62,5), *baik* (62,51-81,25), dan *sangat baik* (81,26-100,00). Terdapat 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dinilai, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Nilai IKM yang diperoleh di atas merupakan *base line* data (data awal) karena belum tersedia sebelumnya, oleh karena itu belum bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di bidang pelayanan Tahun 2007. Penilaian baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya dengan target kinerja harus naik sebesar 2,5 % dari nilai saat ini. Namun demikian, angka itu penting untuk mengetahui posisi pelayanan Pemerintah Kota Depok saat ini di tengah tuntutan besar dari masyarakat yang menghendaki pelayanan prima. Meskipun masuk dalam kategori Baik, tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada jenis pelayanan yang relatif rendah nilai capaiannya, seperti pelayanan pasar, infrastruktur jalan, serta beberapa pelayanan perijinan.

## **2.2.2 Titik Kemacetan**

Penanganan permasalahan transportasi kota Depok meliputi berbagai hal seperti peningkatan kinerja penataan ruang, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur transportasi serta pengembangan manajemen transportasi termasuk pengembangan transportasi publik /moda transportasi massal. Penanganan permasalahan kemacetan lalu-lintas di suatu titik tertentu, tidak dapat hanya ditangani di lokasi tersebut saja, namun juga meliputi penanganan infrastruktur dan manajemen lalu-lintas pada lokasi-lokasi lain yang mempengaruhinya, termasuk didalamnya peningkatan disiplin pengguna jalan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengatasi problema kemacetan yang menjadi sasaran.

Fokus penanganan kemacetan pada Tahun 2007 adalah dua titik di pusat kota yaitu: 1) Simpang Jalan Kartini – Dewi Sartika; dan 2) Ruas Margonda segmen I – AR. Hakim, dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan pada beberapa ruas terkait, yang dipadukan dengan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pembangunan Fly-over AR Hakim oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2007 telah melaksanakan pelebaran ruas Jalan Margonda Segmen-1 yang dimulai dari simpang Kartini hingga simpang Ramanda. Dengan dioperasionalkannya fly-over pada bulan Maret 2008, masyarakat dapat merasakan berkurangnya permasalahan kemacetan pada ruas-ruas Jl. Dewi Sartika; Simpang Kartini; Jl. Raya Margonda Segmen-1 hingga Jl. AR. Hakim.

Meskipun berhasil memenuhi target, kompleksitas permasalahan kemacetan kota masih membutuhkan solusi yang lebih komprehensif dan sungguh-sungguh seiring dengan tekanan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.

### **2.2.3 Titik banjir**

Target penanggulangan masalah banjir yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 adalah tertanggulangnya 1 titik lokasi banjir. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan perbaikan tebing dan tanggul kali Sugutamu sepanjang 316,6 m yang memberikan manfaat berkurangnya resiko banjir di perumahan Taman Cipayung, Kec. Sukmajaya. Meskipun berhasil memenuhi target RPJMD, tetapi masih terdapat lokasi yang berpotensi banjir yang harus ditangani secara bertahap oleh pemerintah daerah. Selain itu peran serta masyarakat merupakan faktor pendukung guna mempercepat penanganan banjir di Kota Depok, seperti memelihara kebersihan lingkungan dan selokan.

### **2.2.4 Cakupan layanan air bersih**

Pelayanan Air bersih Kota Depok melalui layanan perpipaan masih cukup rendah jika dibandingkan dengan standar cakupan pelayanan kota metropolitan. Pada Tahun 2006 pelayanan baru mencakup 18,27 % penduduk kota. Penyebabnya antara lain adalah tingginya penggunaan air tanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat dengan kualitas air yang masih dapat diterima.

Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan Kota Depok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta yang telah berjalan 3 (tiga) tahun, sampai pada Tahun 2007 telah dibangun 160.325 m jaringan distribusi primer dan sekunder serta 2.396 Sambungan Rumah (SR). Pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapat menambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR (63,7%). Tidak tercapainya target sambungan rumah tersebut disebabkan masih rendahnya minat penyambungan pelayanan air bersih perpipaan, mengingat masyarakat calon pelanggan masih memilih menggunakan air tanah meskipun jaringan distribusi telah tersedia.

### **2.2.5 Unit Pengelolaan Sampah**

Konsep penanganan sampah Kota Depok telah bergeser dari sistem konvensional kepada konsep pengelolaan sampah terpadu yaitu menggabungkan konsep ramah lingkungan dan penanganan skala kawasan. Penanggulangan sampah dikelola sejak di TPS melalui Unit-unit Pengelolaan Sampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan serta perlakuan terhadap jenis sampah yang ada. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yang diterima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas kapasitasnya. Selain itu, konsep ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dapat ditarik keuntungan nilai ekonomis pengelolaan sampah dari proses daur ulang (3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycling*) dan komposting.

Dalam Tahun 2007 telah dianggarkan pembangunan 10 (sepuluh) UPS yang tersebar di beberapa lokasi. Namun dalam perjalanannya, Pemerintah bersama DPRD telah menyepakati untuk melakukan kajian kelayakannya terlebih dahulu untuk mengetahui pola pembiayaan dan persebaran yang lebih efisien dan efektif, sehingga rencana pembangunan 10 unit UPS tersebut ditangguhkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2008 sesuai rekomendasi hasil kajian.

Hasil kajian yang telah diselesaikan pada akhir Tahun 2007, menyimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah terpadu melalui pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) layak diterapkan di Kota Depok, dan telah menghasilkan usulan lokasi pembangunan UPS.

### **2.2.6 Kawasan Kumuh**

Cukup banyak kawasan di Kota Depok termasuk kawasan kumuh yang timbul pada lahan-lahan Negara yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal secara ilegal (*squatters*). Kondisi rumah maupun kualitas lingkungan pada lokasi-lokasi-lokasi kumuh tersebut sangat buruk, mengingat akses terhadap sarana dan prasarana dasar perkotaan terbatas. Pada Tahun 2007

telah dilaksanakan kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana di lokasi 3 kawasan kumuh sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Kp. Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, meliputi komponen pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 13, 14, 19 dan 20.
- 2) Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, meliputi komponen pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 02, 03, 04, 10, dan 14.
- 3) Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis, meliputi pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 03, 05, 07.

Kegiatan di tiga kawasan tersebut mencakup penataan sarana dan prasarana yang komponen pekerjaannya dikembangkan dari hasil perencanaan bersama masyarakat melalui *Community Action Plan (CAP)*. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kontinuitas program.

### **2.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. LPE dihitung berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok (2007), LPE Kota Depok Tahun 2006 (terakhir) adalah 6,65 %, yang berarti melampaui target RPJMD Kota Depok yang telah ditetapkan, yaitu 6,46 %. Laju pertumbuhan sektor yang paling tinggi terjadi pada kelompok tersier (perdagangan dan jasa) yaitu sebesar 7,73 %. Fakta ini mengindikasikan adanya kecenderungan Depok sebagai kota niaga dan jasa yang potensial.

### **2.2.8 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi terutama sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Berbagai kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada tahun 2007 menghasilkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 14,43 % (target 5 %). Meskipun berhasil melebihi target, upaya peningkatan pencapaian PAD perlu terus dilakukan guna menjawab tuntutan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang makin besar.

### **2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang disebut sebagai Human Development Index (HDI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat menurut UNDP. Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh UNDP, daerah akan dikategorikan makmur/sejahtera jika nilai IPM (HDI) diatas 80, sementara untuk nilai berkisar antara 75-80 dikategorikan setengah sejahtera (*middle up*), dan jika nilai IPM (HDI) kurang dari 75 maka masyarakatnya termasuk kategori kurang tingkat kesejahteraannya.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), dan Indeks Standar Layak Hidup (Daya Beli). Dari hasil survei IPM Tahun 2007, didapatkan angka IPM sebesar 78,10 (melebihi target : 77,6). Dengan menggunakan indikator yang diberikan oleh UNDP, maka kondisi masyarakat kota Depok telah masuk pada kategori setengah sejahtera (*middle up*). Namun demikian, pada indeks daya beli memerlukan perhatian yang lebih baik di masa mendatang karena sedikit kenaikannya seiring dengan kondisi perekonomian yang relatif sulit, khususnya pada sektor riil.

Selain Indikator Makro Kota, tersedia indikator lain yang bisa digunakan sebagai petunjuk bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel 2.2. menunjukkan perkembangan Inkesra dari tahun 2005.

Table 2.2 Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok tahun 2007.

| NO | INDIKATOR   | 2005                                      | 2006                                     | KETERANGAN  |
|----|---|---|--|---|
| 1  | Jumlah penduduk (jiwa)  | 1.374.522                                 | 1.420.478                                | Prediksi 2007 = 1.470.002   |
| 2  | Laju pertumbuhan penduduk (%)   | 3,44                                      | 3,42                                     | -Prediksi 2007 =3,49<br>-Kategori tinggi                              |
| 3  | Komposisi penduduk (%)  | 50,66 % laki ;<br>49,34% wanita           | 50,68% laki2;<br>49,32% wanita           |   |
| 4  | Tingkat kelahiran (Angka Kelahiran Total)(%)  | 1,88                                      | 2,12                                     | Selama 5 tahun terakhir relatif stabil                                |
| 5  | Tingkat pendidikan (%) :<br>- SMA/ sederajat/SMK<br>- SLTP/ sederajat<br>- SD/ sederajat<br>- Akademi-S3<br>- Tidak berijazah | 34,28<br>17,56<br>22,41<br>15,61<br>10,14 | 37,27<br>17,8<br>20<br>11,73<br>11,7     | Proporsi yang berpendidikan SMA meningkat                             |
| 6  | Angka partisipasi murni (%):<br>- SD<br>- SLTP<br>- SLTA  | 90,85<br>86,14<br>67,39                   | 93,08<br>72,70<br>58,07                  | Angka partisipasi murni SD meningkat, sedangkan utk SMP dan SMA turun |
| 7  | Angka kematian bayi (AKB)/ Jiwa/ 1000 kelahiran hidup   | 28,07                                     | 27,99                                    |   |
| 8  | Lamanya menyusui (%):<br>a. 1-5 bulan<br>b. 6-11 bulan<br>c. 12-17 bulan<br>d. 18-23 bulan<br>e. 24 lebih                     | 11<br>7,73<br>24,6<br>9,1<br>46,98        | 4,36<br>13,09<br>16,83<br>20,58<br>45,13 | Makin banyak yang menyusui lebih lama                                 |
| 9  | Imunisasi (%):<br>a. Ya<br>b. Tidak   | Belum tersedia data                       | 97,63<br>2,37                            |   |



(Tabel 2.2. lanjutan)

| NO | INDIKATOR  | 2005                                       | 2006   | KETERANGAN  |
|----|--|--|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status penguasaan rumah :               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Milik sendiri</li> <li>❖ Kontrak</li> <li>❖ Milik orangtua/saudara/sanak famili</li> <li>❖ Dinas</li> <li>❖ sewa</li> <li>Lainnya</li> </ul> </li> </ul> | Belum tersedia datanya                     | 67,69<br>20,37<br>7,67<br><br>2,28<br>1,72<br>0,27 | .   |
| 13 | Pengeluaran Rata2 perkapita/bulan (Rp) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan</li> <li>• Non Makanan</li> </ul>  | 516.755<br>197.905<br>318.850              | 528.629<br>212.169<br>316.460                      | 1. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran non makanan sudah lebih dari 60 %.<br>2. Terdapat penurunan konsumsi non makanan  |
| 14 | Penduduk menurut pengeluaran/kapita/bulan(%): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang dari 150.000</li> <li>• 150.000-199.999</li> <li>• 200.000-299.999</li> <li>• 300.000-499.999</li> <li>• 500.000 lebih</li> </ul>  | 1,08<br>5,65<br>20,21<br>38,44<br>34,62    | 0,33<br>1,56<br>12,58<br>44,39<br>41,14            | Terjadi peningkatan yg berarti jumlah penduduk yang berpendapatan di atas 300 ribu/bulan/kapita   |
| 15 | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Harapan Hidup (AHH)</li> <li>• Angka Melek Huruf (AMH)</li> <li>• Rata-rata Lama Sekolah</li> <li>• Daya Beli (PPP)</li> </ul>   | 77,81<br>72,97<br>97,98<br>10,61<br>579,52 | 77,97<br>73,03<br>98,35<br>10,64<br>579,76         | 1. IPM mengalami peningkatan dengan semua indikator pendukungnya juga meningkat (semuanya lebih tinggi dibanding rata-rata Jabar)<br>2. IPM Jabar 70,28<br>3. AHH Jabar 67,40<br>4. AMH Jabar 94,90<br>5. RLS Jabar 7,46<br>6. Daya beli Jabar 561,10 |
| 16 | PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)/triliun Rp: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas Dasar Harga Berlaku</li> <li>• Atas dasar Harga Konstan</li> </ul>   | 7,541<br>4,750                             | 8,968<br>5,066                                     | Meningkat 18,91 %<br><br>Meningkat 6,65 %   |
| 17 | LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)/%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer</li> <li>• Sekunder</li> <li>• Tersier</li> </ul>  | 6,96<br>4,70<br>8,03<br>5,98               | 6,65<br>-4,27<br>6,44<br>7,73                      |   |

( Tabel 2.2. lanjutan)

| NO | INDIKATOR   | 2005                         | 2006                         | KETERANGAN  |
|----|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 18 | Distribusi Persentase PDRB (Atas dasar harga berlaku) : <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer</li><li>• Sekunder</li><li>• Tersier</li></ul> | 2,99<br>48,57<br>48,44       | 2,65<br>47,13<br>50,22       | Distribusi Persentase PDRB (Atas dasar harga berlaku) : <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer</li><li>• Sekunder</li><li>• Tersier</li></ul> |
| 19 | PDRB per Kapita/Rp : <ul style="list-style-type: none"><li>• Atas dasar harga berlaku</li><li>• Atas dasar harga konstan</li></ul>                    | 5.569.813,08<br>3.508.084,49 | 6.408.948,60<br>3.620.579,94 | Meningkat 15,07 %<br>Meningkat 3,21 %   |

Berdasarkan capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Depok tahun 2007 di atas, secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,10 (tahun 2007) meningkat dari 77,97 (tahun 2006) di atas rata-rata IPM Jawa Barat 70,76 (tahun 2007) dengan indikator penunjangnya, yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 73,06 tahun; Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,66 tahun dan Angka Melek Huruf sebesar 98,52 %; Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) sebesar 580,60.

Dalam bidang kesehatan, salah satu ukuran yang menunjukkan derajat kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB) yang dihitung berdasarkan rasio jumlah bayi yang mati per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Hasil perhitungan AKB pada tahun 2005 mencapai 28,07, sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 27,99 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan ini menunjukkan semakin membaiknya derajat kesehatan ibu dan anak di Kota Depok.

Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnya persoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah semata, tetapi juga peran swasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran ini. Sesuai dengan potensi dan

perkembangan penyerapan kerja dari lapangan usaha yang ada, maka strategi pengembangan dan pembukaan lapangan kerja diprioritaskan pada kegiatan jasa (sektor tersier).

### 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007

Program dan kegiatan pada tahun 2007 diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (terutama bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan hak-hak dasar masyarakat), peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dan urusan pilihan pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2007 dapat dilihat pada realisasi belanja langsung dari tiap urusan berikut ini.

**Tabel 2.3. Realisasi Belanja Langsung Tiap-tiap Urusan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007**

| No | Urusan                  | Realisasi (%) |
|----|-------------------------|---------------|
|    | <b>WAJIB</b>            | <b>75,62</b>  |
| 1  | Pendidikan              | 77,67         |
| 2  | Kesehatan               | 80,18         |
| 3  | Pekerjaan Umum          | 79,27         |
| 4  | Perumahan               | 85,03         |
| 5  | Penataan ruang          | 90,00         |
| 6  | Perencanaan pembangunan | 84,71         |

| No | Urusan                                    | Realisasi (%) |
|----|---|---------------|
| 7  | Perhubungan                               | 89,35         |
| 8  | Lingkungan Hidup                          | 55,78         |
| 9  | Kependudukan dan catatan sipil            | 86,37         |
| 10 | Pemberdayaan perempuan                    | 98,38         |
| 11 | Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera | 95,85         |
| 12 | Sosial                                    | 99,41         |
| 13 | Tenaga kerja                              | 42,20         |
| 14 | Koperasi dan UKM                          | 92,56         |
| 15 | Penanaman modal                           | 98,59         |
| 16 | Kebudayaan                                | 98,90         |
| 17 | Pemuda dan Olahraga                       | 37,19         |
| 18 | Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri  | 95,04         |
| 19 | Pemerintahan Umum                         | 63,93         |
| 20 | Kepegawaian                               | 84,63         |
| 21 | Pemberdayaan masyarakat dan desa          | 97,61         |
| 22 | Kearsipan                                 | 94,71         |
| 23 | Komunikasi dan Informatika                | 94,36         |
|    | <b>PILIHAN</b>                            | <b>81,84</b>  |
| 24 | Pertanian                                 | 81,88         |
| 26 | Energi dan Sumberdaya Mineral             | 100           |
| 27 | Pariwisata                                | 94,71         |
| 28 | Kelautan dan perikanan                    | 95,54         |
| 29 | Perdagangan                               | 78,32         |
| 30 | Perindustrian                             | 99,22         |
|    | <b>Jumlah</b>                             | <b>75,91</b>  |

*\*LKPJ 2007*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 terutama disebabkan oleh terlambatnya penetapan APBD akibat perubahan regulasi dari Kepmendagri 29 tahun 2002 menjadi Permendagri 13 tahun 2006 sehingga berdampak pada berkurangnya waktu efektif pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD. Penyebab lainnya adalah keterlambatan transfer anggaran dari tingkat Propinsi maupun Pusat yang menyebabkan tertundanya kegiatan sehingga cenderung menumpuk pada akhir tahun dengan risiko tidak terlaksananya kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan penganggaran yang lebih tepat waktu, peningkatan kapasitas aparatur baik dalam administrasi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, peningkatan pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD. Beberapa kegiatan prioritas RPJMD yang belum berhasil diwujudkan dan target kinerja yang belum sepenuhnya dapat dicapai, diupayakan terlaksana pada tahun 2008 sehingga tidak menumpuk di tahun 2009.

#### **2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak**

Secara sederhana isu-isu strategis itu dapat dilihat dari nilai dampak yang ditimbulkannya dalam jangka panjang baik terhadap sosial, ekonomi, budaya, ideologi, maupun politik. Penetapan isu strategis yang kemudian diturunkan menjadi arah dan kebijakan strategis serta program strategis harus berdasarkan pendekatan yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dengan demikian penetapan isu strategis hendaknya tidak boleh hanya berdasarkan kasus-kasus yang diangkat oleh sebagian orang yang mungkin hanya berlaku secara lokal, tetapi harus lebih melihat besarnya nilai dampak dari masalah tersebut.

Untuk menetapkan suatu isu menjadi isu strategis, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan antara :

1. Pendalaman isu, melalui pemetaan (mapping)
2. Konsultasi Publik
3. FGD (Focus Group Discussion)

Pemetaan isu dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu mana yang benar-benar memiliki dampak sangat luas terhadap IPOLEKSOSBUD dan keamanan/ketertiban masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara satu isu dengan isu lainnya. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan teknik pencarian data-data /informasi di masyarakat dan bukti-bukti empiris. Tahap selanjutnya adalah melakukan konsultasi publik, dengan mendengarkan pendapat dan pandangan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini juga sekaligus dilakukan *need assesment* terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga penentuan arah kebijakan strategis dan program strategis dalam upaya menyelesaikan isu strategis dapat menjadi lebih efektif.

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kelompok diskusi dari para pakar dan *stakeholder* terkait. FGD ini yang sangat menentukan untuk memilih isu-isu mana yang layak dijadikan sebagai isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis ini representasi FGD dipilih dari pakar, akademisi, LSM, Birokrat, dan masyarakat. Berbagai isu dan masalah yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat dibahas. Setiap peserta diskusi dengan dipandu oleh moderator memberikan saran dan pendapatnya. Moderator mengarahkan, mencatat dan mensistematisir hal-hal penting yang menjadi pandangan bersama, untuk kemudian di sampaikan kepada peserta diskusi untuk mendapatkan tanggapan kembali sebagai bahan resume dari diskusi berupa rumusan isu strategis.

Pada tahun 2009 telah terumuskan beberapa isu strategis, yaitu :

#### **2.4.1 Pelayanan Publik**

Hasil pendalaman melalui FGD, konsultasi publik dan pendalaman di lapangan, ada dua sektor yang menjadi isu prioritas dari pelayanan publik, yaitu : pelayanan pada bidang pendidikan dan pelayanan pada bidang kesehatan.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukkan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti prosedur kurang transparan, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Merujuk SK MENPAN nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik, atau pelayanan umum, pada dasarnya merupakan, “segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian pengertian pelayanan publik sebagaimana dimaksud SK tersebut mempunyai arti yang sangat luas. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utama dalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara.

Dalam konteks ini pemerintah lebih bertindak sebagai penentu regulasi/aturan dibandingkan sebagai pelaksana semua pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah perlu memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri sebagai penyedia atau pelaksana pelayanan. Dipandang dari sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan yang didorong

oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan masyarakat mempunyai perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yang berlaku pada masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal ini membuka cakrawala baru bagi aparatur untuk semakin berperan secara lebih baik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Melalui diterapkannya kebijakan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilihat dari sisi pelayanan publik, diharapkan alur pelayanan menjadi lebih pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadi lebih dekat ke masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah perlu pelimpahan kewenangan menyangkut pelayanan publik pada tingkatan pemerintah di bawahnya, utamanya pemerintah kecamatan.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukkan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti kurang transparannya prosedur, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Berdasarkan hasil perhitungan, IKM Kota Depok secara keseluruhan sebesar 71,17%. Menurut SK MEN-PAN Nomor : 25/M.PAN/2/2004, angka ini dapat diartikan bahwa menurut persepsi masyarakat kota Depok, layanan publik di Kota Depok tergolong dalam kategori B atau kinerja unit pelayanan baik. Sedang jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan, maka meskipun kinerja unit pelayanan sudah baik, tetapi masih ada gap antara nilai kenyataan (71,17%) dengan nilai harapan masyarakat (94,63%) terhadap layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah secara keseluruhan yaitu nilai gap negatif sebesar -23,46%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit-unit pelayanan di kota Depok masih belum terpenuhi,

karena pelayanan prima belum dilaksanakan. Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan prima menjadi penting karena rakyat adalah pemegang saham dalam organisasi publik, dan harus mendapatkan deviden berupa pelayanan yang memuaskan, sehingga pemerintah memperoleh kepercayaan dan legitimasi yang besar dari masyarakat. Dengan demikian, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD seharusnya memuaskan dan menyenangkan pengguna jasa layanan. Di samping itu, pelayanan juga harus dilaksanakan secara cepat, tepat, ramah, dan penuh perhatian. Hal ini perlu menempatkan pengguna jasa layanan publik sebagai mitra, dan pada akhirnya pelayanan yang dilaksanakan akan menguntungkan semua pihak.

Untuk unit layanan kesehatan dasar diperoleh IKM sebesar 71,41% artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudah baik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar -13,57%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belum terpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Semua dimensi pelayanan indeks kepuasannya tergolong baik. Keluhan yang berkaitan dengan unit layanan ini adalah kurang memadainya peralatan kesehatan dan fasilitas penunjang. Oleh karena itu, disarankan perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada unit ini.

Untuk unit layanan pendidikan dasar diperoleh IKM sebesar 78,32% artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudah baik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar - 12,50%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belum terpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Kepuasan pada semua dimensi pelayanan tergolong baik. Kepuasan tertinggi dicapai pada dimensi kesopanan, kompetensi dan daya tanggap petugas. Keluhan dan saran yang disampaikan oleh responden, untuk dimensi fisik yang perlu diperhatikan antara lain adalah peralatan ekskul, ruang

perpustakaan dan lapangan olah raga pada beberapa sekolah. Adapun saran yang disampaikan sehubungan dengan pelayanan unit ini juga sangat bervariasi antara lain mengenai perlunya peningkatan sarana sekolah (lapangan olahraga, mushola, dll), perlunya peningkatan kualitas guru dalam mengajar, dan peningkatan pelayanan secara menyeluruh.

Menurut Undang-undang Pendidikan, pelayanan terhadap pendidikan merupakan hak setiap warga masyarakat untuk bisa mendapatkannya dengan baik, tanpa mengenal golongan, Suku Ras dan Agama. Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa, dan daya saing bangsa atau suatu daerah sangat tergantung dari kualitas SDM yang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang baik menjadi sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Hasil perhitungan IPM Kota Depok (data BPS tahun 2007) pada bidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 98,52 %, pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,66 tahun pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun bidang pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih terdapat penduduk Kota Depok yang masih dalam kategori buta aksara latin sebanyak 20.273 orang pada tahun 2006 dan al-qur'an sebanyak 36.491 orang pada tahun 2006 (data hasil survei Dinas Pendidikan Kota Depok).

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan pemecahan, diantaranya : masih tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terbatasnya kompetensi guru, terbatasnya kualitas output pendidikan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2008, seiring dengan perkembangan kota, terutama biaya pendidikan diprediksi akan tetap tinggi, sementara sarana dan prasarana pendidikan juga masih terbatas.

Demikian pula dengan pelayanan kesehatan, masyarakat di Kota Depok semua memerlukan pelayanan kesehatan yang baik untuk menjamin kesehatannya. Hasil kajian terhadap bidang kesehatan menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (73,06 tahun pada tahun 2007) , namun Kota Depok masih menghadapi berbagai permasalahan di Bidang Kesehatan pada tahun 2006, diantaranya: angka kesakitan seperti penyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus dan filariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadi penurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Paru sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Selain itu terdapat 9.235 balita kurang gizi dan 935 balita penderita gizi buruk; masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 jumlah kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2006 sebesar 27,99 per 1000 lahir hidup.

Selain hal tersebut di atas, permasalahan lain mencakup sarana prasana kesehatan dan sumber daya manusia. Pada tahun 2006 berdasarkan data BPS Jumlah puskesmas sebanyak 37, jumlah rumah sakit 14. Sedangkan jumlah dokter sebanyak 105 orang, petugas kesehatan lainnya sebanyak 470 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap penduduk jumlah tersebut masih belum memadai sehingga pelayanan kesehatan belum dapat mencapai hasil maksimal.

Berbagai intervensi program dan kegiatan di bidang kesehatan lebih diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yang sudah rendah dan berusaha untuk menurunkannya; (b) Mempertahankan AHH yang sudah tinggi dan berusaha untuk meningkatkannya; (c) Menurunkan beban biaya kesehatan bagi penduduk miskin; (d) Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan RSD.

### **2.4.2 Kemiskinan**

Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 sebesar 3,43 % yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi, kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa dan pada tahun 2006 terdapat 137.581 jiwa. Akan tetapi sebagai referensi, berdasarkan hasil pemetaan penduduk miskin, dengan menggunakan kriteria miskin pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan 14 kriteria sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan/semen kualitas buruk
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu murahan/tembok tanpa plester.
4. Fasilitas tempat buang air besar tidak ada/digunakan bersama
5. Sumber penerangan umum bukan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak untuk sehari-hari menggunakan minyak tahan/kayu bakar/arang
8. Tidak pernah mengkonsumsi daging/susu/ayam perminggu atau hanya satu kali dalam seminggu
9. Tidak pernah membeli pakaian/hanya membeli satu stel dalam setahun
10. Hanya satu kali/dua kali makan dalam sehari
11. Tidak mampu membayar untuk berobat

12. Lapangan pekerjaan : petani (lahan 0,5 ha), buruh tani, nelayan, buruh bangunan, pekerjaan lainnya yang tidak tetap.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah sekolah dasar
14. Tidak memiliki asset berupa tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Tabel.2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006**

| No. | KECAMATAN     | KK            | JIWA           |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1   | SAWANGAN      | 5.747         | 24.058         |
| 2   | PANCORANMAS   | 6.746         | 30.530         |
| 3   | SUKMAJAYA     | 5.577         | 25.701         |
| 4   | CIMANGGIS     | 8.503         | 34.577         |
| 5   | BEJI          | 2.843         | 12.106         |
| 6   | LIMO          | 2.651         | 10.609         |
|     | <b>JUMLAH</b> | <b>32.085</b> | <b>137.581</b> |

(Sumber : hasil Pemetaan Penduduk Miskin BPS Th 2006)

Untuk angka pengangguran, pada tahun 2006 angka pengangguran terbuka mencapai **108.491** dari jumlah angkatan kerja sebanyak 625.970 jiwa dan pada tahun 2005 sebesar **96.068** dari jumlah angkatan kerja sebanyak 617.288 jiwa. Beberapa penyebab diantaranya adalah : tidak seimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, dan rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurang sesuai dengan pasar kerja. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa persaingan untuk memasuki pasar kerja akan semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal (migrasi yang cukup tinggi) dan faktor internal (bertambahnya angkatan kerja baru, pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah).

### 2.4.3 Transportasi

Berdasarkan data Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok tahun 2007, teridentifikasi bahwa Depok memiliki 36 titik kemacetan, yang

terdiri dari 22 ruas jalan dan 14 simpul/persimpangan. Pada umumnya kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh terbatasnya kapasitas jalan. Ruas jalan yang ada pada saat ini terdiri dari jalan nasional 14,313 km, jalan provinsi 20,990 km dan jalan kota 435,57 km (38,39% kondisi baik dan 61,61% kondisi rusak). Permasalahan lain terkait dengan sistem transportasi Kota adalah tingginya tingkat pergerakan penduduk ke luar Depok khususnya ke arah DKI Jakarta, sebagian besar dengan menggunakan *moda sepeda motor (60%-70%)* dan sisanya menggunakan *mobil pribadi (10%-30%)*. Kinerja lalu lintas kota dinilai tinggi dengan *V/C ratio* melebihi 0,8 dan *load factor* tinggi. Fenomena daerah penyangga/*commuter* di Kota Depok menjelaskan tingginya tingkat pergerakan penduduk pada hari kerja dan saat-saat jam kerja.

Dari faktor-faktor diatas, kemacetan terjadi pada ruas-ruas jalan yang terkait langsung dengan pergerakan ke dan dari DKI Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Kondisi tersebut juga dipegaruhi oleh kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Untuk tahun 2009 diprediksi kemacetan masih akan terjadi di beberapa lokasi, apalagi jika tidak diintervensi oleh program dan kegiatan yang tepat, mengingat pertumbuhan penduduk dan kendaraan akan tetap lebih tinggi dibanding dengan perbaikan infrastruktur. Untuk tahun 2009 direncanakan akan diselesaikan 4 (empat) lokasi kemacetan, yaitu: simpang Jl.Tole Iskandar – Jl. Kemakmuran, simpang Jl.Tole Iskandar- Raden Saleh, simpang RTM-Akses UI dan Cinere Segmen I.

#### **2.4.4 Pelayanan Persampahan**

Hingga akhir tahun 2007 pengelolaan sampah di Kota Depok masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah

volume sampah dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2007 jumlah volume sampah kota mencapai 3.764 m<sup>3</sup>/hari sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 1.281 m<sup>3</sup>. Diharapkan pada tahun 2009 pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) melalui penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS). Pada tahun 2009 ditargetkan pembangunan dan operasionalisasi 20 UPS yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan dan di TPA. Melalui penyediaan UPS, semua sampah/pendorong gerobak sampah di pelayanan akan dibawa ke TPS untuk diolah secara terpadu, dengan menggunakan seperangkat alat untuk kegiatan pemilahan, *packing* dan *composting*. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang dan sisa komposting akan dikemas dan ditransportasikan untuk dibuang ke TPA.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Persampahan yang baru, maka setiap Kabupaten/Kota harus menerapkan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)-nya. Di Kota Depok, ini berarti penyempurnaan sistem control landfill yang selama ini digunakan dalam pengelolaan TPA. Penyediaan UPS, perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA, serta kesadaran dari masyarakat untuk disiplin membuang dan mereduksi sampah dari sumbernya, diyakini akan mampu mengatasi permasalahan persampahan. Demikian pula untuk tahun 2009 penyelesaian masalah persampahan juga telah diinisiasi kemungkinan bekerjasama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam penyediaan pengelolaan sampah secara bersama. Dalam Revisi RTRW Kota Depok tahun 2000 – 2010, telah dialokasikan tempat untuk Stasiun Penampung/Penerima Antara (SPA).

Tabel.2.5. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)

|                                | Satuan | 2005 | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|--------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Domestik</b>                |        |      |       |       |       |       |       |
| Timbulan total                 | m3/hr  | 455  | 791   | 1.24  | 1.726 | 2.253 | 2.823 |
| Total sampah terangkut         | m3/hr  | 360  | 601   | 892   | 1.105 | 1.261 | 1.355 |
| <b>Pasar</b>                   |        |      |       |       |       |       |       |
| Timbulan total                 | m3/hr  | 149  | 149   | 149   | 149   | 149   | 149   |
| Total sampah terangkut         | m3/hr  | 118  | 113   | 107   | 95    | 83    | 72    |
| <b>Penyapuan Jalan (Jalur)</b> |        |      |       |       |       |       |       |
| Timbulan Total                 | m3/hr  | 211  | 211   | 211   | 211   | 211   | 211   |
| Total sampah terangkut         | m3/hr  | 167  | 160   | 152   | 135   | 118   | 101   |
| <b>Komersil</b>                |        |      |       |       |       |       |       |
| Timbulan total                 | m3/hr  | 109  | 190   | 297   | 414   | 541   | 677   |
| Total sampah terangkut         | m3/hr  | 86   | 144   | 214   | 265   | 303   | 325   |
| <b>Total</b>                   |        |      |       |       |       |       |       |
| Timbulan Total                 | m3/hr  | 924  | 1.341 | 1.897 | 2.5   | 3.153 | 3.86  |
| Total Sampah Terangkut         | m3/hr  | 732  | 1.019 | 1.366 | 1.6   | 1.766 | 1.853 |

Sumber: Studi LES (local Environmental Strategy) 2004

#### 2.4.5 Pemberdayaan Masyarakat

Tuntutan masyarakat akan perbaikan pembangunan semakin tinggi baik dalam fungsi perencanaan maupun pengawasan. Pada fungsi perencanaan peranan masyarakat dalam mewujudkan *good governance* merupakan faktor utama pembangunan dimana masyarakat ditempatkan sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Peranan masyarakat dimulai dari proses perencanaan Musrenbang yang bermula dari Musrenbang Kelurahan yang melibatkan masyarakat pada level RT, RW dan kelurahan, kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum gabungan *stakeholders* Kecamatan, dimana hasil musrenbang Kecamatan akan menjadi masukan dalam forum SKPD yang pada akhirnya akan menjadi salah satu masukan dalam Musrenbang Kota. Hasil usulan masyarakat merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting baik dalam sisi perencanaan

maupun pengawasan. Dalam segi pengawasan, masyarakat merupakan perpanjangan pemerintah dalam pengawasan pembangunan dilingkungan sekitarnya guna menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan terutama dalam pembangunan fisik.

Dalam pengoptimalan peranan masyarakat, pemerintah daerah dapat memberdayakan lembaga masyarakat seperti RT, RW, LPM, PKK dan lainnya. Pengoptimalan peranan lembaga masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan perlu diiringi oleh penghargaan yang sesuai dari pemerintah daerah.

Perumusan aspek legal oleh Pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah mengenai perencanaan partisipatif merupakan langkah maju dalam peningkatan pembangunan seiring dengan makna otonomi daerah. Karena dengan partisipasi dapat memperluas basis pengetahuan dan representasi, membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*, dapat meningkatkan pendekatan *iteratif* dan *siklikal* dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal dan akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas.

#### **2.4.6 Tata Ruang**

Berkaitan dengan aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang, saat ini terjadi peningkatan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan di Kota Depok. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya perkotaan (perdagangan & jasa, permukiman, dan sebagainya) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan.

Masalah ini dipengaruhi oleh: kurangnya penegakan regulasi, masih lemahnya data tentang bangunan/gedung, belum adanya mekanisme yang mengatur proses pengendalian pemanfaatan ruang (pelaporan, pengawasan maupun penertiban), lemahnya koordinasi lintas instansi & penegakan hukum/aturan yang sementara ini telah ada.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kurang terkendalinya pemanfaatan ruang adalah terjadinya banjir. Ditambah dengan kurangnya penataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.

#### **2.4.7 Air Bersih**

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok yang semakin bertambah dan perkembangan kawasan pemukiman yang tersebar merata berakibat pada peningkatan kebutuhan air bersih, baik air tanah maupun melalui perpipaan atau PDAM. Pelayanan Air bersih Kota Depok melalui layanan perpipaan masih cukup rendah. Pada Tahun 2006 pelayanan baru mencakup 18,27 % penduduk kota. Hal ini disebabkan antara lain adalah tingginya penggunaan air tanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat dengan kualitas air yang masih dapat diterima.

Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan Kota Depok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta. Sampai Tahun 2007 telah dibangun 160.325 m jaringan distribusi primer dan sekunder serta 2.396 Sambungan Rumah (SR). Dalam RPJMD Kota Depok pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapat menambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR (63,7%). Hal ini disebabkan masih rendahnya minat penyambungan pelayanan air bersih perpipaan, mengingat masyarakat calon pelanggan masih memilih menggunakan air tanah meskipun jaringan distribusi telah

tersedia. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 sambungan air bersih di targetkan 1400 Sambungan Rumah. Pengembangan institusi pengelola air bersih Kota Depok pada tahun 2009 merupakan target yang harus diselesaikan guna memperbaiki pelayanan air bersih di Kota Depok yang merupakan pendapatan asli daerah.

#### **2.4.8 Banjir**

Sebagai sebuah wilayah yang terus mengalami perkembangan, terutama dalam bidang perekonomian dan kependudukan, Kota Depok saat ini harus menghadapi konsekuensi maupun dampak perkembangan tersebut. Tingginya pertumbuhan tingkat hunian menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang mampu menampung curahan air di musim hujan.

Dengan kondisi dan sistem drainase Kota Depok yang masih membutuhkan penanganan yang serius dan berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan terjadinya luapan air di beberapa tempat tertentu.

Kondisi ini semakin bertambah parah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya banjir, terutama kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarang yang sering kali memanfaatkan sungai dan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah.

#### **2.4.9 Investasi**

Potensi ekonomi kota Depok dapat dilihat dari sektor industri dengan jumlah industri besar dan kecil sebanyak 126 perusahaan, industri makanan dan minuman sebanyak 26 perusahaan dan industri pakaian jadi sebanyak 20 perusahaan. Pada bidang perdagangan volume dan nilai ekspor kota Depok pada tahun 2006 sebesar 121.307.942 kgs dan \$227,8 juta, 142,2 ribu Euro, 196,9 Juta yen dan 6,3 juta bath. Pada bidang pertanian sektor agribisnis merupakan salah satu unggulan daerah perkotaan dimana luas lahannya semakin berkurang, komoditas unggulan antarlain belimbing, jambu biji, tanaman hias dan ikan hias.

Permasalahan yang terkait dengan pengembangan investasi adalah belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; belum terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; belum tersedianya informasi akurat yang dibutuhkan calon investor; serta masih terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan investasi. Untuk itu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kebijakan di bidang penanaman modal terkait dengan stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; penyederhanaan pelaksanaan prosedur investasi melalui pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi.

Untuk tahun 2009 diharapkan tetap terjadi peningkatan investasi secara makro dan dari sisi mikro ekonomi diharapkan terjadi penguatan investasi di sektor tersier, terutama perdagangan dan jasa. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah kota bersama dengan masyarakat menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap mendorong peningkatan potensi daerah. Selain itu pemerintah kota juga dapat menerbitkan regulasi yang mampu mendorong peran serta sektor swasta

#### **2.4.10 Pemilu**

Pada Tahun 2009 untuk kedua kalinya, akan dilaksanakan Pemilu Presiden secara langsung yang diawali dengan Pemilu untuk anggota DPR/DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan Pemilu tersebut akan menghasilkan berbagai perubahan. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah dan nasional yang perlu diantisipasi daerah adalah perilaku pengikut dalam menerima

kekalahan. Karena itu yang perlu dibangun adalah kesadaran politik masyarakat yang didukung oleh elite partai untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan dapat menerima dan melaksanakan pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi dalam memilih jabatan-jabatan politik. Bercermin pada pengalaman Pemilu Nasional 2004 di Kota Depok yang berlangsung tanpa gangguan, diperkirakan pada 2009 dengan tingkat kesadaran politik makin tinggi baik pada tataran elit maupun masyarakat, maka Pemilu Nasional Tahun 2009 akan berlangsung dengan tenang. Perbedaan ideologis antar partai yang tidak terlalu mencolok akan lebih mendorong pemilih untuk memilih program-program yang ditawarkan. Kesepakatan dan kesadaran para elit partai untuk bermain dalam arena demokrasi akan diikuti oleh masyarakat dengan baik. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah antusiasme masyarakat untuk mengikuti Pemilu perlu didukung oleh pelaksanaan fungsi partai secara tepat dan pemenuhan janji perubahan ke arah yang lebih baik oleh pemenang Pemilu. Meskipun partisipasi pemilih tidak mempengaruhi legitimasi hasil Pemilu, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pendataan pemilih yang akurat, sehingga setiap anggota masyarakat yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan haknya, karena pada Pemilu Nasional 2004 masalah pendaftaran pemilih tersebut menjadi isu penting. Namun dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu Nasional 2004 cukup tinggi mengingat para pemilih sangat antusias untuk ikut mewarnai perubahan politik nasional cukup besar.

Diperkirakan pada 2009 tingkat partisipasi pemilih akan menurun mengingat masalah pendataan pemilih belum memiliki system yang tertata dengan baik. Di samping itu dapat disebabkan tingkat kejenuhan pemilih, karena pelaksanaan pemilu yang cukup sering, antara pemilu gubernur, pemilu bupati/walikota, dan pemilu nasional, perubahan yang diharapkan belum terwujud atau disebabkan sosialisasi yang kurang. Karena itu diharapkan pendataan dapat dilaksanakan secara akurat, dan partai politik

dapat melakukan fungsinya dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Nasional 2009 dan komunikasi politik yang lebih intensif mengenai perubahan yang akan dilakukan dalam pemilu.

### **BAB III**

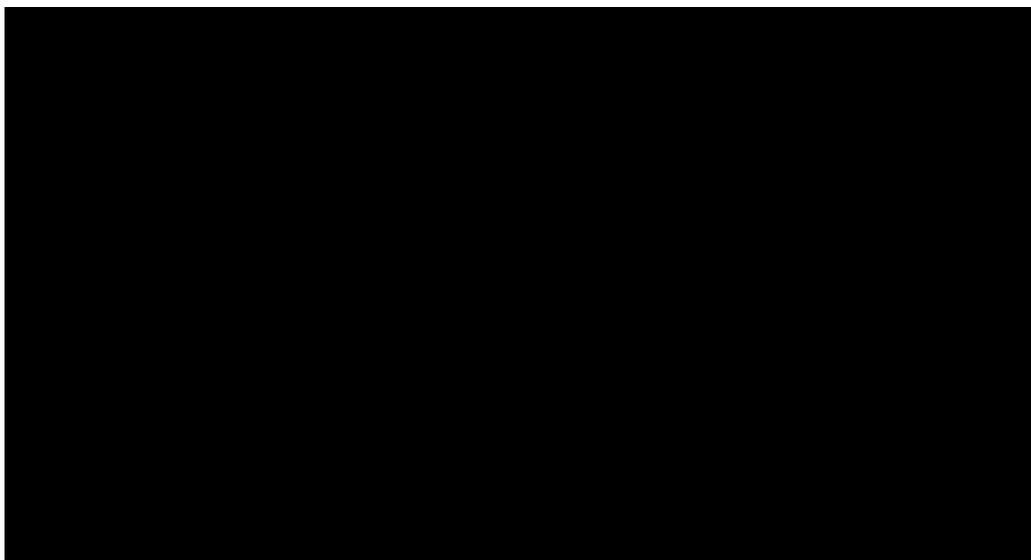
#### **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

---

#### **3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008**

Pembangunan ekonomi Kota Depok mengalami berbagai kemajuan, hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Depok terakhir (tahun 2006/angka sementara), atas dasar harga berlaku, mengalami peningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005, yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- (dalam juta) pada Tahun 2005 menjadi Rp. 8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005 menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalam juta) Tahun 2006.

**Gambar. 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006**



*Sumber: BPS Kota Depok, 2006*

Penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah sektor tersier (50,22 %), kemudian diikuti sektor sekunder (47,13 %), dan sektor primer (2,65 %). Fakta ini memperlihatkan bahwa sektor tersier mulai menggeser sektor sekunder yang sebelumnya merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Depok. Secara rinci perkembangan proporsi sumbangan sektor-sektor dapat disimak pada Tabel.3.1.

**Tabel 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA DEPOK  
TAHUN 2003-2006 ATAS DASAR HARGA BERLAKU**

| <b>KELOMPOK SEKTOR</b>              | <b>2003</b>  | <b>2004</b>  | <b>2005)*</b> | <b>2006)*</b> |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>(1)</b>                          | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>   | <b>(4)</b>    | <b>(5)</b>    |
| <b>A. PRIMER</b>                    | <b>3,59</b>  | <b>3,23</b>  | <b>2,99</b>   | <b>2,65</b>   |
| 01. PERTANIAN                       | 3,59         | 3,23         | 2,99          | 2,65          |
| 02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN     | -            | -            | -             | -             |
| <b>B. SEKUNDER</b>                  | <b>48,51</b> | <b>48,59</b> | <b>48,57</b>  | <b>47,13</b>  |
| 03. INDUSTRI PENGOLAHAN             | 38,30        | 38,52        | 38,49         | 37,54         |
| 04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM      | 4,34         | 4,09         | 4,81          | 4,73          |
| 05. BANGUNAN/KONSTRUKSI             | 5,87         | 5,98         | 5,27          | 4,86          |
| <b>C. TERSIER</b>                   | <b>47,90</b> | <b>48,18</b> | <b>48,44</b>  | <b>50,22</b>  |
| 06. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN   | 30,44        | 30,60        | 30,07         | 32,32         |
| 07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI     | 5,66         | 5,64         | 6,81          | 6,42          |
| 08. BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3,82         | 3,94         | 3,83          | 3,53          |
| 09. JASA-JASA                       | 7,98         | 8,00         | 7,71          | 7,94          |

*Sumber: BPS Kota Depok, 2006*

Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01 %). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang bertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok. Subsektor

yang tinggi pula pertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.

Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2008, termasuk Depok diperkirakan masih mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun tidak terlalu tinggi akibat kebijakan kenaikan harga BBM baru-baru ini. Kajian ekonomi regional Jawa Barat yang disusun oleh Bank Indonesia, menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat triwulan I-2008 diperkirakan tumbuh sekitar 6,62 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Pada triwulan II, prospek perekonomian Jawa Barat bahkan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,70 %-7,10 %. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan membaiknya ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian Jawa Barat.

### **3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009**

Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Perekonomian tahun 2009 terutama akan dipengaruhi oleh krisis energi, harga pangan dunia dan krisis finansial Amerika Serikat yang berpotensi memicu inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara internal, perekonomian Depok akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, yang di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Faktor lainnya adalah ketersediaan infrastruktur. Melalui penyediaan infrastruktur yang baik, diperkirakan mempengaruhi efisiensi perekonomian dan daya tarik investasi.

Perekonomian Kota Depok tahun 2009 juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor tersier yang mulai menggeser sektor sekunder. Pada tahun 2009 diperkirakan kontribusi sektor tersier akan makin besar seiring dengan melemahnya pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban daerah yang

berpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 diharapkan berlangsung lancar dan aman sehingga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian daerah.

Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kota Depok tahun 2009 diperkirakan tetap meningkat, apalagi mengingat kondisi ekonomi makro yang semakin baik dari tahun ke tahun. Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Realisasi investasi diperkirakan meningkat, terutama dengan terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu. Infrastruktur jalan yang meningkat juga diharapkan akan lebih memacu daya tarik investasi di Kota Depok. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Depok diperkirakan didorong oleh sektor tersier, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa.

### **3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2009**

Arah kebijakan ekonomi Nasional :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi, ekspor, industri olahan, pertanian, dan UKM.
3. Penanggulangan kemiskinan melalui: Perbaikan iklim ketenagakerjaan, revitalisasi pertanian, peningkatan ekonomi dan akses rakyat miskin kpd pelayanan dasar, termasuk pangan/beras.
4. Meningkatkan LPE 5,5-6,1%, mengurangi pengangguran terbuka 6,5-7,5 % dan mengurangi jumlah penduduk miskin 10-11 %.

Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat :

1. Pertumbuhan yang berkualitas melalui pengembangan *core business* Jabar (agribisnis, kelautan, manufaktur, jasa, pariwisata, SDM) dan mengurangi disparitas antar wilayah
2. Pengembangan dunia usaha, investasi dan keuangan daerah
3. Perkuatan sisi hilir industri dan nilai tambah agribisnis dan industri olahan

4. Peningkatan kemitraan dan penguasaan teknologi informasi
5. Meningkatkan LPE 5,5-6,5 %, mengurangi jumlah penduduk miskin kurang dari 21,2%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 72,31% dan mengurangi pengangguran di bawah 9,8 %.

Arah kebijakan ekonomi Kota Depok :

1. Meningkatkan investasi daerah melalui perbaikan iklim berusaha yang lebih kondusif, antara lain dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan terpadu satu pintu.
2. Memberikan dukungan yang kuat terhadap tumbuhnya UKM (usaha kecil menengah) serta pertanian dan industri kecil dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sehingga ikut memperkuat struktur ekonomi daerah.
3. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan antara program Pusat dan daerah, serta yang diinisiasi oleh dunia usaha melalui CSR, dan lain-lain.

### **3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah**

#### **3.4.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 5 tahun (2004-2008) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 18,54 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun adalah berkisar sebesar 10,01%. Berikut ini disajikan tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

**Tabel.3.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| NO                  | TAHUN | PAD               | Pertumbuhan       |       | APBD                      | Proporsi (%) |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|---------------------------|--------------|
|                     |       |                   | Rp                | (%)   |                           |              |
| 1                   | 2004  | 49,916,768,407.91 |                   |       | 462,589,805,400.00        | 10.79        |
| 2                   | 2005  | 64,060,869,668.97 | 14,144,101,261.06 | 28.34 | 534,250,694,945.27        | 11.99        |
| 3                   | 2006  | 68,631,174,736.00 | 4,570,305,067.03  | 7.13  | 689,819,605,865.97        | 9.95         |
| 4                   | 2007  | 75,457,361,773.64 | 6,826,187,037.64  | 9.95  | 905,334,160,948.24        | 8.33         |
| 5                   | 2008* | 97,139,989,565.57 | 21,682,627,791.93 | 28.73 | 1,031,980,164,297.70      | 9.41         |
| Rata-rata per tahun |       |                   | 11,805,805,289.42 | 18.54 | <b>905,993,607,864.30</b> | 10.10        |

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

### 3.4.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) pertumbuhannya rata-rata per tahun adalah sebesar 12,00% dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama adalah rata-rata sebesar 68,94 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun :

**Tabel.3.3. Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| NO                  | TAHUN | Dana Perimbangan   | Pertumbuhan         |        | APBD                      | Proporsi (%) |
|---------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|---------------------------|--------------|
|                     |       |                    | Rp                  | (%)    |                           |              |
| 1                   | 2004  | 371,166,629,595.41 |                     |        | 462,589,805,400.00        | 80.24        |
| 2                   | 2005  | 415,229,467,888.00 | 44,062,838,292.59   | 11.87  | 534,250,694,945.27        | 77.72        |
| 3                   | 2006  | 520,303,329,045.00 | 105,073,861,157.00  | 25.31  | 689,819,605,865.97        | 75.43        |
| 4                   | 2007  | 504,052,499,829.00 | (16,250,829,216.00) | (3.12) | 905,334,160,948.24        | 55.68        |
| 5                   | 2008* | 574,268,400,146.29 | 70,215,900,317.29   | 13.93  | 1,031,980,164,297.70      | 55.65        |
| Rata-rata per tahun |       |                    | 50,775,442,637.72   | 12.00  | <b>905,993,607,864.30</b> | 68.94        |

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

Dari tabel di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dalam sumber penerimaan APBD Kota Depok, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap

penerimaan Dana Perimbangan khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).

### **3.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) pertumbuhannya rata-rata per tahun mengalami kenaikan 1.376,90 % . Kenaikan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 166.836.404.377,31 atau sebesar 5.561,21% dari tahun 2006 disebabkan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 7,90 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok. Terjadi pertumbuhan yang besar pada tahun 2007, hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terjadi perubahan uraian pada rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Tabel .3.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok  
Tahun 2004-2008**

| NO                  | TAHUN | Lain-lain<br>Pendapatan yang<br>Sah | Pertumbuhan         |          | APBD                      | Kontribusi<br>(%) |
|---------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|-------------------|
|                     |       |                                     | Rp                  | (%)      |                           |                   |
| 1                   | 2004  | 10,411,099,000.00                   |                     |          | 462,589,805,400.00        | 2.25              |
| 2                   | 2005  | 13,533,200,000.00                   | 3,122,101,000.00    | 29.99    | 534,250,694,945.27        | 2.53              |
| 3                   | 2006  | 3,000,000,000.00                    | (10,533,200,000.00) | (77.83)  | 689,819,605,865.97        | 0.43              |
| 4                   | 2007  | 169,836,404,377.31                  | 166,836,404,377.31  | 5,561.21 | 905,334,160,948.24        | 18.76             |
| 5                   | 2008* | 160,056,976,907.31                  | (9,779,427,470.00)  | (5.76)   | 1,031,980,164,297.70      | 15.51             |
| Rata-rata per tahun |       |                                     | 37,411,469,476.83   | 1,376.90 | <b>905,993,607,864.30</b> | 7.90              |

*Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008*

Total pendapatan Kota Depok yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 17,97% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD adalah sebesar 86,93% per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel .3.5. Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| NO                  | TAHUN | PENDAPATAN         | Pertumbuhan        |       | APBD                      | Kontribusi<br>(%) |
|---------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|---------------------------|-------------------|
|                     |       |                    | Rp                 | (%)   |                           |                   |
| 1                   | 2004  | 431,494,497,003.32 |                    |       | 462,589,805,400.00        | 93.28             |
| 2                   | 2005  | 492,823,537,556.97 | 61,329,040,553.65  | 14.21 | 534,250,694,945.27        | 92.25             |
| 3                   | 2006  | 591,934,503,781.00 | 99,110,966,224.03  | 20.11 | 689,819,605,865.97        | 85.81             |
| 4                   | 2007  | 749,346,265,979.95 | 157,411,762,198.95 | 26.59 | 905,334,160,948.24        | 82.77             |
| 5                   | 2008* | 831,465,366,619.17 | 82,119,100,639.22  | 10.96 | 1,031,980,164,297.70      | 80.57             |
| Rata-rata per tahun |       |                    | 99,992,717,403.96  | 17.97 | <b>905,993,607,864.30</b> | 86.93             |

*Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008*

### 3.4.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel .3.6. Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| NO                  | TAHUN | BELANJA              | PERTUMBUHAN (%)    |       | APBD                      | PROPORSI (%) |
|---------------------|-------|----------------------|--------------------|-------|---------------------------|--------------|
|                     |       |                      | Rp                 | %     |                           |              |
| 1                   | 2004  | 456,859,805,400.00   |                    |       | 462,589,805,400.00        | 98.76        |
| 2                   | 2005  | 527,366,694,945.27   | 70,506,889,545.27  | 15.43 | 534,250,694,945.27        | 98.71        |
| 3                   | 2006  | 674,902,436,665.97   | 147,535,741,720.70 | 27.98 | 689,819,605,865.97        | 97.84        |
| 4                   | 2007  | 892,250,553,147.93   | 217,348,116,481.96 | 32.20 | 905,334,160,948.24        | 98.55        |
| 5                   | 2008* | 1,018,651,516,097.70 | 126,400,962,949.77 | 14.17 | 1,031,980,164,297.70      | 98.71        |
| Rata-rata per tahun |       |                      | 108,214,922,712.41 | 18.83 | <b>905,993,607,864.30</b> | 98.51        |

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007, Belanja Daerah dikelompokan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan mengalami peningkatan sebesar 18.83% per tahun dan kontribusinya

terhadap APBD adalah sebesar 98.51% per tahun, perkembangannya sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel .3.7. Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| NO | URAIAN                          | TAHUN ANGGARAN            |                           |                           |                           |                             |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |                                 | 2004                      | 2005                      | 2006                      | 2007                      | 2008                        |
|    | <b>BELANJA</b>                  | <b>456,859,805,400.00</b> | <b>527,366,694,945.27</b> | <b>674,902,436,665.97</b> | <b>892,250,553,147.93</b> | <b>1,018,651,516,097.70</b> |
| 1  | Belanja SKPD                    | 412,675,240,149.00        | 464,293,194,787.75        | 582,157,266,561.97        | 754,389,927,553.07        | 845,303,341,712.39          |
| 2  | Belanja Hibah                   |                           |                           | -                         | 10,500,000,000.00         | 39,886,114,000.00           |
| 3  | Belanja Bantuan Sosial          |                           |                           | -                         | 79,851,311,509.00         | 110,780,916,058.00          |
| 4  | Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 42,937,070,300.00         | 48,154,906,600.00         | 47,134,393,000.00         | 26,250,000,000.00         | -                           |
| 5  | Belanja Tidak terduga           | 1,247,494,951.00          | 14,918,593,557.52         | 45,610,777,104.00         | 21,259,314,085.86         | 22,681,144,327.31           |

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

### 3.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perkembangan pembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 69,90% per tahun, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

**Tabel .3.8. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008**

| TAHUN                 | PEMBIAYAAN         |                   | SURPLUS (DEFISIT)    | PERTUMBUHAN         |              |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       | PENERIMAAN         | PENGELUARAN       |                      | Rp                  | %            |
| 2004                  | 31,095,308,396.68  | 5,730,000,000.00  | (25,365,308,396.68)  |                     |              |
| 2005                  | 41,427,157,388.30  | 6,884,000,000.00  | (34,543,157,388.30)  | (9,177,848,991.62)  | 36.18        |
| 2006                  | 97,885,102,084.97  | 14,917,169,200.00 | (82,967,932,884.97)  | (48,424,775,496.67) | 140.19       |
| 2007                  | 155,987,894,968.29 | 13,083,607,800.00 | (142,904,287,167.98) | (59,936,354,283.01) | 72.24        |
| 2008*                 | 200,514,797,678.53 | 13,328,648,200.00 | (187,186,149,478.53) | (44,281,862,310.55) | 30.99        |
| Rata-rata Pertumbuhan |                    |                   |                      |                     | <b>69.90</b> |

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

### **3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.5.1 Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 memperhatikan prinsi-prinsip sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Selanjutnya disampaikan kebijakan dari masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut :

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya perolehan penerimaan daerah dari sumber PAD selalu meningkat setiap tahun, namun persentasenya masih relatif rendah dalam menyumbang keseluruhan pendapatan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mengalami peningkatan adalah : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu bagi laba PDAM Bogor karena diperkirakan adanya peningkatan penerimaan perusahaan mengingat masih potensialnya pasar bagi pelanggan baru air bersih. Selain itu, peningkatan juga diharapkan dari

beberapa jenis pajak, yaitu pajak reklame seiring dengan telah berubahnya tarif, pajak hotel dan restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, dan retribusi IMB.

**b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, arah kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:

- a. DBH akan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah.
- b. DBH akan mengalami proses penyempurnaan dalam perhitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyalurannya ke daerah.
- c. DBH akan ditingkatkan akuntabilitas/tanggung gugat serta efektivitas penggunaannya.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan RKP 2009, diupayakan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. DAU sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkat pada tahun 2009.

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 :

- a. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan sedang dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang menjadi urusan daerah.

- b. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, melalui kegiatan khusus di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan infrastruktur.
- c. DAK digunakan untuk membiayai bidang-bidang tertentu, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perhubungan.

**c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.**

Lain-lain Pendapatan yang Sah juga merupakan kewenangan Pemerintah dan Provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi berdasarkan hasil kordinasi dan konsultasi dengan daerah.

Jenis penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yang diharapkan meningkat adalah dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

**3.5.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2009 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program RPJMD (tahun ke empat) serta Urusan Wajib dan Pilihan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan wajib terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan perangkat daerah kepegawain dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: pertanian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan serta industri.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2009, alokasi belanja pegawai akan mengalami peningkatan seiring adanya kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 15, penyesuaian eselonering dalam rangka pelaksanaan SOPD baru, dan pengangkatan CPNSD.
2. Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya (Pasal 39 ayat [2] Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja

hibah diperkirakan mengalami penurunan terkait dengan selesainya program PPK-IPM.

4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan stimulan operasional RT, RW, dan LPM, olahraga, keagamaan dan fokus utama bantuan pada program pendidikan gratis serta jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu/miskin.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### **3.5.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan tahun 2009 untuk Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2009, akan ditingkatkan dana penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan Banten sebesar Rp. 10 Milyar.

## BAB IV

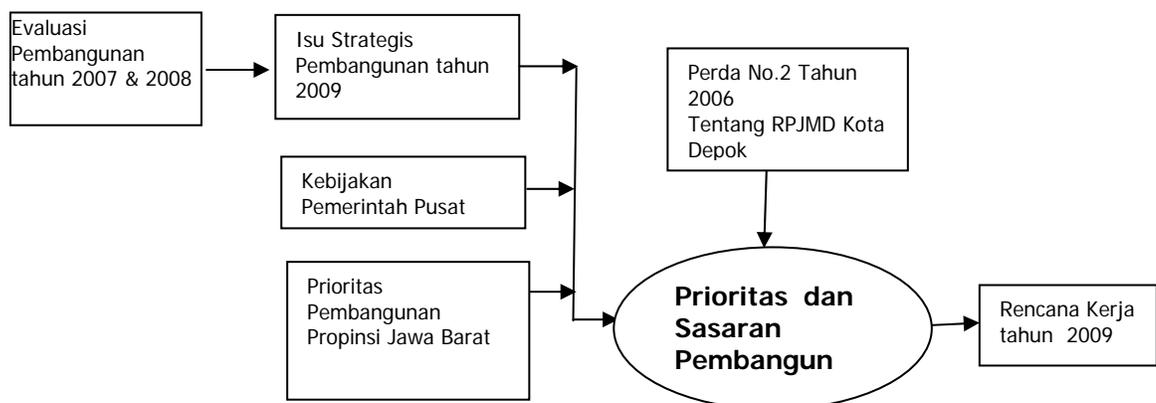
### PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

---

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi salah satu dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 disusun berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006– 2011 dan beberapa arahan RKP serta RKPD Propinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan Sasaran pembangunan. Proses penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir pada gambar 3.4.

**Gambar 4.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah**



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana

terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (RKPD) Provinsi tahun 2009, yaitu 8 (delapan) common goals Provinsi Jawa Barat tahun 2009, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
2. Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Peningkatan Kinerja Aparatur
5. Penanganan Pengelolaan Bencana
6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
8. Kemandirian Energi dan Kecukupana Air Bersih

Adapun target Indikator Makro Kota Depok untuk tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 %, mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih 1400 Sambungan Rumah (SR), bertambahnya unit pengolahan sampah sebanyak 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6,48, pertumbuhan PAD sebesar 5% dari tahun sebelumnya, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 80,21 (meliputi Indeks Kesehatan (IK) menjadi sebesar 74,79, Indeks Pendidikan (IP) menjadi sebesar 70,00, Indeks Daya Beli (IDB) menjadi sebesar 622,99.

Untuk merealisasikan pencapaian target indikator makro kota tahun 2009 dan upaya untuk mengeliminir isu strategis, diperlukan penentuan prioritas pembangunan agar alokasi sumberdaya bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa analisis terhadap permasalahan kota dan RPJMD, prioritas pembangunan tahun 2009 meliputi :

## I. Peningkatan Pelayanan Publik.

*Fokus:*

**Pendidikan:** peningkatan sarana prasarana, meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan angka melek huruf, peningkatan layanan untuk siswa rawan DO/miskin, peningkatan mutu layanan

**Kesehatan :** peningkatan sarana prasarana, penanganan gizi buruk, peningkatan layanan untuk keluarga miskin, optimalisasi RSUD, menurunkan AKI dan AKB.

*Program :*

- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga
- Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
- Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah.
- Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Swasta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
- Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

## **II. Penanggulangan Kemiskinan**

### *Fokus :*

Penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat (petani, pelaku usaha mikro/kecil), dan perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kemitraan pemerintah dan masyarakat

### *Program :*

- Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
- Perlindungan Ketenagakerjaan
- Pengembangan Agribisnis Perkotaan
- Penataan Lingkungan Pemukiman
- Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga.
- Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
- Peningkatan Manajemen Pelayanan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

## **III. Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat**

### *Fokus :*

Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan efektifitas manajemen transportasi, sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan.

*Program :*

- Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Pengembangan Manajemen Transportasi
- Pengembangan Moda Transportasi
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah

#### **IV. Penanggulangan dan Peningkatan Layanan Persampahan**

*Fokus :*

Mengatasi keterbatasan lahan TPS dan TPA, mengoptimalkan kualitas pelayanan persampahan, meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.

*Program :*

- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

#### **V. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

*Fokus :*

Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunitasnya

*Program :*

- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya
- Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

#### **VI. Pengendalian Tata Ruang**

*Fokus :*

Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindung dan situ, peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta pentaan pasca bencana.

*Program :*

- Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **VII. Pengendalian Banjir**

*Fokus :*

Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

mencegah banjir.

*Program :*

- Pengendalian Banjir
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

## **VIII. Peningkatan Pelayanan Air Bersih**

*Fokus :*

Pengembangan institusi pengelola Air Bersih Kota Depok, peningkatan jumlah pelanggan

*Program :*

- Program Penataan Lingkungan Pemukiman.
- Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih

## **IX. Investasi**

*Fokus :*

Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur.

*Program :*

- Pengembangan Obyek Wisata
- Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya
- Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM
- Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat
- Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
- Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa
- Peningkatan Daya Tarik Investasi
- Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

## **X. Pemilu**

*Fokus :*

Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial, meningkatkan partisipasi politik masyarakat

*Program :*

- Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

Penjabaran prioritas program dapat dilihat pada lampiran II.

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa Sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaitu Program : peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan pelestarian seni dan

budaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA**

---

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam rumpun Urusan Wajib dan Pilihan Perangkat Daerah. Program-program mengacu pada RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dan SKPD pelaksana mengacu pada Perda No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah pada Lampiran III.

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

---

Sesuai amanat Undang-undang, RKPD merupakan pedoman untuk menyusun rancangan APBD. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKPD tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota berkewajiban melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPD tahun 2009 dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Depok dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Walikota.
3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota melalui Bapeda.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada RKPD ini.

6. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

RKPD Kota Depok Tahun 2009, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
 NOMOR : 12 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 29 Oktober 2008  
 TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

### Prioritas Program dan SKPD Pelaksana

| NO. | Prioritas Pembangunan            | Sasaran  | SKPD yang Melaksanakan   | Program   |
|-----|----------------------------------|--|--|---|
| 1   | 2                                | 3  | 4  | 5   |
| 1   | <b>Pelayanan Publik</b>          | Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan sehingga mencapai indeks:<br>a. Kesehatan: 74,79;<br>b. Pendidikan: 70;  | a. Dinas Kesehatan<br>b. Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Daerah<br>c. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan   | 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan<br>2. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga<br>3. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>4. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar<br>5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan<br>6. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan<br>7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah.<br>8. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan<br>9. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Swasta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan<br>10. Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah<br>11. Peningkatan Manajemen Pelayanan |
| 2   | <b>Penanggulangan Kemiskinan</b> | Meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki sanitasi lingkungan, memperbaiki gizi buruk, perbaikan rumah tidak layak huni, dengan target:<br>a. Daya Beli: 595,5<br>b. kawasan kumuh: 3 lokasi<br>c. Gizi buruk: 500 (TFC: 180, Ibu Hamil: 400)<br>d. Rumah tidak layak huni: 180 | a. Disnakersos<br>b. Dinas Pertanian dan Perikanan<br>c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman<br>d. Dinas Kesehatan<br>e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana<br>f. Bappeda<br>g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan | 1. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan<br>2. Perlindungan Ketenagakerjaan<br>3. Pengembangan Agribisnis Perkotaan<br>4. Penataan Lingkungan Pemukiman<br>5. Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih<br>6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan<br>7. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga.<br>8. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi<br>9. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan<br>10. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan<br>11. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera<br>12. Peningkatan Manajemen Pelayanan<br>13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup  |

| No | Prioritas Pembangunan                                     | Sasaran  | SKPD yang Melaksanakan   | Program  |
|----|---|--|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 3  | <b>Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat</b>      | Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan efektifitas manajemen transportasi, meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan, dengan target 2 titik macet | a. Dinas Perhubungan<br>b. Dinas Bina Marga dan SDA  | 1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi<br>2. Pengembangan Manajemen Transportasi<br>3. Pengembangan Manajemen Transportasi<br>4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan<br>5. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah |
| 4  | <b>Penanggulangan dan Peningkatan Layanan Persampahan</b> | Mengoptimalkan kualitas pelayanan persampahan, membangun 10 UPS dan mengefektifkan pengelolaan 26 UPS.   | a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan   | 1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA<br>2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS  |
| 5  | <b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>                | Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan masyarakat<br>Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan masyarakat                             | a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan<br>b. Bappeda<br>c. Badan Lingkungan Hidup<br>d. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya | 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan<br>2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>3. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya<br>4. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera  |
| 6  | <b>Pengendalian Tata Ruang</b>                            | Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, mengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindung dan situ serta pemulihan pasca bencana.                             | a. Bappeda<br>b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman<br>c. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup   | 1. Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan<br>2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan<br>3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
| 7  | <b>Pengendalian Banjir</b>                                | Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah banjir, dengan target tertangani 1 lokasi.   | a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman<br>b. Dinas Bina Marga dan SDA  | 1. Pengendalian Banjir<br>2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan   |
| 8  | <b>Peningkatan Pelayanan Air Bersih</b>                   | Meningkatkan jumlah pelanggan dan mengembang-kan institusi pengelola air bersih Kota Depok, dengan target 1.400 SR.  | a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman<br>b. Dinas Bina Marga dan SDA  | 1. Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih<br>2. Program Penataan Lingkungan Permukiman   |

| No | Prioritas Pembangunan | Sasaran  | SKPD yang Melaksanakan   | Program  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 1  | 2                     | 3  | 4  | 5  |
| 9  | Investasi             | Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dengan target LPE 6,48, pertumbuhan PAD 5 %.<br>Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dengan target LPE 6,48, pertumbuhan PAD 5 %. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pemuda Olahraga, Seni dan Budaya Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya</li> <li>b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>c. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar</li> <li>d. Bappeda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Obyek Wisata</li> <li>2. Pengembangan Obyek Wisata</li> <li>3. Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya</li> <li>4. Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya</li> <li>5. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM</li> <li>6. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat</li> <li>7. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah</li> <li>8. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah</li> <li>9. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa</li> <li>10. Peningkatan Daya Tarik Investasi</li> <li>11. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan</li> <li>12. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</li> </ul>  |
| 10 | Pemilu                | Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor Kesbang-polinmas Kantor Kesbang-polinmas</li> <li>b. Kantor Pemberdaya-an Masyarakat &amp; KP</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>2. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>3. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>4. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>5. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>6. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>7. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>8. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>9. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>10. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>11. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>12. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>13. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>14. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>15. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>16. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>17. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>18. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>19. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>20. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>21. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>22. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>23. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>24. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>25. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>26. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>27. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>28. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>29. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>30. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>31. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>32. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>33. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>34. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>35. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>36. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>37. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>38. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>39. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>40. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>41. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>42. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>43. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>44. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>45. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>46. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>47. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>48. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>49. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>50. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>51. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>52. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>53. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>54. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>55. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>56. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>57. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>58. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>59. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>60. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>61. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>62. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>63. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>64. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>65. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>66. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>67. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>68. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>69. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>70. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>71. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>72. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>73. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>74. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>75. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>76. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>77. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>78. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>79. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>80. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>81. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>82. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>83. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>84. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>85. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>86. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>87. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>88. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>89. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>90. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>91. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>92. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>93. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>94. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>95. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>96. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>97. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>98. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>99. Pembinaan Organisasi Sosial</li> <li>100. Pembinaan Organisasi Sosial</li> </ul> |

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 Oktober 2008

TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

Rencana Kerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2009

| No   | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target    | ORGANISASI PELAKSANA |
|--|---|--|-----------|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4         | 6                    |
| <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   |   | <b>Pendidikan</b><br><b>Dinas Pendidikan</b>   |           |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |           |                      |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 98%       | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 98%       | Dinas Pendidikan     |
| 3  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor   | 85%       | Dinas Pendidikan     |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan   | 85%       | Dinas Pendidikan     |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    | Tersedianya sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 98%       | Dinas Pendidikan     |
| 6  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Tersedianya sarana Peralatan Rumah Tangga  | 98%       | Dinas Pendidikan     |
| 7  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Tersedianya Makanan dan Minuman  | 98%       | Dinas Pendidikan     |
| 8  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  | Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah   | 97%       | Dinas Pendidikan     |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |           |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Tersedianya kebutuhan operasional kendaraan  | 95%       | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor   | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas  | 95%       | Dinas Pendidikan     |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor   | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas  | 95%       | Dinas Pendidikan     |
| 4  | Penyediaan Gedung Kantor  | Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas  | 95%       | Dinas Pendidikan     |
| 5  | Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor   |  |           |                      |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |           |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD  | 80%       | Dinas Pendidikan     |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   |   | <b>Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan</b>   |           |                      |
| 1  | Pengadaan Alat Kantor dan Alat Pendidikan   | Meningkatnya kinerja aparatur dinas pendidikan   | 60%       | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Pancoran Mas                                     |  |           |                      |
| 3  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Beji   |  |           |                      |
| 4  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya  |  |           |                      |
| 5  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Cimanggis  |  |           |                      |
| 6  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Sawangan   |  |           |                      |
| 7  | Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Limo   |  |           |                      |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>   |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |           |                      |
| 1  | Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renja 2010   | Tersedianya dokumen perencanaan hasil forum SKPD 2009 dan Renja 2010   | 5 Dokumen | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Penyusunan Roadmap Pendidikan Kota Depok  | Terususunnya buku roadmap pendidikan   | 100 Buku  | Dinas Pendidikan     |
| <b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah</b> |   | <b>Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah, Berkurangnya Angka Putus Sekolah, Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik, Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan</b> |           |                      |
| 1  | Fasilitasi BOS Reguler dan Bos Pendamping   | Terpenuhinya sebagian Dana Operasional Sekolah (Pendamping BOS Kota Depok)   |           | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik/Pengawas dan Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Kepala Sekolah | Meningkatnya kompetensi pengawas penilik dan ketua gugus SD  | 70%       | Dinas Pendidikan     |
| 3  | Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN dan UASBN)   | Meningkatnya kualitas hasil UN dan UASBN   | 15%       | Dinas Pendidikan     |
| 4  | Operasional Penerimaan siswa baru (PSB) TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri Tahun Pelajaran 2008/2009      | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PSB  | 85%       | Dinas Pendidikan     |
| 5  | Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka dan Kegiatan Lomajari   | Meningkatnya partisipasi peserta didik SMA terbuka dalam kegiatan belajar mengajar   | 50%       | Dinas Pendidikan     |
| 6  | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Olimpiade Sains Nasional SD, SMP dan SMA                       | Terpilihnya juara LKS dan peserta olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota Depok  | 2 tim     | Dinas Pendidikan     |
| 7  | Operasional Pelaksanaan Akreditasi  | Meningkatnya kinerja pengelolaan sekolah yang sudah terakreditasi  | 100%      | Dinas Pendidikan     |
| 8  | Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup/Lifeskill Siswa dan Instruktur dibidang Otomotif SMK           | Tersedianya media pembelajaran otomotif bagi siswa dan instruktur  | 45%       | Dinas Pendidikan     |
| 9  | Ekspo Teknologi Pendidikan dan Kegiatan Wawasan Wiyatamandala                                       | Tersebaranya informasi mengenai teknologi dibidang pendidikan  | 100%      | Dinas Pendidikan     |
| 10   | Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK   | Meningkatnya kualitas lulusan SMK di Kota Depok  | 100%      | Dinas Pendidikan     |
| 11   | Workshop MGMP SMP, SMA dan SMK  | Meningkatnya kualitas guru mata pelajaran di SMP, SMK dan SMA  | 40%       | Dinas Pendidikan     |

| No | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target       | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|---|--|--------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4            | 6                    |
| 12 | Pelatihan Life Skill bagi Warga Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) Paket B dan Paket C dan peserta kursus, Pelatihan Pustakawan TBM PKBM dan Penyelenggara Kursus |  |              | Dinas Pendidikan     |
| 13 | Lomba Keteladanan Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) dan Peringatan Hari Aksara Internasional, Hari Anak Nasional Tk. Kota dan Pusat                      | Meningkatnya pembinaan terhadap generasi muda  | 30%          | Dinas Pendidikan     |
| 14 | Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C  | Meningkatnya jumlah warga belajar yang lulus Paket A,B dan C serta siswa pendidikan formal                       | 75%          | Dinas Pendidikan     |
| 15 | Lomba Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Terpenuhinya alat permainan anak usia dini   | 30%          | Dinas Pendidikan     |
| 16 | Jambore PLS   | Terpilihnya lembaga non formal yang berkualitas  | 40 orang     | Dinas Pendidikan     |
| 17 | Pembinaan dan Pelatihan Tutor PAUD  | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUD   | 10%          | Dinas Pendidikan     |
| 18 | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Buku Bacaan PAUD dan Direktori PNFI   | Terpenuhinya alat permainan anak usia dini   | 30%          | Dinas Pendidikan     |
| 19 | Pelatihan Asesor Tenaga Kependidikan Nonformal dan Informal   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUD   | 10%          | Dinas Pendidikan     |
| 20 | Pengadaan Peralatan Praktik SMK   | Tersedianya media pembelajaran   | 55%          | Dinas Pendidikan     |
| 21 | Promosi Program SMK   | Terdatanya dan terjaringnya minat siswa SMP/MTs untuk melanjutkan SMK  | 55%          | Dinas Pendidikan     |
| 22 | Operasional Program Bantuan Pusat dan Provinsi  | Meningkatnya pelaksanaan program pusat dan propinsi  | 100 sekolah  | Dinas Pendidikan     |
| 23 | Pengadaan Tanah   |  |              | Dinas Pendidikan     |
| 24 | Bintek Administrasi Keuangan bagi Sekolah Penerima Bantuan  |  |              |                      |
| 25 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 lantai   | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 26 | Pembangunan MCK   | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 27 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP  | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 28 | Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SD  | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 29 | Rehabilitasi SMAN 5 Depok   | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 30 | Rehabilitasi Lahan Parkir dan Halaman SMP Negeri 10   | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 31 | Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri I dan II   | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 32 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan  | Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 33 | Pengadaan Sarana Informasi Kependidikan (buku saku KTSP SD,SMP,SMA/K) dan Pedoman penilaian   | Meningkatnya pemahaman guru tentang penyusunan KTS dan penyusunan portofolio sebagai media penilaian sertifikasi | 30%          | Dinas Pendidikan     |
| 34 | Rintisan Model Pengembangan Mata Pelajaran (B.Indo, B.Ing, Matematika, IPA dan B.Sunda) pada SMP  | Terbentuknya sekolah model pengembangan kurikulum  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 35 | Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal   |  |              | Dinas Pendidikan     |
| 36 | Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri  |  |              | Dinas Pendidikan     |
| 37 | Sosialisasi Pesan karakter Inspiratif Untuk Siswa SD, SMP dan SMA   |  |              | Dinas Pendidikan     |
|    |   |  |              |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>  | <b>Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>  |              |                      |
| 1  | Operasional Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)  | Meningkatnya kesejahteraan guru  | 70%          | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Pemberian Transportasi Guru Wiyata Bakti  | Meningkatnya kesejahteraan guru wiyata bakti dan guru bantu  | 70%          | Dinas Pendidikan     |
| 3  | Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional   |  |              | Dinas Pendidikan     |
| 4  | Bintek Penyusunan KTSP  |  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 5  | Pelatihan guru dalam penanganan Siswa berkelakuan khusus  |  | 100%         | Dinas Pendidikan     |
| 6  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang pendidikan  | Implementasi PP bagi Tenaga pendidik dan kependidikan  | 92%          | Dinas Pendidikan     |
| 7  | Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Lomba Tenaga Pendidikan/Kependidikan Berprestasi   | Meningkatkan inovasi dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan guna menciptakan kinerja                   | 70%          | Dinas Pendidikan     |
| 8  | Pengolahan UNPTK  | Terciptanya nomor NUPTK dan Data base jumlah tenaga pendidik dan kependidikan                                    | 17,000 orang | Dinas Pendidikan     |
|    |   |  |              |                      |
|    | <b>Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah</b>  | <b>Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah</b>                                 |              |                      |
| 1  | POPDA, POP SMA, O2SN, POR Usia Dini, Lomba Siswa Berprestasi dan LTUB Tk. SD, SMP dan SMA Tahun 2009  | Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan akademis maupun disiplin upacara                                      | 75%          | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Pelatihan Bahasa Sunda dan Kesenian bagi Guru SD  | Terlatihnya guru bahasa sunda dan guru seni  | 20%          | Dinas Pendidikan     |
| 3  | Peringatan HARDIKNAS  | Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya peringatan hardiknas dan haornas                                       | 20%          | Dinas Pendidikan     |
| 4  | Pembinaan Siswa SMA/SMK/MA  | Terciptanya keseragaman tentang pembinaan OSIS dan meningkatnya kepemimpinan pelajar                             | 30%          | Dinas Pendidikan     |
| 5  | Festival Seni Pelajar SMP, SMA, SMK se Kota Depok (Lomba BSP, Lomba Paduan Suara, Lomba Vokal Group dan Lomba Nasyid antar Pelajar SMA )                          | Meningkatnya minat dan apresiasi seni generasi muda pelajar  | 40%          | Dinas Pendidikan     |
|    | <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  | <b>Kesehatan<br/>Dinas Kesehatan</b>   |              |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |              |                      |
| 1  | Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor   | Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor  | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Penyedia Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya Jasa Alat Tulis Kantor  | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan  | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 5  | Penyedia Peralatan Rumah Tangga   | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga  | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 6  | Penyedia Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman   | 100%         | Dinas Kesehatan      |
| 7  | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah  | Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah                 | 100%         | Dinas Kesehatan      |

| No | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target                 | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|---|---|------------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                      | 6                    |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                        |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor  | Terpeliharanya gedung kantor  | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional  | Terpenuhiya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan STNK   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor  | Terpenuhiya pemeliharaan peralatan gedung kantor  | 50%                    | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Penyediaan Gedung Kantor  | Terpenuhiya penyediaan gedung kantor  | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>               | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |                        |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Terpenuhiya penyusunan laporan keuangan semesteran dinas kesehatan Kota Depok   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |                        |                      |
| 1  | Pembekalan bagi Petugas Farmasi di Puskesmas  | Meningkatnya kemampuan petugas farmasi di puskesmas   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Penyediaan Sistem Pengelolaan Obat  | Tersedianya sistem pengelolaan obat   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Akreditasi Jabatan Fungsional   | Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi (306 tenaga)  | 80%                    | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor   | Terpenuhiya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan  | 70%                    | Dinas Kesehatan      |
| 5  | Sertifikasi ISO 9001-2000 Puskesmas Cimanggis dan Implementasi ISO 9001-2000 di Puskesmas Sukmajaya | Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan di Kota Depok  | 70%                    | Dinas Kesehatan      |
| 6  | Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan DTP   | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat  | 75%                    | Dinas Kesehatan      |
| 7  | Pelatihan Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian  | Tersedianya dinkes dan puskesmas yang berkualitas   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 8  | Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok   | Terpenuhiya kebutuhan sarana gedung puskesmas Kota Depok  | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 9  | Pembangunan Puskesmas   | Terpenuhiya kebutuhan sarana gedung puskesmas Kota Depok  | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                                | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                        |                      |
| 1  | Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD                   | Tersusunnya rencana program dan kegiatan dinas kesehatan tahun 2010   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Peningkatan Pendapatan Daerah</b>  | <b>Meningkatnya Pendapatan Daerah</b>   |                        |                      |
| 1  | Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di Kota Depok                           | Terpenuhiya perijinan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta di Kota Depok  | 70%                    | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan</b>  | <b>Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Fasilitas Kesehatan</b>  |                        |                      |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Dasar   | Terpenuhiya biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan   | 70%                    | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas   | tersedianya Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Penyusunan Profil Kesehatan   | Meningkatnya kualitas data Kesehatan Kota Depok   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah  | Program Jamkesda dapat tersosialisasi sampai tingkat RW, petugas pengelola jamkesda memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang pengelolaan jamkesda, diperoleh dukungan dari stakeholder | 70%, 80%, 80 % peserta | Dinas Kesehatan      |
| 5  | Pengadaan Obat Askes (Kapitasi Askes PNS)   | Meningkatnya ketersediaan obat askes  | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 6  | Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes)  | Terlayannya PNS akan pelayanan kesehatan di puskesmas   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 7  | Pendampingan Jamkesmas  | Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan rujukan di sarana pelayanan kesehatan   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 8  | Pengadaan Cetakan dan Bahan Pakai Habis Penunjang Kegiatan Puskesmas                                | Meningkatnya pelayanan di puskesmas   | 80%                    | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga</b>   | <b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga</b>  |                        |                      |
| 1  | Pelatihan Petugas Program KIA   |   |                        | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja   |   |                        | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Sertifikasi Posbindu  |   |                        | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>  | <b>Meningkatnya Status Gizi Masyarakat</b>  |                        |                      |
| 1  | Penanggulangan Gizi Masyarakat  | Meningkatnya status gizi balita dan keluarga  | 30%                    | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>  | <b>Menurunnya Angka Kesakitan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>   |                        |                      |
| 1  | Penanggulangan Penyakit yang Dapat di Cegah dengan Imunisasi (PD3I)                                 | Meningkatnya jumlah bayi, ballita anak sekolah, PUS, ibu hamil, serta calon jemaah haji yang terimunisasi   | 98%                    | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Pengamatan Penyakit Menular   | Terdeteksinya Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Antrax, HIV/AIDS, AFP)  | 98%                    | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Penanggulangan Filarisis  | Tercapainya eliminasi Filariasis di Kota Depok  | 95%                    | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Penanggulangan Penyakit Menular   | Menurunnya jumlah Penyakit Menular Lainnya (TBC,Kusta, ISPA, Anthrax, HIV/AIDS, AFP)  | 90%                    | Dinas Kesehatan      |
| 5  | Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB  | Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular  | 90%                    | Dinas Kesehatan      |
| 6  | Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak  | Meningkatnya jumlah masyarakat Depok yang menderita kebutaan karena katarak dapat melihat kembali   | 100%                   | Dinas Kesehatan      |
| 7  | Pelaksanaan P3K   | Terlayannya kegiatan masyarakat dan Pemda kota Depok yang memenuhi P3K  |                        | Dinas Kesehatan      |
| 8  | Penanggulangan Penyakit Tidak Menular   | Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular  | 60%                    | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar</b>                                      | <b>Meningkatnya Cakupan Kesehatan Lingkungan</b>  |                        |                      |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target                         | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|--|--------------------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                              | 6                    |
| 1  | Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman   | Meningkatnya kualitas air bersih dan pencegahan pencemaran terhadap air bersih serta adanya pengendalian vektor di TPA, tercapainya pendataan sarana sanitasi dasar maupun promosi klinik sanitasi | 70 % memenuhi syarat kesehatan | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan</b>   | <b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih &amp; Sehat</b>  |                                |                      |
| 1  | Promosi PHBS   | Meningkatnya pengetahuann masyarakat tentang kesehatan   | 15%                            | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta tentang kesehatan  | 15%                            | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Optimalisasi Saka Bhakti Husada  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | 5%                             | Dinas Kesehatan      |
| 4  | Optimalisasi Kota Siaga  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | 10%                            | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>   | <b>Ketahanan Pangan<br/>Dinas Kesehatan</b>  |                                |                      |
|    | <b>Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar</b>                                 | <b>Meningkatnya Cakupan Kesehatan Lingkungan</b>   |                                |                      |
| 1  | Pengawasan dan Penyuluhan Hygiene & Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan | Diperolehnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di TTU  | 75 % memenuhi syarat kesehatan | Dinas Kesehatan      |
| 2  | Sertifikasi IRTP dan pengawasan sarana farmasi dan sarana makmin                               | Meningkatnya kualitas IRTP, DAM Catering, Apotik dan Toko Obat   | 100%                           | Dinas Kesehatan      |
| 3  | Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya                   | Meningkatnya keamanan makanan jajanan anak sekolah di Kota Depok   | 100%                           | Dinas Kesehatan      |
|    | <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>   | <b>Kesehatan<br/>Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)</b>  |                                |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |                                |                      |
| 1  | Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok   | 75%                            | RSUD                 |
| 2  | Penyedia Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor  | Terciptanya lingkungan RSUD yang bersih dan aman   | 60%                            | RSUD                 |
| 3  | Penyedia Alat Tulis Kantor   | Meningkatnya administrasi dan manajemen RSUD Kota Depok  | 90%                            | RSUD                 |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok   | 75%                            | RSUD                 |
| 5  | Penyedia Peralatan Rumah Tangga  | Terpenuhinya pelayanan kesehatan RSUD  | 75%                            | RSUD                 |
| 6  | Penyedia Makanan dan Minuman   | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok   | 75%                            | RSUD                 |
| 7  | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSUD)                                    | Difasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi RSUD   | 80%                            | RSUD                 |
| 8  | Penyediaan Sarana Informasi  |  |                                | RSUD                 |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                       | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                                |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor  | Terpeliharanya pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD Kota Depok  | 100%                           | RSUD                 |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional   | Tercapainya kendaraan dinas/operasional RSUD yang siap pakai   | 80%                            | RSUD                 |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor   | Terciptanya kondisi perlengkapan gedung kantor RSUD Kota Depok   | 90%                            | RSUD                 |
|    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  |                                |                      |
| 1  | Pengadaan Pakaian Kerja dan alat pelindung diri  | Terpenuhinya pakaian kerja lapangan RSUD   | 80%                            | RSUD                 |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>          | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |                                |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD  | Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD  | 100%                           | RSUD                 |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |                                |                      |
| 1  | Pengadaan Alat Kesehatan   | Terpenuhinya mutu pelayanan kesehatan  | 60%                            | RSUD                 |
| 2  | Pengadaan Limbah dan Air Bersih  | Sampah (medik dan non medik) di RSUD di kelola dengan baik   | 80%                            | RSUD                 |
| 3  | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD  | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD  | 100%                           | RSUD                 |
| 4  | Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok   | Terpenuhinya Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok  | 80%                            | RSUD                 |
| 5  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi  | Prosentase sarana gizi idan sarana kebersihan RSUD Kota Depok  | 60%                            | RSUD                 |
| 6  | Pengelolaan Tenaga Medis, Keperawatan, penunjang Medis Serta non Medis                         | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD  | 60%                            | RSUD                 |
| 7  | Pembangunan Pagar dan Gapura RSUD Kota Depok   | Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit   | 70%                            | RSUD                 |
| 8  | Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja  | Meningkatnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja RSUD Depok  | 75%                            | RSUD                 |
| 9  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan linen RSUD Kota Depok                               | Meningkatnya pelayanan laundry RSUD kota Depok   | 80%                            | RSUD                 |
| 10 | Persiapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu RSUD  | Meningkatnya mutu pelayanan keehatan di RSUD Kota Depok  | 75%                            | RSUD                 |
| 11 | Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)   | Terpenuhinya Sistem Informasi Rumah Sakit  | 75%                            | RSUD                 |
|    | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan                                       |  |                                |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional</b>   | <b>Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah</b>  |                                |                      |
| 1  | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis                           | Tersedianya tenaga RSUD yang berkualitas   | 40%                            | RSUD                 |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                           |  |                                |                      |
| 1  | Forum SKPD RSUD  |  |                                |                      |
|    | <b>Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan</b>                                   | <b>Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Fasilitas Kesehatan</b>   |                                |                      |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target        | ORGANISASI PELAKSANA   |
|----|--|---|---------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4             | 6                      |
| 1  | Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan  | Terpenuhinya jasa pelayanan   | 75%           | RSUD                   |
| 2  | Pendampingan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin/Askes/SKTM                  | Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan Rujukan di RSUD Kota Depok            | 75%           | RSUD                   |
| 3  | Pengadaan Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimia dan Perlengkapan Farmasi               | Tersedianya Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimia Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok         | 100%          | RSUD                   |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan</b>   | <b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih &amp; Sehat</b>                     |               |                        |
| 1  | Promosi Layanan Kesehatan RSUD   | Tersosialisasinya masyarakat akan pelayanan kesehatan di RSUD   | 70%           | RSUD                   |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Pekerjaan Umum</b><br><b>Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</b>                                    |               |                        |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |               |                        |
| 1  | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                    | Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Penyedia Jasa kebersihan dan keamanan kantor   | Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Penyedia Alat Tulis Kantor   | Tertibnya administrasi kantor/dinas   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan  | Terpenuhinya kelancaran tugas kantor  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 5  | Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                           | Terpenuhinya kelancaran tugas kantor  | 85%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 6  | Penyedia Peralatan Rumah Tangga  | Terpenuhinya pelayanan dinas  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 7  | Penyedia Makanan dan Minuman   | Terpenuhinya pelayanan dinas  | 85%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 8  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  | Terpenuhinya tugas dan kelancaran kantor  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 9  | Penyediaan Sarana Informasi  | Terpenuhinya kebutuhan informasi dinas  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                 | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |               |                        |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor   | Terpeliharanya gedung kantor/dinas  | 90%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor  | Terpeliharanya kendaraan dinas  | 95%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor                                    | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor   | 95%           | Dinas Bina Marga & SDA |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>    | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                                       |               |                        |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan semester I dan II                                | 85%           | Dinas Bina Marga & SDA |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |               |                        |
| 1  | Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Lapangan   | Meningkatnya kinerja dinas  | 40 orang      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Pengadaan Peralatan Komputer   | Meningkatnya kinerja dinas  | 90%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Pengadaan Perlengkapan Kantor  | Meningkatnya kinerja dinas  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Pengadaan Buku Perpustakaan  |   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah</b>  | <b>Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah</b>  |               |                        |
| 1  | Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan Bidang SDA        | Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan/saluran   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 1  | Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan Bidang Bina Marga | Terpenuhinya tanah untuk pembangunan saluran irigasi  | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
|    |  |   |               |                        |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                     | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |               |                        |
| 1  | Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja SKPD   | Peningkatan kualitas perencanaan  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Perencanaan Teknis Jalan Tembus Terminal Jatijajar - Jagorawi (Tahap II)                 | Tercapainya kualitas hasil perencanaan yang diinginkan  | 95%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Jalan Sawangan Raya                         | Tersedianya hasil perencanaan   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Masterplan Drainase Kota Depok   | Tersedianya pedoman penataan drainase di kota Depok   | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Pemetaan Kali Krukut   | Tersedianya peta kali krukut  | 80%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 5  | Pemetaan Akuifer dan Air Tanah   | Tersedianya data potensi dan sebaran akuifer dan air tanah di Kec. Pancoran Mas, Kec Beji dan Kec. Limo | 50%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 6  | Leger Jalan  | Tersedianya data jalan kota   | 30%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 7  | Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Air   | Tersedianya informasi awal untuk perencanaan kegiatan   | 50%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 8  | Standarisasi Satuan Pekerjaan bidang ke-PU-an  | Tersedianya standar satuan pekerjaan bidang ke PU-an  | 95%           | Dinas Bina Marga & SDA |
| 9  | Survey Perencanaan Bidang Jalan dan Jembatan   | Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan jembatan  | 1 set dokumen | Dinas Bina Marga & SDA |
| 10 | Survey Perencanaan Bidang Jalan Lingkungan   | Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan jembatan  | 1 set dokumen | Dinas Bina Marga & SDA |
| 11 | Kajian Kelayakan Jembatan Panus Lama   | Tersedianya hasil studi kelayakan jembatan Panus Lama   | 100%          | Dinas Bina Marga & SDA |
| 12 | Pembinaan Kelompok P3A Mitra Cai   | Terbinanya Kelompok P3A Mitra Cai   | 82,50%        | Dinas Bina Marga & SDA |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target      | ORGANISASI PELAKSANA   |
|----|--|--|-------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4           | 6                      |
| 13 | Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air  |  | 100%        | Dinas Bina Marga & SDA |
| 14 | Optimalisasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Cisadane Empang Cabang Tengah, Cabang Barat, Cabang Timur | Tersedianya data jaringan irigasi yang optimal                                 | 80%         | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi</b>         | <b>Meningkatnya Kualitas Jaringan Transportasi</b>                             |             |                        |
| 1  | Pengelolaan PHT (Pekerja Harian Tetap)   | Meningkatnya kinerja dinas   | 70%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Pengadaan Alat Laboratorium UPTD Workshop  | Meningkatnya kinerja dinas   | 75%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Perawatan Kendaraan Bermotor   | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat berat darat dan operasional UPTD | 80%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Pengadaan Alat-alat Berat  | Meningkatnya kinerja dinas   | 90%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 5  | Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor  | Meningkatnya kinerja dinas   | 100%        | Dinas Bina Marga & SDA |
| 6  | Pemeliharaan Jalan   | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 7  | Peningkatan Jalan  | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 8  | Pembangunan Jalan  | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 9  | Rehabilitasi Jalan   | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 10 | Prasarana Jalan  | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 11 | Pembangunan Jembatan   | Tersedianya struktur jalan yang baik   | 85%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 12 | Pengelolaan UPTD Workshop  |  |             | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Pengendalian Banjir</b>   | <b>Menurunnya kawasan banjir</b>   |             |                        |
| 1  | Pengelola Satgas   | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat                                       | 60%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan/Penanggulangan Saluran Irigasi                                   | Memperlancar aliran air  | 40,55%      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)  | Memperlancar aliran air  | 25%         | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Pengendalian Penataan Sempadan Air   | Terpeliharanya dan tertatanya sempadan saluran irigasi                         | 9,86%       | Dinas Bina Marga & SDA |
| 5  | Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan  | Lancarnya operasional bidang sda dan terpeliharanya jaringan irigasi di 6 Kec  | 40,25%      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 6  | Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi  | Memperlancar distribusi air  | 11,16%      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 7  | Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air  | Tersedianya cadangan air bawah tanah dan area pariwisata                       | 19,5%       | Dinas Bina Marga & SDA |
| 8  | Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air   | Memperlancar aliran air dan mengurangi daerah genangan/banjir                  | 50,45%      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 9  | Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase   | Tertatanya saluran drainase Kota dan memperlancar aliran air                   | 55%         | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Penataan Lingkungan Pemukiman</b>   | <b>Menurunnya Pemukiman Kumuh</b>  |             |                        |
| 1  | Pemeliharaan jalan lingkungan  | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 1017680300  | Dinas Bina Marga & SDA |
| 2  | Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong   | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 9,6 km      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 3  | Betonisasi Jalan Lingkungan  | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 9,6 km      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 4  | Rehabilitasi Jalan Lingkungan  | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 6,6 km      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 5  | Pembangunan Jalan Lingkungan   | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 6,6 km      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 6  | Peningkatan Jalan Lingkungan   | Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman                             | 9,6 km      | Dinas Bina Marga & SDA |
| 7  | Penataan Kawasan Kumuh   | Tertatanya Kawasan Kumuh   | 3 kelurahan | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>   |  |             |                        |
| 1  | Sosialisasi dan Pembuatan Contoh Sumur Resapan   | Terbinanya masyarakat akan pentingnya sumur resapan                            | 12 lokasi   | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Urusan : SKPD :</b>   | <b>Energi dan Sumberdaya Mineral<br/>Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</b>  |             |                        |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>   | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>  |             |                        |
| 1  | Monitoring dan Pengendalian Air Bawah Tanah  | Tersedianya informasi tentang pemanfaatan air bawah tanah                      | 50%         | Dinas Bina Marga & SDA |
|    | <b>Urusan : SKPD :</b>   | <b>Pekerjaan Umum<br/>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</b>                      |             |                        |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         |             |                        |
| 1  | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Terperluhinya komunikasi dan penerangan dinas                                  | 100%        | DKP                    |
| 2  | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor   | Terwujudnya Kelancaran Kerja   | 100%        | DKP                    |
| 3  | Penyediaan alat tulis kantor   | Terperluhinya kelancaran administrasi perkantoran                              | 100%        | DKP                    |
| 4  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Terperluhinya kelancaran administrasi perkantoran                              | 100%        | DKP                    |
| 5  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Terperluhinya kelancaran penerangan kantor                                     | 100%        | DKP                    |
| 6  | Penyediaan peralatan rumah tangga  | Terperluhinya kebutuhan peralatan rumah tangga                                 | 100%        | DKP                    |

| No | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target                 | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|---|--|------------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                      | 6                    |
| 7  | Penyediaan makanan dan minuman  | Terwujudnya kelancaran rapat-rapat dinas   | 20%                    | DKP                  |
| 8  | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi  | Terpenuhinya kelancaran tugas dinas  | 70%                    | DKP                  |
| 9  | Penyediaan sarana informasi   | Terpenuhinya informasi pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup   | 60%                    | DKP                  |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                        |                      |
| 1  | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Bermotor   | Terwujudnya kelancaran kerja   | 100%                   | DKP                  |
| 2  | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                 | Terwujudnya kelancaran kerja   | 100%                   | DKP                  |
| 3  | Penyediaan Gedung Kantor  | Terpenuhinya prasarana kerja   | 20%                    | DKP                  |
|    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  |                        |                      |
| 1  | Pengadaan pakaian kerja lapangan  | Terwujudnya identitas, keserasian dan keseragaman pegawai DKLH   | 80%                    | DKP                  |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |                        |                      |
| 1  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | Tersedianya laporan keuangan semesteran  | 70%                    | DKP                  |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |                        |                      |
| 1  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terwujudnya kelancaran kerja   | 40%                    | DKP                  |
| 2  | Pengadaan suku cadang kendaraan operasional kebersihan                                | Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional kebersihan  | 80%                    | DKP                  |
| 3  | Pengadaan peralatan kebersihan  | Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya kebutuhan peralatan  | 70%                    | DKP                  |
| 4  | Pengadaan kendaraan operasional kebersihan  | Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional kebersihan  | 50%                    | DKP                  |
| 5  | Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan   | Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional                                  | 80%                    | DKP                  |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |                        |                      |
| 1  | Pelaksanaan Forum SKPD & Penyusunan Renja   | Tersampainya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan   | 60%                    | DKP                  |
| 2  | Renstra   | Tersusunnya Renstra  | 1 Dokumen              | DKP                  |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA</b>                           | <b>Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan Sampah di TPA</b>  |                        |                      |
| 1  | Pengelolaan TPA   | Terkelolanya TPA sesuai SOP  | 34%                    | DKP                  |
| 2  | Layanan Pengangkutan Sampah   | Terangkutnya sampah di kota Depok  | 47%                    | DKP                  |
| 3  | Sosialisasi Pengelolaan Sampah di TPA   | Terbinanya forum masyarakat di sekitar TPA   | 3 forum                | DKP                  |
| 4  | Pembangunan Sarana Pencucian Kendaraan di TPA (Tahap 2)                               | Terwujudnya kelancaran pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan   | 40%                    | DKP                  |
| 5  | Pembuatan pagar di TPA Cipayang   | Terjaminnya kelancaran operasional pengangkutan dan pembuangan sampah di TPA   | 40%                    | DKP                  |
| 6  | Pembangunan drainase & jalan operasi lingk TPA (Tahap 2)                              | Tertatanya sistem drainase dan jalan lingk di TPA  | 75%                    | DKP                  |
| 7  | Pembuatan kolam pembuangan sampah di TPA  | Terkelolanya TPA sesuai dengan SOP   | 40%                    | DKP                  |
| 8  | Pelaksanaan Pengolahan sampah di 5 UPS  | Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah   | 30m3/ups/hari          |                      |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS</b>                           | <b>Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Sampah</b>  |                        |                      |
| 1  | Pelaksanaan Pengolahan sampah di 22 UPS   | Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah   | 30m3/ups/hari          | DKP                  |
| 2  | Sosialisasi & pelatihan pengelolaan sampah  | Memudahkan proses pengolahan sampah I lokasi UPS   | 6 RW di 6 Kec          | DKP                  |
| 3  | Komposting Rumah Tangga   | Terwujudnya rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah   | 6 RW di 6 Kec          | DKP                  |
| 4  | Penunjang Program Adipura   | Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup  | 70%                    | DKP                  |
| 5  | Pengadaan Unit Pengolahan Sampah  | Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah   | 30m3/ups/hari          | DKP                  |
| 6  | Pengadaan peralatan pengolahan sampah   | Terpenuhinya kebutuhan mesin pengelolaan sampah  | 30%                    | DKP                  |
| 7  | Kajian Perda Persampahan  | Tersusunnya Perda Persampahan di Kota Depok  | 100%                   | DKP                  |
| 8  | Sosialisasi Unit Pengelolaan Sampah   | Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu dan memudahkan proses pengolahan sampah di lokasi UPS | 300 orang dan 10 titik | DKP                  |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>  |                        |                      |
| 1  | Pemeliharaan IPLT   | Terpeliharanya IPLT Kalimuya   | 40%                    | DKP                  |
| 2  | Pengelolaan IPLT  | Terkelolanya IPLT Kalimuya   | 40%                    | DKP                  |
| 3  | Pengadaan sarana dan prasarana IPLT   | Terkelolanya IPLT Kalimuya   | 40%                    | DKP                  |
|    | <b>Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang &amp; Bangunan</b>                | <b>Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau</b>   |                        |                      |
| 1  | Pembangunan taman separator Margonda segmen I   | Tertatanya taman Kota  | 75%                    | DKP                  |
| 2  | Pemeliharaan Taman Kota Depok   | Tertatanya taman Kota  | 75%                    | DKP                  |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                              | <b>Tersedianya Data dan Informasi Keuangan yang Akurat</b>   |                        |                      |
| 1  | Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan                                     | Terlaksananya monitoring dan peningkatan retribusi   | 70%                    | DKP                  |
|    | <b>Penyelenggaraan Jaminan Sosial</b>   | <b>Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   |                        |                      |
| 1  | Operasional pelayanan TPU   | Terkelolanya TPU   | 25%                    | DKP                  |
| 2  | Pembuatan Bangunan Pos Jaga TPU 3   | Terkelolanya TPU   | 25%                    | DKP                  |
| 3  | Pembangunan jalan masuk ke TPU 2  | Terkelolanya TPU   | 25%                    | DKP                  |
| 4  | Penataan TPU  | Terkelolanya TPU   |                        | DKP                  |
| 5  | Pemasangan Lampu di TPU Kalimulya I, II, III  | Terkelolanya TPU   | 25%                    | DKP                  |
|    | Urusan :<br>SKPD :  | Perumahan<br>Dinas Tata Ruang dan Permukiman   |                        |                      |
|    | Penataan Lingkungan Pemukiman   | Menurunnya Pemukiman Kumuh   |                        |                      |

| No  | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target           | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                | 6                    |
| 1   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Tersedianya bangunan rumah dan sarana masyarakat  | 10 rumah di 2 RW | Dinas Tarkim         |
| 2   | Pengelolaan Rusunawa   | Meningkatnya pelayanan pengguna Rusunawa  | 95%              | Dinas Tarkim         |
| <b>Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih</b>                                       |  |   |                  |                      |
| 1   | Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok  | Terpeliharanya jaringan pelayanan air bersih kepada masyarakat  | 10%              | Dinas Tarkim         |
| 2   | Penunjang Sarana dan Prasarana Air Bersih                                | Meningkatnya layanan air bersih kepada masyarakat   | 10%              | Dinas Tarkim         |
| <b>Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan (DAK)</b>              |  |   |                  |                      |
| Urusan :<br>SKPD :  |  | Penataan Ruang<br>Dinas Tata Ruang dan Permukiman   |                  |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |                  |                      |
| 1   | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  | Dinas Tarkim         |
| 2   | Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                             | Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  |                  | Dinas Tarkim         |
| 3   | Penyedia Alat Tulis Kantor   | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor  |                  | Dinas Tarkim         |
| 4   | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan   |                  | Dinas Tarkim         |
| 5   | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                  | Dinas Tarkim         |
| 6   | Penyedia Peralatan Rumah Tangga  | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga   |                  | Dinas Tarkim         |
| 7   | Penyedia Makanan dan Minuman   | Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman   |                  | Dinas Tarkim         |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah                     | Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah   |                  | Dinas Tarkim         |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi  | Terpenuhinya Penyediaan Sarana Informasi  |                  | Dinas Tarkim         |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                  |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                 | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor   |                  | Dinas Tarkim         |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor                            | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor  |                  | Dinas Tarkim         |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  |                  | Dinas Tarkim         |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |                  |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                                 | Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran  |                  | Dinas Tarkim         |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |                  |                      |
| 1   | Belanja Alat Kantor  | Meningkatnya efisiensi kerja  | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 2   | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan                | Terpenuhinya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Tahun 2009  | 3 Dokumen        | Dinas Tarkim         |
| 3   | Sosialisasi PERDA Bangunan   | Terjaringnya aspirasi masyarakat  |                  | Dinas Tarkim         |
| 4   | Gebyar Pelayanan IMB (Tindak Lanjut Pendataan Bangunan TA 2007)          | Terpenuhinya retribusi IMB dan IPR Kota Depok   |                  | Dinas Tarkim         |
| 5   | Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian IUJK                            |   |                  | Dinas Tarkim         |
| <b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah</b>                                       |  | <b>Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah</b>  |                  |                      |
| 1   | Pembangunan Gedung Dibale Tahap VI                                       | Tersedianya tempat kerja yang representatif bagi pegawai pemda kota Depok   |                  | Dinas Tarkim         |
| 2   | Pembangunan Gedung Pramuka   | Terlaksananya pembangunan struktur gedung Pramuka Kota Depok  | 45%              | Dinas Tarkim         |
| 3   | Pembangunan Gedung Kesenian  | Terlaksananya pembangunan atap dan arsitektur gedung kesenian Kota Depok  | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 4   | Rehabilitasi Kantor Kelurahan  | Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahan   | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 5   | Rehabilitasi Kantor Kecamatan  | Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kecamatan   | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 6   | Pembangunan Sarana Pendukung Stadion Merpati Kota Depok Tahap II         | Tersedianya konstruksi tribun dan genset stadion merpati  | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 7   | Pekerjaan Pengendalian Anti Rayap pada Gedung Pemerintahan Kota Depok    | Terwujudnya sertifikat layak huni bangunan pemerintah Kota Depok  | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 8   | Pembangunan Tambah Ruang Gedung Kantor Kelurahan                         | Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahan   |                  | Dinas Tarkim         |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                  |                      |
| 1   | Pelaksanaan Forum SKPD   | Terjaringnya Aspirasi Masyarakat  |                  | Dinas Tarkim         |
| 2   | Penyusunan Revisi Renstra Distarkim                                      | Terpenuhinya Dokumen rencana strategis  | 1 Dokumen        | Dinas Tarkim         |
| <b>Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang &amp; Bangunan</b>                |  | <b>Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau</b>  |                  |                      |
| 1   | Pengawasan dan Pengendalian Bangunan                                     | Berkurangnya bangunan yang melanggar IMB  | 1800 Bangunan    | Dinas Tarkim         |
| 2   | Verifikasi dan Penertiban Perijinan Bangunan                             | Tersedianya data verifikasi dan penertiban bangunan   | 360 bangunan     | Dinas Tarkim         |
| 3   | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 2 Kawasan         | Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Arif Rahman Hakim, Nusantara dan Dewi Sartika | 1 dokumen        | Dinas Tarkim         |
| 4   | Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat di JPO Margo-Detos (Running Text)     | Tertatanya penempatan reklame sesuai estetika lingkungan  | 75%              | Dinas Tarkim         |
| 5   | Identifikasi Potensi, Masalah, dan Penjarangan Issue RTRW (2010-2030)    | Tersedianya dokumen Identifikasi Potensi, Masalah, dan Penjarangan Issue RTRW (2010-2030)                             | 1 dokumen        | Dinas Tarkim         |
| 6   | Penyusunan Naskah Akademis RTRW Kota Depok (2010-2030)                   | Tersedianya peta perijinan berbasis persil tata ruang   | 1 dokumen        | Dinas Tarkim         |
| 7   | Penyusunan Master Plan Penataan Tower Bersama Kota Depok                 | Tersedianya dokumen Penataan Tower Bersama Kota Depok   | 1 dokumen        | Dinas Tarkim         |
| 8   | Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok | Terwujudnya dokumen DED Kantor Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok   | 75%              | Dinas Tarkim         |
| Urusan :<br>SKPD :  |  | Perencanaan Pembangunan<br>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |                  |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |                  |                      |

| No | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target             | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|---|---|--------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                  | 6                    |
| 1  | Penyedia jasa kebersihan kantor   | Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor   | 100%               | Bappeda              |
| 2  | Penyedia alat tulis kantor  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor  | 100%               | Bappeda              |
| 3  | Penyedia barang cetak dan penggandaan   | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan   | 100%               | Bappeda              |
| 4  | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Terpenuhinya kebutuhanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100%               | Bappeda              |
| 5  | Penyedia peralatan rumah tangga   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga   | 100%               | Bappeda              |
| 6  | Penyedia makanan & minuman  | Penyedia makanan & minuman  | 100%               | Bappeda              |
| 7  | Penyedia Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                         | Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 100%               | Bappeda              |
| 8  | Penyedia sarana informasi   | Terpenuhinya kebutuhan sarana informasi   | 100%               | Bappeda              |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                    |                      |
| 1  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional                              | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional  | 100%               | Bappeda              |
| 2  | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor                               | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor   | 100%               | Bappeda              |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |                    |                      |
| 1  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bappeda                                      |   |                    | Bappeda              |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |                    |                      |
| 1  | Bintek Perencana  |   |                    | Bappeda              |
| 2  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 100%               | Bappeda              |
| 3  | Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2009                                       | Terukurnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kondisi pelayanan publik di Kota Depok yang dijadikan sebagai bahan perencanaan peningkatan pelayanan publik di Kota Depok | 80%                | Bappeda              |
| 4  | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC   |   |                    | Bappeda              |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                    |                      |
| 1  | Penyusunan Perda Perencanaan Partisipatif   | Tersedianya Perda Perencanaan Partisipatif  | 200 buku           | Bappeda              |
| 2  | Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda                          | Tersedianya Rancangan kegiatan Bappeda TA 2010  | 80%                | Bappeda              |
| 3  | Penyelenggaraan Musrenbang 2009   | Tersusunnya kegiatan pembangunan Tahun 2010   | 1 Dok              | Bappeda              |
| 4  | Survey dan Pengendalian Program SKPD  | Terkendalinya kegiatan-kegiatan SKPD  | 80%                | Bappeda              |
| 5  | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010                                 | Tersedianya dokumen RKPDP Tahun 2010  | 60 buku%           | Bappeda              |
| 6  | Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya    | Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan bidang Sosial dan Budaya   | 80%                | Bappeda              |
| 7  | Penyusunan Data Profil Daerah   | Tersusunnya data profil daerah  |                    | Bappeda              |
| 8  | Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan                         | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan   | 70%                | Bappeda              |
| 9  | Penyediaan Info Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok                                | Tersistematisnya prioritas penataan Taman Kota Depok  | 80%                | Bappeda              |
| 10 | Penyusunan Model Good Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah                     | Meningkatnya kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka good governance   | 70%                | Bappeda              |
| 11 | Kajian Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kota Depok                               | Tersedianya informasi dan data perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kota Depok  | 80%                | Bappeda              |
| 12 | Pembuatan Sistem Informasi manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan   | 50%                | Bappeda              |
| 13 | Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan                                    | Terwujudnya penanggulangan kemiskinan Kota Depok  | 80%                | Bappeda              |
| 14 | Survey dan Analisa Model Perencanaan Pembangunan Perekonomian Tahun 2009              | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perekonomian  | 1 dok              | Bappeda              |
| 15 | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Depok                 |   |                    | Bappeda              |
| 16 | Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi          | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi   | 80%                | Bappeda              |
| 17 | Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur    | Tersedianya data kegiatan bidang infrastruktur  | 50%                | Bappeda              |
| 18 | Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok   | Tersedianya dokumen PDRB dan IHK Kota Depok   | 2 dok              | Bappeda              |
| 19 | Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah               | Terwujudnya perencanaan pembangunan infrastruktur   | 75%                |                      |
|    | <b>Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang &amp; Bangunan</b>                | <b>Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau</b>  |                    |                      |
| 1  | Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah                                      | Terkendalinya penataan ruang kota yang ideal  | 40%                | Bappeda              |
| 2  | Pengembangan IDSD Kota Depok (Lanjutan)   | Terlaksananya data tematik dan peralatan komputer IDSD  | 1 set dan jaringan | Bappeda              |
|    | <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  | <b>Penanaman Modal<br/>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   |                    |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                    |                      |
| 1  | Fasilitasi Tim Investasi Infrastruktur Kota Depok                                     | Terjalannya koordinasi dalam percepatan investasi infrastruktur daerah  | 80%                | Bappeda              |
| 2  | Promosi Potensi Investasi Daerah  | Terciptanya peluang investasi dan penanaman modal   | 80%                | Bappeda              |
| 3  | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah  |   |                    | Bappeda              |
|    | <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br/>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |                    |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                    |                      |
| 1  | Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga  | Tersusunnya masukan kebijakan pembangunan   | 1 Dok              | Bappeda              |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target        | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|--|---------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4             | 6                    |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Statistik</b><br><b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>              |               |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                             | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                |               |                      |
| 1  | Penyusunan Depok dan Kecamatan dalam Angka Tahun 2009  | Tersedianya data-data statistik umum Kota Depok                              | 80%           | Bappeda              |
| 2  | Penyusunan Buku IPM Kota Depok Tahun 2009  | Tersedianya data dan informasi IPM Kota Depok Tahun 2009                     | 100%          | Bappeda              |
| 3  | Penyusunan Buku INKESRA Kota Depok Tahun 2009  | Tersedianya data dan informasi INKESRA Kota Depok Tahun 2009                 | 100%          | Bappeda              |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Perhubungan</b><br><b>Dinas Perhubungan</b>                               |               |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       |               |                      |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Meningkatnya kinerja aparatur  | 10%           | Dishub               |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor   | Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Keamanan Kantor                         | 10%           | Dishub               |
| 3  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan 100%Alat Tulis Kantor                                 | 100%          | Dishub               |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 100%          | Dishub               |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor                                | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100%          | Dishub               |
| 6  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga                                | 100%          | Dishub               |
| 7  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Terpenuhinya Makanan dan Minuman   | 100%          | Dishub               |
| 8  | Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                 | Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas                                      | 100%          | Dishub               |
| 9  | Penyediaan Sarana Informasi  | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                            |               |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Keamanan Kantor                         | 100%          | Dishub               |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor  | Meningkatnya kinerja aparatur  | 100%          | Dishub               |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung   | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
| 4  | Penyediaan gedung Kantor   | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
|    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  |               |                      |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya  | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            |               |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran                            | 12 buku%      | Dishub               |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                     |               |                      |
| 1  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
| 2  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)                             | Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor                       | 12 bulan      | Dishub               |
| 3  | Penyediaan Barang Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor   | Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor                       | 12 bulan      | Dishub               |
| 4  | Penyediaan informasi dan Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan                                       | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |
| 5  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Emplasemen Terminal                                  | Terdapatnya pelayanan jasa terminal  | 12 bulan      | Dishub               |
|    | <b>Peningkatan Jangkauan Pelayanan</b>   | <b>Terwujudnya Perluasan Jangkauan Pelayanan</b>                             |               |                      |
| 1  | Penambahan Jam Pelayanan Perijinan dan PKB   | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perijinan trayek dan PKB      | 15%           | Dishub               |
| 2  | Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lalu Lintas di Jalan   |  |               | Dishub               |
| 3  | Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Kendaraan di sekitar Terminal                                |  |               | Dishub               |
|    | <b>Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional</b>     | <b>Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah</b>                  |               | Dishub               |
| 1  | Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional   | Terwujudnya peningkatan karier jabatan fungsional                            | 5%            | Dishub               |
| 2  | Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ  | Meningkatnya pengetahuan apatur di bidang LLAJ                               | 100%          | Dishub               |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                             | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                |               |                      |
| 1  | Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Penyelenggaraan Forum SKPD)             | Tersusunnya usulan program /kegiatan DLLAJ 2009                              | 1 Dok, 5 buku | Dishub               |
| 2  | Lelang Investasi dalam Optimasi Terminal Margonda Kota Depok                                     | Meningkatnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan                  | 5%            | Dishub               |
| 3  | Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum   | Tersedianya informasi PJU Kota Depok   | 50%           | Dishub               |
|    | <b>Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Jaringan Transportasi</b>                           |               |                      |
| 1  | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum   | Meningkatnya sarana dan prasarana PJU  | 10%           | Dishub               |
| 2  | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum   | Terpeliharanya penerangan jalan umum   | 20%           | Dishub               |
| 3  | Pengendalian dan Pengawasan Rekening PJU   | Meningkatnya efisiensi pembayaran rekening PJU                               | 5%            | Dishub               |
| 4  | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, RPPJ dan Papan Nama Jalan                            | Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas                           | 5%            | Dishub               |
| 5  | Pengcetakan Marka Jalan, Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan                                     | Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan bagi pengguna jalan      | 5%            | Dishub               |
| 6  | Pengadaan dan Pemasangan Warnig Light  | Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna jalan                 | 10%           | Dishub               |
| 7  | Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross dan Pita Penggadu   | Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna jalan                 | 10%           | Dishub               |
| 8  | Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Elektronik (Running Text Bar)                           | Meningkatnya informasi untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas           | 10%           | Dishub               |
| 9  | Pembangunan Gedung UPTD PJU  | Meningkatnya kinerja aparatur  | 5%            | Dishub               |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target  | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 6                    |
| <b>Pengembangan Manajemen Transportasi</b>  |   | <b>Menurunnya Titik Kemacetan</b>   |   |                      |
| 1   | Operasional Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan                      | Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan                   | 5%  | Dishub               |
| 2   | Pengadaan dan Pemasangan Separator Portable dan Pagar                             | Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan                   | 5%  | Dishub               |
| 3   | Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum  | Terciptanya ketertiban angkutan umum  | 10%   | Dishub               |
| 4   | Pemeliharaan Rambu dan RPPJ dan Traffic Light                                     | Meningkatnya usia ekonomis Rambu dan RPPJ   | 5%  | Dishub               |
| 5   | Evaluasi Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum  | Diketahuinya kinerja tingkat pelayanan angkutan umum                              | 20%   | Dishub               |
| 6   | Pemeliharaan Separator/Median Jalan   | Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas                                | 5%  | Dishub               |
| 7   | Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan   | Terdapatnya data yang representatif untuk perencanaan transportasi                | 100%  | Dishub               |
| 8   | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Led Count Down dan Pedestrian Crossing             | Meningkatnya fungsi traffic light di persimpangan                                 | 100%  | Dishub               |
| 9   | Koordinasi Lintas Sektor/Bidang Lalu Lintas                                       | Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan                   | 5%  | Dishub               |
| 10  | Sosialisasi Tertib Lalu Lintas  | Meningkatnya pengetahuan masyarakat pengguna jalan dalam berlalulintas            | 5%  | Dishub               |
| 11  | Kajian Sistem Shift Angkutan Umum   | Menurunnya kepadatan lalu lintas di ruas jalan                                    | 10%   | Dishub               |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              |   | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |   |                      |
| 1   | Penghijauan Lingkungan Terminal Kota Depok  | Meningkatnya penghijauan di lingkungan terminal Depok                             | 19%   | Dishub               |
| <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  |   | <b>Lingkungan Hidup<br/>Badan Lingkungan Hidup</b>                                |   |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                            |   |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                            | Terpenuhinya komunikasi dan penerangan kantor                                     | 100%  | BLH                  |
| 2   | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor                                    | Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor  | 100%  | BLH                  |
| 3   | Penyediaan alat tulis kantor  | Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran                                  | 100%  | BLH                  |
| 4   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran                                  | 100%  | BLH                  |
| 5   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                  | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor  | 100%  | BLH                  |
| 6   | Penyediaan peralatan rumah tangga   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga                                     | 90%   | BLH                  |
| 7   | Penyediaan makanan dan minuman  | Terwujudnya kelancaran rapat-rapat badan  | 70%   | BLH                  |
| 8   | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi  | Terpenuhinya kelancaran tugas dinas   | 80%   | BLH                  |
| 9   | Penyediaan sarana informasi   | Terpenuhinya informasi BPLH   | 100%  | BLH                  |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                 |   |                      |
| 1   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor                                     | Terwujudnya Kelancaran Tugas/Operasional Dinas                                    | 50%   | BLH                  |
| 2   | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor                             | Terwujudnya kelancaran kerja  | 80%   | BLH                  |
| 3   | Penyediaan Gedung Kantor  | Terpenuhinya prasarana kerja  | 100%  | BLH                  |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                 |   |                      |
| 1   | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | Tersedianya laporan keuangan semesteran   | 100%  | BLH                  |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                          |   |                      |
| 1   | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                                       | Meningkatnya pelayanan administrasi   | 80%   | BLH                  |
| 2   | Pengadaan Peralatan Laboratorium  | Tersedianya Peralatan Lab   | 100%  | BLH                  |
| 3   | Pengadaan Mobil Sampling  | Terlaksananya kelancaran operasional pengendalian limbah                          | 80%   | BLH                  |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                     |   |                      |
| 1   | Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja                                       | Tersampainya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan SKPD                       | 60%   | BLH                  |
| 2   | Penyusunan Renstra  |   |   | BLH                  |
| 3   | Kajian Raperda Limbah Cair  | Tersedianya Kajian Raperda Limbah Cair  | 100%  | BLH                  |
| 4   | Kajian Raperda Limbah B3  | Tersedianya Kajian Raperda Limbah B3  |   | BLH                  |
| 5   | Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (lisensi AMDAL, kajian limbah dan SLHD) | Tersedianya prosedur dan pemantauan lingkungan                                    | 30%   | BLH                  |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              |   | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |   |                      |
| 1   | Peringatan Hari Lingkungan Hidup  | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan LH   | 60%   | BLH                  |
| 2   | Sosialisasi dan Percontohan B3 dan Workshop Produksi Bersih                       | Terdapatnya data limbah B3  | 100 Perusahaan  | BLH                  |
| 3   | Pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan                                   | Tersedianya data kualitas dan meningkatnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup | 20%   | BLH                  |
| 4   | Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air dan Udara                                    | Terdapatnya Kualitas Air dan udara di Kota Depok                                  | 6 ttk ambien, 6 ttk emisi, 19 ttk siku, 16 ttk sungai | BLH                  |
| 5   | Pemantauan Limbah Cair Industri, Limbah B3, Limbah Domestik dan Pemantauan IPLC   | Terkendalinya kualitas limbah cair industri dan domestik di Kota Depok            |   | BLH                  |
| 6   | Pendampingan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/GERHAN                             | Mengurangi Jumlah Luasan Lahan Kritis yang berada di kota Depok                   | 40%   | BLH                  |
| 7   | Penghijauan Lingkungan  | Mengurangi Pemanasan Global   | 40%   | BLH                  |
| 8   | Fasilitasi Pemeliharaan Taman Hutan Raya  |   |   | BLH                  |
| 9   | Monitoring dan Pengendalian Air Bawah Tanah                                       | Tersedianya informasi data tentang pemanfaatan air bawah tanah                    | 25 lokasi   | BLH                  |
| <b>Pengendalian Banjir</b>  |   | <b>Menurunnya Kawasan Banjir</b>  |   |                      |
| 1   | Pembinaan situ berbasis masyarakat  | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan situ                        | 60%   | BLH                  |
| 2   | Konservasi Daerah Aliran Sungai   | Terkelolanya Kawasan Konservasi DAS   | 40%   | BLH                  |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>   |   |                      |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target                                 | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|---|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                      | 6                    |
|    | <b>SKPD :</b>  | <b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>   |  |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |                      |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Terjaganya kebersihan kantor  | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 3  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 6  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 7  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 8  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri   | Meningkatnya kinerja aparatur   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 9  | Penyediaan Sarana Informasi  | Bertambahnya informasi  | 100%                                   | Disdukcapi           |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |  |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan tupoksi  | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor   | Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan  | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan  | 100%                                   | Disdukcapi           |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>        | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                                       |  |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran   | 100%                                   | Disdukcapi           |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |  |                      |
| 1  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Meningkatnya kinerja aparatur   | 80%                                    | Disdukcapi           |
|    | Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan                                | Terwujudnya pembangunan yang aspiratif  |  |                      |
| 1  | Pelaksanaan Forum SKPD   | Terusunnya usulan program /kegiata Disdukcapi Tahun 2010  | 80%                                    | Disdukcapi           |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen Kependudukan</b>                           | <b>Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan</b>  |  |                      |
| 1  | Implementasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)                  | Tersedianya data base kependudukan  | 70%                                    | Disdukcapi           |
| 2  | Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Perkawinan diluar jam kerja dan Perkawinan Masal)           | Tercapainya pembuatan akta perkawinan   | 80%                                    | Disdukcapi           |
| 3  | Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil   | Terlaksananya penerbitan akta catatan sipil   | 15,000 akta dan 1260 akta prasejahtera | Disdukcapi           |
| 4  | Pemutakhiran Database Kependudukan   | Jumlah penduduk dan DCP Pemilu dan Pilpres  | 95%                                    | Disdukcapi           |
| 5  | Pemeliharaan Dokumen Kependudukan  | Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil   | 100%                                   | Disdukcapi           |
| 6  | Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan                                     | Tertib administrasi kependudukan  | 60%                                    | Disdukcapi           |
| 7  | Sosialisasi Kependudukan   | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan                              | 75%                                    | Disdukcapi           |
|    | <b>Urusan : SKPD :</b>   | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b> |  |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |                      |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon                               | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, Listrik dan Telepon                             | 100%                                   | BPPKB                |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%                                   | BPPKB                |
| 3  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%                                   | BPPKB                |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan   | 100%                                   | BPPKB                |
| 5  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 100%                                   | BPPKB                |
| 6  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman  | 100%                                   | BPPKB                |
| 7  | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah   | Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                              | 100%                                   | BPPKB                |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | 100%                                   |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor   | 100%                                   | BPPKB                |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                     | 100%                                   | BPPKB                |
| 3  | Penyediaan Gedung Kantor   | Terlaksananya sewa Gedung Kantor  | 100%                                   | BPPKB                |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>        | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                                       |  |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   |   | 100%                                   | BPPKB                |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |  |                      |
| 1  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan  | 40%                                    | BPPKB                |
| 2  | Pengadaan Meubelair  | Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan  | 100%                                   | BPPKB                |
|    | <b>Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional</b> | <b>Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan daerah</b>   |  |                      |
| 1  | Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional                               | Meningkatnya kinerja tenaga fungsional  | 80%                                    | BPPKB                |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target              | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|---|---------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                   | 6                    |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |                     |                      |
| 1  | Forum SKPD   | Tersusunnya rencana kegiatan SKPD   | 80%                 | BPPKB                |
|    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera</b>  | <b>Meningkatnya Kualitas Masyarakat</b>   |                     |                      |
| 1  | Penunjang Pemberdayaan Pokjnal Posyandu  | Meningkatnya kinerja Pokjnal Posyandu   | 40%                 | BPPKB                |
| 2  | Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas keluarga   | Meningkatnya kualitas keluarga Pra KS dan KS I  | 70%                 | BPPKB                |
| 3  | Pelatihan Usaha Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin  | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga para perempuan kepala keluarga miskin   | 70%                 | BPPKB                |
| 4  | Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender  | Tersedianya buku evaluasi Kota Depok  | 25 buku             | BPPKB                |
| 5  | Penyusunan Profil Gender   | Tersedianya buku profil gender Kota Depok Tahun 2009  | 100 buku            | BPPKB                |
| 6  | Sosialisasi undang-undang Perdagangan Orang  | Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Eksploitasi Pekerja Anak  | 1 Rancangan         | BPPKB                |
| 7  | Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A)  | Terfasilitasinya kebutuhan perempuan dan anak termasuk penyelesaian kasus/masalah yang dihadapi perempuan dan anak  | 70 orang / 10 kasus | BPPKB                |
| 8  | Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi (P2WKSS)  | Tersedianya bangunan rumah layak huni dan sarana masyarakat   | 5 rumah, 1 unit MCK | BPPKB                |
| 9  | Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak  | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak  | 60 orang            | BPPKB                |
| 10 | Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)   | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KDRT dan perlindungan perempuan   | 60 orang            | BPPKB                |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b><br><b>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>  |                     |                      |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan</b>  |                     |                      |
| 1  | Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana  | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas lapangan keluarga berencana   | 40%                 | BPPKB                |
|    | <b>Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga</b>  |                     |                      |
| 1  | Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi   | Meningkatnya cakupan peserta KB dan kesehatan reproduksi khususnya dari keluarga pra KS dan KS I (keluarga miskin)  | 40%                 | BPPKB                |
| 2  | Peningkatan Kualitas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga (BLK) | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga (BLK) | 40%                 | BPPKB                |
| 3  | Pencatatan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi   | Bahan evaluasi untuk perencanaan program dan kesehatan reproduksi   | 40%                 | BPPKB                |
| 4  | Penunjang Operasional KB-Kesehatan dalam rangka Bhakti IBI dan Hari Kesatuan Gerak PKK   | Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan keluarga  | 40%                 | BPPKB                |
| 5  | Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana  | Meningkatnya keakuratan/validnya data keluarga di Kota Depok  | 40%                 | BPPKB                |
| 6  | TNI Manunggal KB-Kesehatan   | Meningkatnya cakupan layanan KB dan Kesehatan Keluarga  | 20%                 | BPPKB                |
| 7  | Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok   | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader pos KB, Keluarga dan Pengelola KB  | 40%                 | BPPKB                |
| 8  | Lomba Ketahanan Keluarga   | Meningkatnya kualitas kelompok BKB, BKR, BKL, BLK dan keluarga KB Lestari   | 40%                 | BPPKB                |
| 9  | KIE dan Advokasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja   | Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja  | 25%                 | BPPKB                |
| 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana PLKB, Klinik KB dan Kelompok BKB  | Meningkatnya cakupan peserta KB di Kota Depok   | 25%                 | BPPKB                |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Sosial</b><br><b>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</b>   |                     |                      |
|    | <b>Penyelenggaraan Jaminan Sosial</b>  | <b>Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial</b>  |                     |                      |
| 1  | Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian  | Tersalurkannya santunan kematian  | 100%                | Disnakersos          |
| 2  | Pelaksanaan Nikah Massal   | Terlaksananya nikah massal bagi penduduk Kota Depok   | 75%                 | Disnakersos          |
| 3  | Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial   | Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan PMKS   | 60%                 | Disnakersos          |
| 4  | Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalankan  | Berkurangnya orang terlantar di Kota Depok  | 55%                 | Disnakersos          |
| 5  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota Depok   | Tercapainya penyelenggaraan dan penataan taman makam pahlawan   | 80%                 | Disnakersos          |
| 6  | Sosialisasi Perundang-undangan Sosial Penyandang Cacat   | Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat  | 60%                 | Disnakersos          |
|    | <b>Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>  | <b>Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas Dalam Pembangunan</b>  |                     |                      |
| 1  | Fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial  | Terlaksananya fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial   | 75%                 | Disnakersos          |
|    | <b>Penanggulangan Bencana</b>  |   |                     |                      |
| 1  | Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana   | Peningkatan layanan penanggulangan bencana  | 80%                 | Disnakersos          |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Ketenagakerjaan</b><br><b>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</b>  |                     |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |                     |                      |
| 1  | Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik   | Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik   | 60%                 | Disnakersos          |
| 2  | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor   | Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor   | 100%                | Disnakersos          |
| 3  | Penyediaan alat tulis kantor   | Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor   | 100%                | Disnakersos          |
| 4  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan  | 100%                | Disnakersos          |
| 5  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Tersedianya komponen komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 80%                 | Disnakersos          |
| 6  | Penyediaan Alat Rumah Tangga   | Tersedianya Alat Rumah Tangga   | 100%                | Disnakersos          |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|--------|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4      | 6                    |
| 7   | Penyediaan makanan dan minuman  | Tersedianya makanan dan minuman   | 100%   | Disnakersos          |
| 8   | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi  | Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur   | 100%   | Disnakersos          |
| 9   | Penyediaan sarana informasi   | Tersedianya sarana informasi  | 100%   | Disnakersos          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  | Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | Disnakersos          |
| 2   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur  | 100%   | Disnakersos          |
| 3   | Sewa Gedung Kantor  | Terlayaninya masyarakat Kota Depok  | 60%    | Disnakersos          |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                     |        |                      |
| 1   | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | Tersedianya sistem pelaporan kinerja keuangan   | 100%   | Disnakersos          |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                              |        |                      |
| 1   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor   | 80%    | Disnakersos          |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |        |                      |
| 1   | Penyelenggaraan Forum SKPD  | Terevaluasinya dan terencanaanya kegiatan bidang tenaga kerja dan sosial              | 100%   | Disnakersos          |
| <b>Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan</b>   |   | <b>Tersedianya Tenaga Kerja Terlatih</b>  |        |                      |
| 1   | Pelatihan Servis HP dan Elektronik  |   | 80%    | Disnakersos          |
| 2   | Pelatihan Montir Sepeda Motor Roda Dua  | Tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja                               | 80%    | Disnakersos          |
| 3   | Pelatihan Advokasi Perburuhan   | Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perburuhan                                 | 80%    | Disnakersos          |
| 4   | Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja   | Tersebaranya Informasi Pasar kerja  | 75%    | Disnakersos          |
| 5   | Sosialisasi Ketenagakerjaan dan Sosial  |   | 80%    | Disnakersos          |
| 6   | Pembangunan gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok   | Tersedianya sub struktur, struktur & arsitektur gedung balai latihan kerja Kota Depok | 75%    | Disnakersos          |
| <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  |   | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br/>Dinas Tenaga Kerja dan Sosial</b>             |        |                      |
| <b>Perlindungan Ketenagakerjaan</b>   |   | <b>Meningkatnya Hubungan Industrial Tenaga Kerja dengan Pengusaha</b>                 |        |                      |
| 1   | Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan LKS Bipartit dan LKS Tripartit   | Meningkatnya layanan perselisihan hubungan industrial                                 | 80%    | Disnakersos          |
| 2   | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial   |   |        |                      |
| 3   | Fasilitasi Pembentukan P2K3 pada Perusahaan di Kota Depok   | Terbentuknya P2K3 pada perusahaan   | 80%    | Disnakersos          |
| 4   | Loka Karya Norma Ketenagakerjaan  | Meningkatnya pengawasan, norma kerja dan kesehatan kerja                              | 70%    | Disnakersos          |
| 5   | Penetapan UMK di Kota Depok   | Penetapan UMK di Kota Depok   | 80%    | Disnakersos          |
| <b>Urusan :<br/>SKPD :</b>  |   | <b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br/>Dinas Koperasi, UKM dan Pasar</b>            |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                |        |                      |
| 1   | Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                    | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2   | Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor  | Terpenuhinya Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 3   | Penyedia Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 4   | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan   | Terpenuhinya kebutuhan Cetak dan Penggandaan  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 5   | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 6   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah   | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 7   | Penyediaan sarana Informasi   | Meningkatnya wawasan pegawai  | 50%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 8   | Penyedia Makan dan Minuman  | Penyedia Makan dan Minuman  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas                                   | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor          | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 3   | Penyediaan Gedung Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                     |        |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja SKPD  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM</b>                               |   | <b>Meningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM</b>                               |        |                      |
| 1   | Sarasehan Gerakan Koperasi  | Terpenuhinya aspirasi gerakan koperasi  | 40%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2   | Sosialisasi Perkuatan Permodalan Koperasi dengan BUMN   | Meningkatnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan                            | 25%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 3   | Pelatihan pengembangan Manajemen Koperasi   | Meningkatnya pengetahuan calon anggota koperasi                                       | 40%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 4   | Pemutakhiran Data Koperasi  | Tersedianya data informasi koperasi   | 50%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 5   | Optimalisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Penerima Dana Bergulir   | Meningkatnya kemampuan dan kualitas dalam pengembalian dana bergulir                  | 100%   | Dinas KUKM & Pasar   |
| 6   | Konsolidasi dengan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dalam Rangka Penjaminan Perkuatan Modal UKM               | Meningkatnya kemampuan dan perkembangan usaha UKM                                     | 30%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 7   | Sosialisasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (BKBL) dengan Lembaga Non Bank sebagai Alternatif Perkuatan Modal | Terwujudnya perolehan dana perkuatan modal yang murah                                 | 40%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 8   | Pemutakhiran Data Kelembagaan UMKM  | Meningkatnya kualitas data kelembagaan UKM  | 60%    | Dinas KUKM & Pasar   |
| 9   | Pembinaan Kelembagaan UMKM  | Meningkatnya kemampuan SDM kelembagaan UMKM   | 60%    | Dinas KUKM & Pasar   |

| No   | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target                           | ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                                | 6                    |
| 10   | Pendataan Profil Kelembagaan UMKM  | Meningkatnya kualitas data kelembagaan UMKM                             | 60%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 11   | Fasilitasi Calaan Wirausaha dengan UKM   | Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan                             | 60%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 12   | Pengelolaan Tempat Promosi UMKM (ITC)  | Meningkatnya volume penjualan   | 60%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 13   | Pameran Produk UKM   | Meningkatnya volume penjualan produk UMKM                               | 60%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 14   | Penerapan Model Inkubator UKM  | Meningkatnya kemampuan SDM UKM  | 60%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Urusan :</b> Ketahanan Pangan<br><b>SKPD :</b> Dinas Koperasi, UKM dan Pasar                                |  |   |                                  |                      |
| <b>Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat</b>  |  | <b>Tertatanya Pasar Tradisional</b>                                     |                                  |                      |
| 1  | Perbaikan Bangunan Gedung Pasar Cisolak  | Terciptanya kondisi gedung yang bersih dan nyaman                       | 100%                             | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2  | Pengadaan dan Perbaikan PJU Pasar  | Penerangan yg memadai   | 100%                             | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Urusan :</b> Perdagangan<br><b>SKPD :</b> Dinas Koperasi, UKM dan Pasar                                     |  |   |                                  |                      |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   |  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                |                                  |                      |
| 1  | Pelayanan Pengangkutan sampah  | Terangkutnya sampah pasar ke TPA  | 100%                             | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2  | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar                 | Meningkatnya kinerja petugas kebersihan                                 | 100%                             | Dinas KUKM & Pasar   |
| 3  | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar (TIBSAR)        | Meninkatnya kinerja petugas ketertiban pasar                            | 100%                             | Dinas KUKM & Pasar   |
| 4  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                | 50%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 5  | Peningkatan dan pemeliharaan sarana penanggulangan kebakaran                         | Meningkatnya sarana penanggulangan kebakaran                            | 65%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 6  | Evaluasi Pelaksanaan NPWRP   | Tercapainya retribusi pasar yang optimal                                | 75%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 7  | Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah Pasar             | Terangkutnya sampah pasar   | 7 Pasar                          | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Peningkatan Jangkauan Pelayanan</b>   |  |   |                                  |                      |
| 1  | Pelayanan Retribusi Pasar  | Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar                                  | 50%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS</b>  |  |   |                                  |                      |
| 1  | Operasional dan Pemeliharaan UPS Pasar Kemiri Muka dan Cisolak                       | Meningkatnya penanggulangan dan pemanfaatan sampah                      | 50%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>   |  | Terwujudnya pembangunan yang aspiratif                                  |                                  |                      |
| 1  | Penyusunan Revisi Renstra Dinas  | Tersedianya dokumen Renstra   | 75%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2  | Forum SKPD   | Meningkatnya kualitas perencanaan                                       | 50%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat</b>  |  | <b>Tertatanya Pasar Tradisional</b>                                     |                                  |                      |
| 1  | Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di Lingkungan Pasar                              | Tercapainya pasar yang aman dan nyaman                                  | 70%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| 2  | Pembangunan Gapura Pasar Cisolak   | Terlaksananya pembuatan gapura  | 50%                              | Dinas KUKM & Pasar   |
| <b>Urusan :</b> Kebudayaan<br><b>SKPD :</b> Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya               |  |   |                                  |                      |
| <b>Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya</b>   |  | <b>Meningkatnya Seni dan Budaya</b>                                     |                                  |                      |
| 1  | Temu Pelaku Seni dan Budaya  | Meningkatnya peran serta artis dan seniman dalam pembangunan            | 40 artis dan seniman             | Dinas Pemuda         |
| 2  | Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok dan Pengiriman Mojang Jejaka Jawa Barat | Adanya duta wisata di Kota Depok  | 3 pasang, 1 favorit, 1 fotogenik | Dinas Pemuda         |
| 3  | Pentas seni dan budaya   | Tergalinya folklot Kota Depok   | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 4  | Pesan Inspiratif Berbasis Seni Tradisi   | Melestarikan seni tradisi sebagai hiburan edukatif inspiratif           | 5 tempat                         | Dinas Pemuda         |
| 5  | Festival Seni dan Budaya   |   |                                  |                      |
| 6  | Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan  | Berkembangnya kesenian Tradisional Kota Depok                           | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| <b>Urusan :</b> Kepemudaan dan Olah Raga<br><b>SKPD :</b> Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya |  |   |                                  |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                  |                                  |                      |
| 1  | Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik                          | Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Terpenuhinya Kebersihan kantor  | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 3  | Penyediaan alat tulis kantor   | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor                                | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 4  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                   | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | Tepenuhinya kelancaran perangkat listrik kantor                         | 90%                              | Dinas Pemuda         |
| 6  | Penyediaan peralatan rumah tangga  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga                           | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 7  | Penyediaan makanan dan minuman   | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman                              | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 8  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                 | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| 9  | Penyediaan sarana informasi  | Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah                          | 100%                             | Dinas Pemuda         |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                       |                                  |                      |
| 1  | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional                             | Terpeliharanya sarana angkutan kendaraan dinas/operasional              | 80%                              | Dinas Pemuda         |
| 2  | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga                        | Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga                        | 80%                              | Dinas Pemuda         |
| 3  | Penyediaan Gedung Kantor   | Meningkatnya kinerja aparatur   | 80%                              | Dinas Pemuda         |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                          |  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>       |                                  |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran                       | 12 buku                          | Dinas Pemuda         |

| No              | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target       | ORGANISASI PELAKSANA |
|-----------------|--|--|--------------|----------------------|
| 1               | 2  | 3  | 4            | 6                    |
|                 | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |              |                      |
| 1               | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  | Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur  | 75%          | Dinas Pemuda         |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                         | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |              |                      |
| 1               | Penyelenggaraan Forum SKPD   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  | 70%          | Dinas Pemuda         |
|                 | <b>Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah</b>             | <b>Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah</b>                                 |              |                      |
| 1               | Peringatan Haornas   | Meningkatnya pemahaman tentang penting peringatan Haornas  | 20%          | Dinas Pemuda         |
| 2               | Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka serta Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor | Terbentuknya pasukan pengibar Bendera Pusaka dan terpilihnya PP tingkat Kota dan Utusan ke Propinsi dan Nasional | 20%          | Dinas Pemuda         |
| 3               | Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemkot)   | Meningkatnya Prestasi Olahraga   | 25%          | Dinas Pemuda         |
| 4               | Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Bagi Anggota Karang Taruna                |  |              | Dinas Pemuda         |
| 5               | Pekan Olahraga Pondok Pesantren  | Meningkatnya Prestasi Olahraga Santri Pondok Pesantren   | 25%          | Dinas Pemuda         |
|                 | <b>Peningkatan Prestasi Olah Raga</b>  | <b>Meningkatnya Prestasi Olah raga</b>   |              |                      |
| 1               | Penyelenggaraan Porphemda Propinsi Jawa Barat Tahun 2009                                     | Meningkatnya Prestasi Olahraga Kota Depok  | 70%          | Dinas Pemuda         |
| 2               | Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota Depok                                     | Meningkatnya kebugaran aparatur pemerintah Kota Depok  | 75%          | Dinas Pemuda         |
| 3               | Penunjang Stimulan Bantuan Keuangan Kegiatan Olahraga  | Meningkatnya prestasi olah raga di masyarakat Kota Depok   | 70%          | Dinas Pemuda         |
| 4               | Korps Musik Gita Praja Setda Kota Depok  | Meningkatnya Kinerja Korps Musik Gita Praja Kota Depok   | 70%          | Dinas Pemuda         |
| 5               | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2009                      | Peningkatan Sumber daya manusia Kota Depok   | 75%          | Dinas Pemuda         |
| <b>Urusan :</b> |  | <b>Pariwisata</b>  |              |                      |
| <b>SKPD :</b>   |  | <b>Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya</b>  |              |                      |
|                 | <b>Pengembangan Obyek Wisata</b>   | <b>Tertatanya Obyek Wisata</b>   |              |                      |
| 1               | Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Kota Depok  | Meningkatnya potensi makanan khas Depok yan menjadi unggulan   | makanan khas | Dinas Pemuda         |
| 2               | Promosi potensi wisata belanja   | Tersebarluaskannya informasi tentang potensi wisata belanja  | 65%          | Dinas Pemuda         |
| 3               | Pengembangan core bisnis Pariwisata  | Meningkatnya industri di bidang Kepariwisata Kota Depok  | 60%          | Dinas Pemuda         |
| 4               | Pengembangan sarana wisata air Situ Pedongkelan  | Meningkatnya kunjungan wisata air  | 60%          | Dinas Pemuda         |
| 5               | Penyusunan data base Usaha Jasa dan Sarana Wisata  | Tersedianya data base para pengusaha di sektor Jasa dan Sarana Wisata  | 75%          | Dinas Pemuda         |
| <b>Urusan :</b> |  | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>  |              |                      |
| <b>SKPD :</b>   |  | <b>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>   |              |                      |
|                 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |              |                      |
| 1               | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Meningkatnya kinerja operasional kantor  | 75%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 2               | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan  | Meningkatnya kebersihan  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 3               | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Meningkatnya sarana kerja kantor   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 4               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Meningkatnya sarana perkantoran  | 80%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 5               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Meningkatnya sarana penerangan kantor  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 6               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Meningkatnya peralatan rumah tangga  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 7               | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Meningkatnya sarana keperluan rapat  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 8               | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah   | Meningkatnya penunjang sarana koordinasi   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 9               | Penyediaan Sarana Informasi  | Meningkatnya sarana informasi  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
|                 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |              |                      |
| 1               | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor  | Terpenuhinya kendaraan dinas   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 2               | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Meningkatnya sistem kerja  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 3               | Penyediaan Gedung Perkantoran  | Tersedianya gedung kantor  | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
|                 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>        | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |              |                      |
| 1               | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Tersusunnya laporan keuangan   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
|                 | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |              |                      |
| 1               | Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                         | <b>Terwujudnya pembangunan yang aspiratif</b>  |              |                      |
| 1               | Pelaksanaan Forum SKPD   | Terwujudnya penyelenggaraan Forum SKPD   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik</b>  |  |              |                      |
| 1               | Verifikasi Bantuan Parpol  | Meningkatnya peran dan Fungsi partai politik   | 90%          | Kantor Kesbanglinmas |
| 2               | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2009   |  |              |                      |
| 3               | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009  | Meningkatnya pemahaman pengetahuan dan partisipasi masyarakat  | 60%          | Kantor Kesbanglinmas |
| <b>Urusan :</b> |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>                              |              |                      |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target    | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|-----------|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4         | 6                    |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>  |           |                      |
| <b>Peningkatan Tertib Sosial</b>  |   | <b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Perda</b>  |           |                      |
| 1   | Pelaksanaan Desiminasi Ranham   | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman HAM  | 100 orang | Kantor Kesbanglinmas |
| 2   | Pelatihan Anggota satuan Linmas   | Meningkatnya pengetahuan anggota linmas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana                                 | 100 orang | Kantor Kesbanglinmas |
| 3   | Fasilitasi Kegiatan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)                                      | Meningkatnya kewaspadaan terhadap aliran kepercayaan  | 70%       | Kantor Kesbanglinmas |
| 4   | Fasilitasi Kegiatan KOMIDA  | Meningkatnya Stabilitas keamanan kota Depok   | 80%       | Kantor Kesbanglinmas |
| 5   | Fasilitasi FKUB   | Meningkatnya rasa hormat antar umat beragama  |           | Kantor Kesbanglinmas |
| 6   | Pengadaan Seragam Linmas Kecamatan  | Meningkatnya kinerja anggota satuan linmas  | 20%       | Kantor Kesbanglinmas |
| 7   | Pengadaan Alat-Alat Penanggulangan Bencana  | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan   | 75%       | Kantor Kesbanglinmas |
| <b>Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas Dalam Pembangunan</b>  |           |                      |
| 1   | Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan  | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan organisasi masyarakat, orsospol dan LSM, Tokoh masyarakat | 75%       | Kantor Kesbanglinmas |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>                                 |           |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Sekretariat Daerah</b>   |           |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |           |                      |
| 1   | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan Terhadap Masyarakat  | 80%       | Bag. Aset, Setda     |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan Terhadap Masyarakat  | 70%       | Bag. Aset, Setda     |
| 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Meningkatnya peralatan rumah tangga   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 7   | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Meningkatnya sarana keperluan rapat   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 8   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  | Meningkatnya penunjang sarana koordinasi  | 70%       | Bag. Keu, Setda      |
| 9   | Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar dan Majalah   | Meningkatnya penyampaian informasi  | 70%       | Bag. Humas, Setda    |
| 10  | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran  | Terpenuhinya honorarium TKK   | 100%      | Bag. Kepeg, Setda    |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |           |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor   | Terpeliharanya Kendaraan Bermotor   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 3   | Sewa Gedung Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 4   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | Terpeliharanya Gedung Kantor  | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   |   |           |                      |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   | Terpenuhinya Bahan Pakaian Dinas Harian   | 100%      | Bag. Aset, Setda     |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |   | <b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>  |           |                      |
| 1   | Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa   | Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengadaan barang/jasa  | 20%       | Bag. Pemb, Setda     |
| 2   | Pengelolaan kegiatan tugas belajar IPDN dan Beasiswa S2 bagi PNS pemerintah Kota Depok                    | Terwujudnya pembelajaran yang baik di IPDN serta tersedianya pegawai yang berpendidikan S2                          | 70%       | Bag. Kepeg, Setda    |
| 3   | Diklat teknis bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan semiloka implementasi peraturan perundang-undangan | Tersedianya pegawai yang memiliki pengetahuan dalam implementasi peraturan perundang-undangan                       | 100%      | Bag. Kepeg, Setda    |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |           |                      |
| 1   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                    | Tersedianya LAKIP Setda   | 1 Dok     | Bag. Keu, Setda      |
| 2   | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan  | 70%       | Bag. Keu, Setda      |
| <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>      |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>   |           |                      |
| 1   | Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah  | Terpenuhinya penyelenggaraan Kunjungan kerja/ inspeksi KDH/ WKDH  | 100%      | Bag. Keu, Setda      |
| 2   | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lainnya  | Terpenuhinya Koordinasi dgn Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lainnya  | 100%      | Bag. Keu, Setda      |
| 3   | Keprotokoleran Pemerintah Daerah  | Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan keprotokoleran Pemerintah Kota Depok  | 100%      | Bag. Humas, Setda    |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |           |                      |
| 1   | Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor   | Terpenuhinya jasa peralatan & perlengkapan kantor   | 100%      | Bag. Umum, Setda     |
| 2   | Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda   | Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan masing-masing bagian di lingkup Setda                         | 80%       | Bag. Keu, Setda      |
| 3   | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan  | Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan  | 100%      | Bag. Keu, Setda      |
| 4   | Pengadaan Mobil dan Motor Operasional   | Tersedianya mobil dan motor operasional untuk aparatur Pemerintah Kota Depok  | 60%       | Bag. Umum, Setda     |
| 5   | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                                     | Jumlah aparatur memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                                       | 80%       | Bag. Pem dan Otda    |
| 6   | Pendukung operasional peliputan dan kehumasan   | Meningkatnya peliputan kegiatan pemerintahan  | 70%       | Bag. Humas, Setda    |
| 7   | Talkshow Walikota dan Wakil Walikota  | Terciptanya interaksi langsung antara pimpinan Kota Depok dengan masyarakat   | 70%       | Bag. Humas, Setda    |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target         | ORGANISASI PELAKSANA    |
|----|--|--|----------------|-------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4              | 6                       |
| 8  | Pembuatan Buku Sambutan Walikota dan Wakil Kepala Daerah                                     | Meningkatnya pelayanan informasi   | 70%            | Bag. Humas, Setda       |
| 9  | Pengelolaan Media Internet Kehumasan   | Meningkatnya pelayanan sistem informasi melalui media center                                   | 70%            | Bag. Humas, Setda       |
| 10 | Peningkatan Sinkronisasi Program dan Penganggaran  | Tersedianya data tentang rekonsiliasi penganggaran   | 80%            | Bag. Keu, Setda         |
| 11 | Pembuatan Kliping Berita   | Meningkatnya pelayanan informasi   | 70%            | Bag. Humas, Setda       |
| 12 | Pengumuman dan Penulisan Advetorial Pembangunan Kota Depok                                   | Meningkatnya pelayanan informasi melalui media cetak   | 60%            | Bag. Humas, Setda       |
| 13 | Pelayanan Pengaduan  | Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat   | 65%            | Bag. Humas, Setda       |
| 14 | Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor   | Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor   | 100%           | Bag. Aset, Setda        |
|    | Peningkatan Jangkauan Pelayanan  | Terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan  |                |                         |
| 1  | Fasilitasi Kecamatan Pemekaran   | Terbentuknya 5 Kec Baru hasil pemekaran  | 5 Kec baru     | Bag. Pem dan Otda       |
|    | <b>Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional</b> | <b>Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah</b>                                    |                |                         |
| 1  | Diklat Prajabatan CPNS   | Terpenuhinya persyaratan pengangkatan CPNS tahun 2008 menjadi PNS                              | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 2  | Diklat Kepemimpinan tingkat II,III, dan IV   | Terpenuhinya persyaratan pejabat dan calon pejabat struktural eselon II,III dan IV             | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 3  | Penegakan disiplin pegawai dan seleksi penerima Satya Lencana Karya Satya                    | Tegaknya disiplin pegawai dan penghargaan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Depok          | 80%            | Bag. Kepeg, Setda       |
| 4  | Ujian kenaikan pangkat pegawai   | Terpenuhinya salah satu syarat kenaikan pangkat pegawai  | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 5  | Seleksi pengadaan CPNS Tahun 2009  | Tersedianya CPNSD  | 500 orang      | Bag. Kepeg, Setda       |
| 6  | Pengelolaan sistem Informasi manajemen Kepegawaian   | Meningkatnya akurasi data kepegawaian  | 80%            | Bag. Kepeg, Setda       |
| 7  | Pembuatan kartu pengenalan pegawai   | Terpenuhinya identitas   | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 8  | Diklat fungsional aparatur daerah  | Tersedianya pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan fungsional                            | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 9  | Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual bagi pejabat struktural                      | Meningkatnya kecerdasan emosional dan spritual pejabat struktural                              | 70%            | Bag. Kepeg, Setda       |
| 10 | Peningkatan status kepegawaian   | Meningkatnya kinerja SKPD  | 100%           | Bag. Kepeg, Setda       |
| 11 | Uji kompetensi pegawai   | Tersedianya hasil uji kompetensi pegawai   | 100 orang      | Bag. Kepeg, Setda       |
| 12 | Mutasi pegawai dalam jabatan struktural  | Terbitnya SK Mutasi  | 70%            | Bag. Kepeg, Setda       |
| 13 | Mutasi pegawai dalam jabatan fungsional  | Meningkatnya kinerja SKPD  | 70%            | Bag. Kepeg, Setda       |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>                                  | <b>Terwujudnya Kinerja Kelembagaan yang Efisien dan Efektif</b>                                |                |                         |
| 1  | Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas   | Tersedianya pedoman dan pemahaman dalam pembuatan Naskah Dinas                                 | 100%           | Bag. Ortala, Setda      |
| 2  | Analisa dan Evaluasi Jabatan SKPD  | Tersedianya informasi jabatan SKPD   | 1 Dok          | Bag. Ortala, Setda      |
| 3  | Penyusunan Standar Operasional Pelayanan SKPD  | Terselenggaranya pelayanan sesuai SOP  | 55%            | Bag. Ortala, Setda      |
| 4  | Evaluasi Kelembagaan   | Terselenggaranya pelayanan yang optimal kepada masyarakat                                      |                | Bag. Ortala, Setda      |
|    | <b>Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga</b>   | <b>Terciptanya Kerjasama Antar Lembaga</b>   |                |                         |
| 1  | Fasilitasi Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun 2009                                 | Terbentuknya Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun 2009                                 | 80%            | Bag. Pem dan Otda       |
| 2  | Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga   | Terwujudnya kerjasama antar lembaga  | 12 bulan       | Bag. Pem dan Otda       |
|    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah</b>  | <b>Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah</b>                                       |                |                         |
| 1  | Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi  | 20 ijin lokasi yan telah dikeluarkan   | 80%            | Bag. Pem dan Otda       |
| 2  | Sertifikasi Asset Tanah  | Aset tanah milik Pemerintah Kota Depok berlandaskan hukum                                      | 75%            | Bag. Aset, Setda        |
| 3  | Fasilitasi Penyerahan Fasos Fasum  | Data Fasos Fasum Se Kota Depok   | 2 buku         | Bag. Aset, Setda        |
| 4  | Penilaian Aset Kota Depok  | Buku Penilaian Aset Kota Depok   | 5 Buku         | Bag. Aset, Setda        |
| 5  | Sosialisasi Barang Milik Daerah  | Terlaksananya Barang Milik Daerah  | 80%            | Bag. Aset, Setda        |
| 6  | Pengawasan Barang Daerah   | Terlaksananya Pengawasan Barang Daerah   | 80%            | Bag. Aset, Setda        |
| 7  | Inventarisasi Barang Daerah  | Buku Barang Daerah se Kota Depok   | 5 buku%        | Bag. Aset, Setda        |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah</b>  | <b>Terwujudnya Kualitas Produk hukum</b>   |                |                         |
| 1  | Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Adanya landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah                              | 70%            | Bag. Hukum, Setda       |
| 2  | Penyediaan layanan advokasi bagi aparatur  | Tertanganinya permasalahan Hukum   | 70%            | Bag. Hukum, Setda       |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                         | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |                |                         |
| 1  | Evaluasi Kinerja Kecamatan   | Terciptanya kompetisi kinerja antar kecamatan se Kota Depok                                    | 80%            | Bag. Pem dan Otda       |
| 2  | Monitoring dan Pengendalian Bantuan Gubernur untuk Kecamatan dan Kelurahan                   | Terealisasinya bantuan Gubernur Jabar sesuai saran   | 80%            | Bag. Pem dan Otda       |
| 3  | Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ, LAKIP dan ILPPD                | Terlaksananya pelaporan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Depok | 400 buku       | Bag. Pem dan Otda       |
| 4  | Fasilitasi TAPD dalam Penyusunan RAPBD   |  | 60%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 5  | Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                       | Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa   | 20%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 6  | Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa   | Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa   | 20%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 7  | Sosialisasi Peraturan Penyedia Barang/Jasa   | Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa   | 20%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 8  | Penyusunan Pedoman Administrasi Kegiatan   | Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa   | 20%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 9  | Evaluasi Administrasi penyaluran Bantuan Stimulan pembangunan Kota Depok                     | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Depok                               | 40%            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 10 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK   | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK tahun 2009                         | 1 buku laporan | Bag. Pembangunan, Setda |
| 11 | Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Depok                                     | Terlaksananya data pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Depok                                 |                | Bag. Pembangunan, Setda |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target                         | ORGANISASI PELAKSANA    |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                              | 6                       |
| 12  | Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok   | Tersusunnya bahan pertimbangan/ evaluasi pelaksanaan kegiatan TA. 2009                                     | 40%                            | Bag. Pembangunan, Setda |
| 13  | Fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan  | Terealisasinya tugas pembantuan di Kota Depok sesuai sasaran   | 80%                            | Bag. Pem dan Otda       |
| 14  | Forum SKPD dan penyusunan Rencana Kerja 2010  | Terkoordinasikannya perencanaan kegiatan lingkup sekretariat daerah dan tersedianya Renja Setda tahun 2010 | 1 keg, 1 dok                   | Bag. Ortala, Setda      |
| 15  | Kajian Pemekaran Kelurahan  | Terealisasinya hasil kajian tentang pemekaran kelurahan  | 15 Dok                         | Bag. Pem dan Otda       |
| <b>Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM</b>                               |   | <b>Meningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM</b>  |                                |                         |
| 1   | Pendirian BPR Kota Depok  | Berdirinya BPR Kota Depok  | 75%                            | Bag. Ekonomi, Setda     |
| 2   | Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Koperasi di Kota Depok                                  | Tersedianya dokumen kajian kebijakan revitalisasi Kota Depok   | 20 buku                        | Bag. Ekonomi, Setda     |
| 3   | Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro dan Menengah Kota Depok                    | Tersedianya dokumen perumusan kebijakan pengembangan ekonomi mikro dan menengah Kota Depok                 | 30 buku                        | Bag. Ekonomi, Setda     |
| <b>Peningkatan Daya Tarik Investasi</b>   |   | <b>Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Investor</b>   |                                |                         |
| 1   | Penyusunan peta produksi Kota Depok   | Tersedianya dokumen peta produksi Kota Depok   | 25 buku                        | Bag. Ekonomi, Setda     |
| 2   | Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depok dengan Wilayah Sekitarnya                           | Tersedianya dokumen Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depok dengan Wilayah Sekitarnya                        | 25 buku                        | Bag. Ekonomi, Setda     |
| <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                              |   | <b>Tersedianya data dan informasi keuangan yang akurat</b>   |                                |                         |
| 1   | Penyusunan standar satuan harga dan analisa belanja kegiatan Kota Depok                   | Tersedianya pedoman harga satuan dan analisa belanja penyusunan RKA dan SKPD                               | 60%                            | Bag. Pembangunan, Setda |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera</b>                                 |   | <b>Meningkatnya Kualitas Masyarakat</b>  |                                |                         |
| 1   | Penyusunan Juklak Bantuan Kegiatan Sosial   |  |                                | Bag. Sosial, Setda      |
| <b>Peningkatan Tertib Sosial</b>  |   | <b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Perda</b>   |                                |                         |
| 1   | Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)                    | Masyarakat memahami produk hukum daerah  | 70%                            | Bag. Hukum, Setda       |
| 2   | Publikasi peraturan perundang-undangan  | Tersedianya lembaran daerah dan berita daerah, tersedianya liflet perda dan CD file                        | 2500 buku, 1500 lembar, 500 CD | Bag. Hukum, Setda       |
| <b>Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama</b>  |   | <b>Meningkatkan Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama</b>                               |                                |                         |
| 1   | Penunjang Bantuan Sarana & Kegiatan Keagamaan   | Terselenggarakannya Bantuan Stimulan Kepada Masyarakat   | 70%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 2   | Pengiriman MTQ Tk. Prov. Jabar 2009   | Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Qur'an pada masyarakat Kota Depok                                 | 70%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 3   | MTQ Tk. Kota 2009   | Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Qur'an pada masyarakat Kota Depok                                 | 70%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 4   | Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kota Depok  | Terselenggarakannya Syiar Islam di Kota Depok  | 70%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 5   | Fasilitasi Pemberangkatan Haji Kota Depok Tahun 2009                                      | Terselenggarakannya Haji Kota Depok  | 70%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 6   | Pembinaan Mental Pegawai  | Tercapainya jalinan komunikasi terbuka antara ulama umaro dan masyarakat                                   | 80%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| 7   | Pendataan Sarana Keagamaan  | Tersedia data yang akurat tentang jumlah sarana keagamaan  | 80%                            | Bag. Sosial, Setda      |
| <b>Peningkatan Prestasi Olah Raga</b>   |   | <b>Meningkatnya Prestasi Olah raga</b>   |                                |                         |
| 1   | Peringatan Hari Besar Nasional  | Terselenggaranya kegiatan PHBN Tahun 2009  | 100%                           | Bag. Sosial, Setda      |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>                        |                                |                         |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Sekretariat DPRD</b>  |                                |                         |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |                                |                         |
| 1   | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Memperlancar komunikasi dan penerangan bangunan kantor   | 100%                           | Set DPRD                |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Tercapainya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor DPRD Kota Depok                                       | 100%                           | Set DPRD                |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Menunjang aktivitas kantor   | 100%                           | Set DPRD                |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Menunjang aktivitas kantor   | 100%                           | Set DPRD                |
| 5   | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                         | Menunjang aktivitas kantor   | 100%                           | Set DPRD                |
| 6   | Penyediaan Makan dan Minum  | Terwujudnya penyediaan makan dan minum   | 100%                           | Set DPRD                |
| 7   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Sekretariat DPRD                     | Sebagai bahan penyusunan kebijakan sekretariat DPRD  | 100%                           | Set DPRD                |
| 8   | Penyediaan Sarana Informasi   | Meningkatnya sarana informasi  | 100%                           | Set DPRD                |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                                |                         |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor   | Meningkatnya pemeliharaan kondisi gedung   | 85%                            | Set DPRD                |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor   | Memperlancar kegiatan  | 100%                           | Set DPRD                |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  | Meningkatkan kondisi peralatan kantor  | 100%                           | Set DPRD                |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  |   | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  |                                |                         |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   | Tercapainya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya  | 100%                           | Set DPRD                |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |                                |                         |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Tertib administrasi keuangan secara akuntabel  | 100%                           | Set DPRD                |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |                                |                         |
| 1   | Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor   | Meningkatnya perlengkapan gedung kantor  | 100%                           | Set DPRD                |
| 2   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya | Memberikan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok beserta keluarga                    | 100%                           | Set DPRD                |

| No   | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|--|--|---|--------|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 6                    |
| 3  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Menunjang pengetahuan aparatur dan anggota DPRD   | 100%   | Set DPRD             |
| <b>Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional</b> |  | <b>Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah</b>   |        |                      |
| 1  | Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain-lain       | Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur sekretariat DPRD  | 100%   | Set DPRD             |
| <b>Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga</b>   |  | <b>Terciptanya Kerjasama Antar Lembaga</b>  |        |                      |
| 1  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi A DPRD Kota Depok            | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 2  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi B DPRD Kota Depok            | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 3  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi C DPRD Kota Depok            | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 4  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi D DPRD Kota Depok            | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 5  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Badan Kehormatan DPRD Kota Depok    | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 6  | Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Musyawarah DPRD Kota Depok                   | Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah  | 75%    | Set DPRD             |
| 7  | Rapat dan Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Anggaran                           | Sebagai bahan kebijakan dalam penetapan anggaran Pemerintah Kota Depok  | 75%    | Set DPRD             |
| 8  | Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Legislasi DPRD Kota Depok                    | Terdapatnya bahan rekomendasi untuk kebijakan DPRD dalam pembentukan produk-produk hukum daerah                       | 75%    | Set DPRD             |
| 9  | Fasilitasi dan Mendampingi Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD                 | Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke pemerintah daerah lainnya                                      | 75%    | Set DPRD             |
| <b>Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif</b>   |  | <b>Terwujudnya Peran dan Fungsi Legislatif</b>  |        |                      |
| 1  | Rapat Kerja DPRD dan Pembahasan Rencana Kegiatan Dengan SKPD TA 2010             | Terlaksananya rapat kerja DPRD dan pembahasan rencana kegiatan dengan SKPD TA 2009                                    | 100%   | Set DPRD             |
| 2  | Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok | Terlaksananya pembahasan APBD dan rapat kerja DPRD Kota Depok   | 100%   | Set DPRD             |
| 3  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                                  | Meningkatnya kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok   | 100%   | Set DPRD             |
| 4  | Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus LKPJ DPRD Kota Depok                            | Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah   | 100%   | Set DPRD             |
| 5  | Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok                                    | Meningkatnya pelayanan protokoler terhadap pimpinan dan anggota DPRD  | 80%    | Set DPRD             |
| 6  | Kegiatan Reses DPRD Kota Depok   | Tersempatnya aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rencana kerja pembangunan Kota Depok | 100%   | Set DPRD             |
| 7  | Fasilitasi dan Mendampingi Kegiatan Pansus -Pansus DPRD Kota Depok               | Terlaksananya kunjungan kerja dan pembahasan pansus-pansus DPRD Kota Depok  | 80%    | Set DPRD             |
| 8  | Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok                               | Tersedianya informasi kegiatan DPRD   | 100%   | Set DPRD             |
| 9  | Penyusunan Risalah Rapat   | Tersedianya himpunan buku risalah rapat   | 100%   | Set DPRD             |
| 10   | Rapat dan Kunjungan Kerja Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Depok            | Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah   | 100%   | Set DPRD             |
| 11   | Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus Asset DPRD Kota Depok                           | Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah   | 100%   | Set DPRD             |
| <b>Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah</b>  |  | <b>Terwujudnya Kualitas Produk hukum</b>  |        |                      |
| 1  | Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                      | Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat  | 80%    | Set DPRD             |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                         |  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |        |                      |
| 1  | Peyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Depok                 | Terseleenggaranya kegiatan  | 100%   | Set DPRD             |
| <b>Urusan :</b>  |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>                                   |        |                      |
| <b>SKPD :</b>  |  | <b>Inspektorat Daerah</b>   |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |        |                      |
| 1  | Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                            | Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan sumberdaya air pendukung kerja                                    | 100%   | Inspektorat          |
| 2  | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan kantor                              | Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung administrasi perkantoran non PNS  | 100%   | Inspektorat          |
| 3  | Penyedia Alat Tulis Kantor   | Meningkatnya ketatalaksanaan kantor   | 70%    | Inspektorat          |
| 4  | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan  | Tersedianya arsip-arsip kantor  | 100%   | Inspektorat          |
| 5  | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Menambah kapasitas dan kelancaran penerangan kantor   | 70%    | Inspektorat          |
| 6  | Penyedia Peralatan Rumah Tangga  | Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor   | 70%    | Inspektorat          |
| 7  | Penyedia Makanan dan Minuman   | Meningkatnya pelayanan bagi pegawai dan tamu  | 100%   | Inspektorat          |
| 8  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah               | Meningkatnya koordinasi tentang pengawasan  | 70%    | Inspektorat          |
| 9  | Penyedia Sarana Informasi  | Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai  | 70%    | Inspektorat          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |        |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                           | Dapat digunakannya kendaraan dinas penunjang pengawasan   | 100%   | Inspektorat          |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                            | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan   | 70%    | Inspektorat          |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>        |  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |        |                      |
| 1  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Meningkatnya tertib pelaporan keuangan  | 70%    | Inspektorat          |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   |  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |        |                      |
| 1  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor   | 70%    | Inspektorat          |

| No  | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target             | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|--------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4                  | 6                    |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengawasan</b>  |  |   |                    |                      |
| 1   | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler   | Meningkatnya Kinerja & Disiplin Aparatur  |                    |                      |
|   |  | Tersusunnya laporan hasil pemriksaan (LHP)  | 38 LHP             | Inspektorat          |
| 2   | Pemeriksaan Khusus   | Berkurangnya pelanggaran peraturan oleh aparat  | 30%                | Inspektorat          |
| 3   | Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  | Meningkatnya kesadaran audit menindaklanjuti temuan hasil pengawasan                  | 70%                | Inspektorat          |
| 4   | Bimbingan Teknis Auditor Pengadaan Barang dan Jasa   | Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit pengadaan barang dan jasa  | 70%                | Inspektorat          |
| 5   | Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah  | Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit PAD                        | 70%                | Inspektorat          |
| 6   | Bimbingan Teknis Audit Sarana dan Prasarana  | Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit Sarana Prasarana           | 70%                | Inspektorat          |
| 7   | Review Laporan Keuangan pemerintah Kota  | Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kota  | 70%                | Inspektorat          |
| 8   | Sosialisasi Kormonev   | Meningkatnya ketaatan aparat terhadap peraturan                                       | 70%                | Inspektorat          |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |  |   |                    |                      |
| 1   | Pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD  | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan   | 70%                | Inspektorat          |
| <b>Urusan :</b>   |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>   |                    |                      |
| <b>SKPD :</b>   |  | <b>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan</b>                                      |                    |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  |   |                    |                      |
| 1   | Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       |                    |                      |
|   |  | Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan sumberdaya air pendukung kerja    | 100%               | DPPK                 |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Kebersihan kantor yang memenuhi standar kenyamanan kantor                             | 100%               | DPPK                 |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor  | 100%               | DPPK                 |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Dimanfaatkannya barang cetak untuk menunjang kegiatan dinas                           | 100%               | DPPK                 |
| 5   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Dimanfaatkannya peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan dinas                 | 100%               | DPPK                 |
| 6   | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Terpenuhinya kebutuhan rapat  | 100%               | DPPK                 |
| 7   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah   | Lancarnya kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi                                    | 100%               | DPPK                 |
| 8   | Penyediaan sarana informasi  |   |                    | DPPK                 |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  |   |                    |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur  |                    |                      |
|   |  | Dimanfaatkannya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan dinas                        | 100%               | DPPK                 |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Dimanfaatkannya perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan dinas                    | 100%               | DPPK                 |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  |   |                    |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                            |                    |                      |
|   |  | Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan pengambil kebijakan                             | 100%               | DPPK                 |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |  |   |                    |                      |
| 1   | Pengadaan Barang Inventaris Kantor   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan                                     |                    |                      |
|   |  | Terpenuhinya kebutuhan Barang Inventaris Kantor                                       | 100%               | DPPK                 |
| 2   | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)  | Diaplikasikannya SIMPAD   | 100%               | DPPK                 |
| 3   | Pemeliharaan PBB On line   | Meningkatnya pelayanan pembayaran PBB Online  | 75%                | DPPK                 |
| 4   | Pengembangan Aplikasi SIMPAD (data potensi pajak restoran)   | Meningkatnya kualitas administrasi sistem dan prosedur PAD                            | 75%                | DPPK                 |
| 5   | Pengelolaan Bantuan Sosial/Hibah   | Terselurkannya bantuan keuangan kepada masyarakat                                     | 70%                | DPPK                 |
| 6   | Kajian Akademik Revisi Perda Pajak dan retribusi Daerah  |   |                    | DPPK                 |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |  |   |                    |                      |
| 1   | Pelaksanaan Forum SKPD   | Terprogramnya Rencana Kerja   | 100%               | DPPK                 |
| 2   | Penelitian DPA Kota Depok  | Tersusunnya DPA TA 2008 sbg bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2009 dan 2010      | 100%               | DPPK                 |
| 3   | Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas  | Terprogramnya Rencana Kerja   | 100%               | DPPK                 |
| 4   | Penyusunan Perubahan KUA 2009, Penyusunan KUA 2010, Penyusunan Perubahan PPAS 2009 dan Penyusunan PPAS 2010.   | Tersedianya buku perubahan KUA 2009 dan PPAS 2009, tersedianya buku KUA dan PPAS 2010 | 120 buku, 120 buku | DPPK                 |
| <b>Peningkatan Pendapatan Daerah</b>  |  |   |                    |                      |
| 1   | Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah  | Meningkatnya Pendapatan Daerah  |                    |                      |
|   |  | Terpenuhinya laporan evaluasi penerimaan pendapatan daerah                            | 100%               | DPPK                 |
| 2   | Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Pajak Daerah  | Revisi peraturan daerah pajak daerah  | 100%               | DPPK                 |
| 3   | Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah  | Meningkatnya pemahaman tentang audit pajak daerah                                     | 75%                | DPPK                 |
| <b>Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                              |  |   |                    |                      |
| 1   | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah                           | 10 Dok             | DPPK                 |
| 2   | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah   | Meningkatnya kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah                    | 80%                | DPPK                 |
| 3   | Inventarisasi dan sinkronisasi data gaji pegawai   | Meningkatnya pelayanan inventarisasi dan sinkronisasi data pegawai se Kota Depok      | 80%                | DPPK                 |
| 4   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok  | Tersedianya buku laporan semesteran keuangan daerah Kota Depok                        | 2 buku             | DPPK                 |
| 5   | Penyempurnaan Penyusunan Kebijakan akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah   | Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP   | 31 SKPD            | DPPK                 |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target    | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|-----------|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4         | 6                    |
| 6   | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. | Tersedianya buku raperda pertanggungjawaban APBD                             | 1 buku    | DPPK                 |
| 7   | Pengelolaan dan Penatausahaan Penerbitan Surat Pencairan Belanja SKPD   | Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan daerah                           | 80%       | DPPK                 |
| 8   | Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok  | Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah                  | 1 buku    | DPPK                 |
| 9   | Penelitian RKA  | Tersedianya bahan penyusunan RAPBD   | 2 laporan | DPPK                 |
| <p><b>Urusan :</b> Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p><b>SKPD :</b> Kec. Beji</p>      |   |  |           |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       |           |                      |
| 1   | Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100%      | Kec. Beji            |
| 2   | Penyedia Jasa Kebersihan Kantor   | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor   | 100%      | Kec. Beji            |
| 3   | Penyedia Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor                                     | 100%      | Kec. Beji            |
| 4   | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan   | Terpenuhinya belanja Barang Cetak dan Penggandaan                            | 100%      | Kec. Beji            |
| 5   | Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor   | 100%      | Kec. Beji            |
| 6   | Penyedia Peralatan rumah Tangga   | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga                       | 100%      | Kec. Beji            |
| 7   | Penyedia Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat                              | 100%      | Kec. Beji            |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah  | Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi                                    | 100%      | Kec. Beji            |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi   | Tersedianya Sarana Informasi   | 100%      | Kec. Beji            |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                            |           |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor  | Terpeliharanya gedung kantor   | 100%      | Kec. Beji            |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional  | Terpeliharanya kendaraan bermotor  | 100%      | Kec. Beji            |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor   | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                    | 100%      | Kec. Beji            |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            |           |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Meningkatnya kualitas sistem Pelaporan Keuangan Semesteran                   | 100%      | Kec. Beji            |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                     |           |                      |
| 1   | Pengadaan Mebeuler  | Tersedianya Mebeuler   | 100%      | Kec. Beji            |
| 2   | Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor  | Tersedianya alat perlengkapan kantor   | 100%      | Kec. Beji            |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                |           |                      |
| 1   | Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan  | Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009                           | 100%      | Kec. Beji            |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>  |   | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>                                      |           |                      |
| 1   | Pelaksanaan Program K3  | Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih                          | 100%      | Kec. Beji            |
| <p><b>Urusan :</b> Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p><b>SKPD :</b> Kec. Cimanggis</p> |   |  |           |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       |           |                      |
| 1   | Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 2   | Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor   | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 3   | Penyedia Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor                                     | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 4   | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan   | Terpenuhinya belanja Barang Cetak dan Penggandaan                            | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 5   | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor   | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 6   | Penyedia Peralatan Rumah Tangga   | Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga                       | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 7   | Penyedia Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat                              | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah  | Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi                                    | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi   | Tersedianya Sarana Informasi   | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                            |           |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor  | Terpeliharanya gedung kantor   | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor   | Terpeliharanya kendaraan bermotor  | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor   | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                    | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>            |           |                      |
| 1   | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  | Meningkatnya kualitas sistem Pelaporan Keuangan Semesteran                   | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                |           |                      |
| 1   | Pelaksanaan Musrenbang  | Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009                           | 100%      | Kec. Cimanggis       |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>  |   | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>                                      |           |                      |
| 1   | Pelaksanaan Program K3  | Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih                          | 100%      | Kec. Cimanggis       |

| No  | Program/Kegiatan   | Sasaran   | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|--|---|--------|----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4      | 6                    |
| <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>  |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b><br><b>Kec. Limo</b>         |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |        |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 100%   | Kec. Limo            |
| 2   | Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor                       | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%   | Kec. Limo            |
| 3   | Penyedia Alat Tulis Kantor   | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Kec. Limo            |
| 4   | Penyedia Barang cetakan dan Penggandaan                            | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100%   | Kec. Limo            |
| 5   | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100%   | Kec. Limo            |
| 6   | Penyedia Peralatan Rumah Tangga                                    | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga   | 100%   | Kec. Limo            |
| 7   | Penyedia Makanan dan Minuman                                       | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman  | 100%   | Kec. Limo            |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                              | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi  | 100%   | Kec. Limo            |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi  | Terpenuhinya kebutuhan sarana Informasi   | 100%   | Kec. Limo            |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor                    | Terpeliharanya kendaraan bermotor   | 100%   | Kec. Limo            |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung Kantor                | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor   | 100%   | Kec. Limo            |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |        |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                           | Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran   | 100%   | Kec. Limo            |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |        |                      |
| 1   | Musrenbang Kecamatan dan kelurahan                                 | Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009  | 100%   | Kec. Limo            |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              |  | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |        |                      |
| 1   | Kebersihan, Ketertiban, Keindahan                                  | Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih   | 100%   | Kec. Limo            |
| <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>  |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b><br><b>Kec. Pancoran Mas</b> |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |        |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                     | Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Terpenuhinya Kebutuhan Listrik/Penerangan   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 7   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Terpenuhinya makanan dan minuman  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi  | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Informasi   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |  | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                           | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor                      | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor              | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |        |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                           | Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran   | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |        |                      |
| 1   | Penyediaan Perlengkapan Kantor                                     | Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |        |                      |
| 1   | Musyawarah Rencana Pembangunan                                     | Terlaksananya Pembangunan di Kec. Pancoran Mas  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              |  | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |        |                      |
| 1   | Pelaksanaan Program K3   | Terpenuhinya Kegiatan Program K3  | 100%   | Kec. Pancoran Mas    |
| <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>  |  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b><br><b>Kec. Sawangan</b>     |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |        |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                     | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan                 | Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga   | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 7   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman  | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah               | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi  | 100%   | Kec. Sawangan        |

| No              | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|-----------------|---|---|--------|----------------------|
| 1               | 2   | 3   | 4      | 6                    |
|                 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   |        |                      |
| 1               | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor                                   | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 2               | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor                                       | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor                              | 100%   | Kec. Sawangan        |
| 3               | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                               | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor                             | 100%   | Kec. Sawangan        |
|                 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                   |        |                      |
| 1               | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran   | 100%   | Kec. Sawangan        |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                       |        |                      |
| 1               | Pelaksanaan Musrenbang  | Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009                                  | 100%   | Kec. Sawangan        |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |        |                      |
| 1               | Pelaksanaan Program K3  | Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih                                 | 100%   | Kec. Sawangan        |
| <b>Urusan :</b> |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Kec. Sukmajaya</b>   |        |                      |
|                 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                              |        |                      |
| 1               | Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                 | Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 2               | Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                          | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 3               | Penyedia Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 4               | Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan   | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 5               | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 6               | Penyedia Peralatan Rumah Tangga   | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga                                       | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 7               | Penyedia Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman  | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 8               | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah                                  | Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi                              | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 9               | Penyedia sarana Informasi   | Terpenuhinya kebutuhan Informasi  | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
|                 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   |        |                      |
| 1               | Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor  | Terpeliharanya gedung tempat kerja  | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 2               | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional                                | Terpeliharanya kendaraan bermotor   | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| 3               | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor                                 | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor   | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
|                 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                   |        |                      |
| 1               | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Tersedianya dok laporan keuangan semesteran   | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>                                       |        |                      |
| 1               | Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan  | Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009                                  | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
|                 | <b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>                              | <b>Menurunnya Pencemaran Lingkungan</b>   |        |                      |
| 1               | Pelaksanaan Program K3  | Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih                                 | 100%   | Kec. Sukmajaya       |
| <b>Urusan :</b> |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>   |        |                      |
|                 | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                              |        |                      |
| 1               | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.                              | Tersedianya sarana komunikasi   | 100%   | Sat Pol PP           |
| 2               | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor   | 100%   | Sat Pol PP           |
| 3               | Penyediaan alat tulis kantor.   | Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran                                    | 100%   | Sat Pol PP           |
| 4               | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  | Terpenuhinya dokumen administrasi perkantoran                                       | 100%   | Sat Pol PP           |
| 5               | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.                     | Terpenuhinya penerangan kantor  | 100%   | Sat Pol PP           |
| 6               | Penyediaan peralatan rumah tangga.  | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga                                       | 100%   | Sat Pol PP           |
| 7               | Penyediaan makanan dan minuman.   | Terpenuhinya jaman makanan dan minuman  | 100%   | Sat Pol PP           |
| 8               | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.                                | Terpenuhinya kelancaran tugas dinas   | 100%   | Sat Pol PP           |
| 9               | Penyediaan sarana informasi.  | Terpenuhinya pelayanan informasi Satpol PP  | 100%   | Sat Pol PP           |
|                 | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                   |        |                      |
| 1               | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.   | Terwujudnya Kenyamanan Kerja Aparatur   | 100%   | Sat Pol PP           |
| 2               | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.                             | Terwujudnya kelancaran tugas kantor   | 100%   | Sat Pol PP           |
| 3               | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.                              | Terwujudnya kenyamanan kerja  | 100%   | Sat Pol PP           |
|                 | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>   |        |                      |
| 1               | Pengadaan Pakaian Dinas Sat. Pol. PP. beserta Perlengkapannya                         | Tewujudnya keseragaman dan keserasian pakaian dinas                                 | 100%   | Sat Pol PP           |
|                 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                   |        |                      |
| 1               | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Terwujudnya laporan keuangan  | 100%   | Sat Pol PP           |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|--|--------|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4      | 6                    |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                               |        |                      |
| 1  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.  | Meningkatnya pelayanan kantor  | 100%   | Sat Pol PP           |
| 2  | Penyediaan Jasa Piket.   | Terwujudnya keamanan kantor  |        | Sat Pol PP           |
| 3  | Pengadaan HT dan RIG   | Meningkatnya komunikasi bagi anggota Satpol PP   | 100%   | Sat Pol PP           |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                                 | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |        |                      |
| 1  | Penyelenggaraan Forum SKPD.  | Terlaksananya penyelenggaraan Forum SKPD   | 100%   | Sat Pol PP           |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Peningkatan Tertib Sosial</b>   |  |        |                      |
| 1  | Pelatihan Penanggulangan Huru-Hara   | Terciptanya kemampuan anggota Sat Pol PP   |        | Sat Pol PP           |
| 2  | Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan      | 80%    | Sat Pol PP           |
| 3  | Penerbitan PSK, Anak Jalanan dan Gepeng  | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan      | 75%    | Sat Pol PP           |
| 4  | Fasilitasi HUT Sat. Pol. PP. Kota Depok  | Terlaksananya HUT Pol PP   |        | Sat Pol PP           |
| 5  | Penerbitan PKL, Bangunan Liar dan Perijinan  | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan      | 75%    | Sat Pol PP           |
| 6  | Pengamanan Pilpres dan Legislatif  |  |        | Sat Pol PP           |
| 7  | Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Sat. Pol. PP.  |  |        | Sat Pol PP           |
| 8  | Penyuluhan Perda Kota Depok dan Pendataan Pelanggar Perda  |  |        | Sat Pol PP           |
| 9  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PPNS   |  |        | Sat Pol PP           |
|    | <b>Urusan :</b>  | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>    |        |                      |
|    | <b>SKPD :</b>  | <b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>   |        |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                 |        |                      |
| 1  | Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan telepon                                       | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon  | 100%   | Dinas Damkar         |
| 2  | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor   | Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor  | 100%   | Dinas Damkar         |
| 3  | Penyediaan alat tulis kantor   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | Dinas Damkar         |
| 4  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                  | 100%   | Dinas Damkar         |
| 5  | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor                                   | Teroenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor         | 100%   | Dinas Damkar         |
| 6  | Penyediaan makanan dan minuman   | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 7  | Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah   | Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%   | Dinas Damkar         |
| 8  | Penyediaan sarana informasi  | Terpenuhinya sarana informasi  | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                      |        |                      |
| 1  | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor   | Meningkatnya Pemafaatan gedung kantor  | 100%   | Dinas Damkar         |
| 2  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional lapangan                                      | Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 3  | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor  | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor                                      | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>  |        |                      |
| 1  | Pengadaan pakaian kerja harian staf dan petugas operasional pemadam kebakaran                        | Meningkatnya disiplin aparat   | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      |        |                      |
| 1  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran   | Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel   | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                               |        |                      |
| 1  | Pembangunan Lanjutan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sektor Pemadam Kebakaran                            | Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat                      | 100%   | Dinas Damkar         |
| 2  | Pembangunan gedung Kantor Pemadam Kebakaran (lanjutan/finishing)                                     | Tersedianya kantor pemadam kebakaran yang memadai                                      | 100%   | Dinas Damkar         |
| 3  | Pengadaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung   | Meningkatnya manajemen pelayanan   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 4  | Pengadaan Pompa Portable   | Tersedianya pompa portable   | 1 unit | Dinas Damkar         |
| 5  | Pengadaan APAR untuk SKPD dan Kecamatan se Kota Depok  | Meningkatnya manajemen pelayanan   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 6  | Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Kesempatan bagi Anggota Pemadam                               | Tersedianya petugas operasional pemadam kebakaran yang memadai                         | 100%   | Dinas Damkar         |
| 7  | Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Operasional Pemadam   | Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operasional 1:2                              | 100%   | Dinas Damkar         |
| 8  | Pengadaan jaket tahan panas dan perlengkapan keselamatan kerja petugas operasional pemadam kebakaran | Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operasional 1:2                              | 100%   | Dinas Damkar         |
| 9  | Pengadaan alat komunikasi dan RIG Mobil  | Meningkatnya pelayanan pemadaman   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 10 | Pengadaan mobil komando pemadam kebakaran  | Meningkatnya manajemen pelayanan   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 11 | Pengadaan Jaket dan Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamat                                      | Meningkatnya manajemen pelayanan   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 12 | Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Sektor Pemadam Kebakaran         | Terrealisasinya pembangunan UPT/sector pemadam kebakaran                               | 100%   | Dinas Damkar         |
| 13 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                                 | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |        |                      |
| 1  | Penyelenggaraan Forum SKPD   | Terjaringnya aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan                              | 100%   | Dinas Damkar         |
|    |  |  |        |                      |
|    | <b>Penanggulangan Bencana</b>  | <b>Tertanggulangnya Bencana</b>  |        |                      |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|--------|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4      | 6                    |
| 1   | Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya            | Meningkatnya pelayanan kebakaran   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 2   | Kajian dan Penyusunan Draft Raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran | Tersusunnya perda penanggulangan bahaya kebakaran                                      | 100%   | Dinas Damkar         |
| 3   | Pelatihan satuan relawan Kebakaran (SATLAKAR)                               | Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran   | 100%   | Dinas Damkar         |
| 4   | Penyuluhan Mitigasi bencana kebakaran dan bencana lainnya                   |  |        | Dinas Damkar         |
| 5   | Pembuatan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran / Smart Alarm System        | Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran                                | 100%   | Dinas Damkar         |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>    |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</b>   |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                 |        |                      |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor           | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon  | 100%   | BPPT                 |
| 2   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | BPPT                 |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                  | 100%   | BPPT                 |
| 4   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | 100%   | BPPT                 |
| 5   | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman   | 100%   | BPPT                 |
| 6   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                       | Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%   | BPPT                 |
| 7   | Penyediaan Sarana Informasi   | Terpenuhinya sarana informasi  |        | BPPT                 |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                      |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional                     | Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional   | 100%   | BPPT                 |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      |        |                      |
| 1   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                      | Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel   | 100%   | BPPT                 |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan</b>                               |        |                      |
| 1   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                    | Meningkatnya informasi pegawai   | 40%    | BPPT                 |
| 2   | Pengadaan Jaringan komputer   | Meningkatnya kinerja apataur   | 50%    |                      |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>    |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Sekretariat Badan Narkotika Kota</b>  |        |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                 |        |                      |
| 1   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.                    | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon  | 100%   | Set BNK              |
| 2   | Penyediaan alat tulis kantor.   | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  | 100%   | Set BNK              |
| 3   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.                                  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan                                  | 100%   | Set BNK              |
| 4   | Penyediaan peralatan rumah tangga.  | Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | 100%   | Set BNK              |
| 5   | Penyediaan makanan dan minuman.   | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman   | 100%   | Set BNK              |
| 6   | Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.                      | Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah |        | Set BNK              |
| 7   | Penyediaan sarana informasi.  | Terpenuhinya sarana informasi  |        | Set BNK              |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                      |        |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional                     | Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional   | 100%   | Set BNK              |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                      |        |                      |
| 1   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                      | Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel   | 100%   | Set BNK              |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                               |        |                      |
| 1   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                    | Meningkatnya informasi pegawai   | 40%    | Set BNK              |
| 2   | Pengadaan Jaringan komputer   | Meningkatnya kinerja apataur   | 50%    | Set BNK              |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan</b>  |   |  |        |                      |
| 1   | Penyuluhan Bahaya narkoba berbasis Masyarakat                               | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba                                  | 40%    | Set BNK              |
| 2   | Sosialisasi Bahaya Narkoba Berbasis Pelajar dan Pemuda                      | Meningkatnya kesadaran pelajar dan pemuda akan bahaya narkoba                          | 40%    | Set BNK              |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Ketahanan Pangan</b>  |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan</b>                             |        |                      |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera</b>                                 |   | <b>Meningkatnya Kualitas Masyarakat</b>  |        |                      |
| 1   | Teknologi Tepat Guna  | Dikenalnya teknologi unggulan Kota Depok   | 100%   | Kantor PMKP          |
| 4   | Penunjang pelaksanaan dan penyaluran Raskin (Dana talangan Raskin)          | Terlaksananya pengurangan beban pengeluaran sebagian RTM melalui beras bersubsidi      | 63 kel | Kantor PMKP          |
| 3   | Pemberian Makanan Tambahan  | Meningkatnya kebutuhan gizi anak sekolah   | 60%    | Kantor PMKP          |
| 4   | Fasilitas Tim POKJA Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota Depok                 | Terciptanya kestabilan pangan yang ada di Kota Depok                                   | 65%    | Kantor PMKP          |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>  |        |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan</b>                             |        |                      |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target       | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|--------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4            | 6                    |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |              |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon    | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon   | 100%         | Kantor PMKP          |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                    | Terpenuhinya Kebersihan dan Keamanan Kantor  | 100%         | Kantor PMKP          |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor   | 100%         | Kantor PMKP          |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan  | 100%         | Kantor PMKP          |
| 5   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 100%         | Kantor PMKP          |
| 6   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman   | 100%         | Kantor PMKP          |
| 7   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah               | Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                      | 100%         | Kantor PMKP          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |              |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor                     | Terpeliharanya pemeliharaan mobil pejabat dan Kendaraan Bermotor   | 100%         | Kantor PMKP          |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor             | Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor  | 100%         | Kantor PMKP          |
| 3   | Penyediaan Gedung Kantor  | Terlaksananya sewa Gedung Kantor   | 100%         | Kantor PMKP          |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |              |                      |
| 1   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                          | Tersusunnya akuntabilitas keuangan   | 80%          | Kantor PMKP          |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |              |                      |
| 1   | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor                       | Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan   | 40%          | Kantor PMKP          |
| 2   | Pengadaan Meubelair   | Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan   | 100%         | Kantor PMKP          |
| 3   | TOT Monografi Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat              | Meningkatnya Pemahaman Lurah terhadap Kepentingan Masyarakat   | 80%          | Kantor PMKP          |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |              |                      |
| 1   | Forum SKPD  | Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD  | 80%          | Kantor PMKP          |
|   | Penyusunan Profil Kelurahan                                       | Meningkatnya keakuratan data kelurahan di Kota Depok   | 85%          | Kantor PMKP          |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera</b>                                 |   | <b>Meningkatnya Kualitas Masyarakat</b>  |              |                      |
| 1   | Penunjang Program Pembangunan Potensi Masyarakat Kelurahan (PPMK) | Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam pembangunan   | 80%          | Kantor PMKP          |
| 2   | Bulan Bhakti Gotong Royong  | Meningkatnya peran serta masyarakat dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan                               | 80%          | Kantor PMKP          |
| 3   | Fasilitasi TMMD   | Meningkatnya peran serta TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan daerah                                 | 80%          | Kantor PMKP          |
| 4   | Pelaksanaan Lomba Kelurahan                                       | Meningkatnya kinerja kelurahan   | 85%          | Kantor PMKP          |
| 5   | Operasional Stimulan RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna           | Meningkatnya pemahaman dan kegiatan administrasi yang baik di tingkat RT,RW, LPM dan Karang Taruna se Kota Depok | 63 Kelurahan | Kantor PMKP          |
| 6   | Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-P2KP)    | Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok   | 70%          | Kantor PMKP          |
| 7   | Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat                                | Meningkatnya kinerja kelompok usaha ekonomi di masyarakat  | 65%          | Kantor PMKP          |
| 8   | Penunjang Program Kemiskinan Terpadu (Paket P2KP)                 | Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok   | 60%          | Kantor PMKP          |
| 9   | Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga                            |  |              | Kantor PMKP          |
| 10  | Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni            | Meningkatnya kualitas rumah tinggal di Kota Depok  | 75%          | Kantor PMKP          |
|   |   |  |              |                      |
|   |   |  |              |                      |
|   |   |  |              |                      |
|   |   |  |              |                      |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Kearsipan</b>   |              |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Kantor Arsip dan Perpustakaan</b>   |              |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |              |                      |
| 1   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik           | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 3   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan  | 100%         | Kantor Arsip         |
| 4   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                    | 100%         | Kantor Arsip         |
| 5   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga  | 100%         | Kantor Arsip         |
| 6   | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 7   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                             | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 8   | Penyediaan Sarana Informasi                                       | Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi  | 100%         | Kantor Arsip         |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |              |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional           | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor            | Terpeliharanya gedung kantor   | 100%         | Kantor Arsip         |
| 3   | Penyediaan Gedung Kantor  | Tersedianya Gedung Kantor  |              | Kantor Arsip         |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |              |                      |
| 1   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                            |  |              | Kantor Arsip         |

| No | Program/Kegiatan   | Sasaran  | Target             | ORGANISASI PELAKSANA |
|----|--|--|--------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                  | 6                    |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |                    |                      |
| 1  | Penyusunan Kajian Arsip Daerah   | Tersedianya arsip daerah   | 100%               | Kantor Arsip         |
| 2  | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Arsip, Perpustakaan   | 100%               | Kantor Arsip         |
| 3  | Bintek Kearsipan Bagi SKPD   | Tertatanya sarana penyimpanan arsip  | 65%                | Kantor Arsip         |
|    | <b>Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika</b>   |  |                    |                      |
| 1  | Pembuatan DED Perpustakaan   | Tersedianya perpustakaan yang terintegrasi di Pemda Kota Depok   | 80%                | Kantor Arsip         |
| 2  | Penataan dan Klasifikasi Buku perpustakaan   |  |                    |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |                    |                      |
| 1  | Penyelenggaraan Forum SKPD   | Tersusunnya Program/kegiatan dinas   | 100%               | Kantor Arsip         |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Perpustakaan</b><br><b>Kantor Arsip dan Perpustakaan</b>  |                    |                      |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah</b> |  |                    |                      |
| 1  | Operasional Pelayanan Perpustakaan Keliling  | Terselenggaranya layanan operasional perpustakaan di kelurahan dan kecamatan   | 85%                | Kantor Arsip         |
| 2  | Pengadaan Buku Perpustakaan  | Terpenuhinya sarana buku perpustakaan  | 35%                | Kantor Arsip         |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Komunikasi dan Informatika</b><br><b>Dinas Komunikasi dan Informasi</b>   |                    |                      |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   |                    |                      |
| 1  | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 2  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan  | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 3  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 4  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga  | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 5  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Terpenuhinya Makanan dan Minuman   | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 6  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  | Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 7  | Penyediaan Sarana Informasi  | Terpenuhinya Sarana Informasi  | 100%               | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                    |                      |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional  | Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor   | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor   | Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor   | 100%               | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  |                    |                      |
| 1  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran   | Terpenuhinya pelaporan keuangan semesteran   | 100%               | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>   |                    |                      |
| 1  | Belanja Modal Peralatan kantor   | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur   | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 2  | Pengembangan Web site Kota Depok   | Bertambahnya content dan keamanan website depok.go.id  | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 3  | Pelatihan SDM TI   | Tersedianya SDM TI   | 100%               | Dinas Kominfo        |
| 4  | Pembuatan SOP Pengelolaan Data   |  |                    | Dinas Kominfo        |
| 5  | Penyediaan Media Informasi   | Terpenuhinya Informasi Depok Dalam CD  |                    | Dinas Kominfo        |
| 6  | Pengadaan Media Elektronik Informasi Pelayanan Publik  | Terpenuhinya Informasi Bagi Publik   |                    | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika</b>   | <b>Meningkatnya Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika</b>   |                    |                      |
| 1  | Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet   |  |                    | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>   |  |                    |                      |
| 1  | Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)   | Terpenuhinya peningkatan kualitas perencanaan dan penandalian pembangunan  | 100%               | Dinas Kominfo        |
|    | <b>Urusan :</b><br><b>SKPD :</b>   | <b>Ketahanan Pangan</b><br><b>Dinas Pertanian dan Perikanan</b>  |                    |                      |
|    | <b>Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan</b>  | <b>Meningkatnya Produk Pertanian Potensial</b>   |                    |                      |
| 1  | Operasional Pelayanan Rumah Pematangan Hewan (RPH) Rangkapanjaya dan Tapos   | Meningkatnya pembangunan RPH Tapos   | 10%                | Distan               |
| 2  | Pembangunan Rumah Potong Unggas Lanjutan   | Terbangunnya ruang kotor dan ruang genset  | 1 unit             | Distan               |
| 3  | Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular serta Pengawasan Mutu Bahan Pangan Asal Ternak   | Terkendalnya penyakit hewan menular di Depok, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatnya pengawasan keamanan pangan | 100%               | Distan               |
| 4  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Pematangan Hewan Tapos  | Meningkatnya pembangunan RPH Tapos   | 10%                | Distan               |
| 5  | Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeswan dan Check Point   | Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan lalu lintas ternak  | 10%                | Distan               |
|    | <b>Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>   | <b>Meningkatnya Status Gizi Masyarakat</b>   |                    |                      |
| 1  | Pelatihan Budidaya Padi, palawija dan sayuran Organik  | Terlaksananya pengembangan petani organik  | 15 Ha padi organik | Distan               |
|    | <b>Urusan :</b>  | <b>Pertanian</b>   |                    |                      |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran   | Target   | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 6                    |
| <b>SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan</b>   |   |   |  |                      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |  |                      |
| 1   | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                  | Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik  | 100%   | Distan               |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor   | 100%   | Distan               |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor  | 100%   | Distan               |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100%   | Distan               |
| 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100%   | Distan               |
| 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga   | 100%   | Distan               |
| 7   | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman  | 100%   | Distan               |
| 8   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah          | Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah   | 100%   | Distan               |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi   | Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi   | 100%   | Distan               |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |  |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                | Terpeliharanya gedung kantor  | 100%   | Distan               |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasioanal                 | Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional gedung kantor   | 100%   | Distan               |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                   | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor   | 100%   | Distan               |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>   |  |                      |
| 1   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                  | Meningkatnya akurasi pelaporan keuangan   | 90%  | Distan               |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |  |                      |
| 1   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                            |   |  |                      |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |  |                      |
| 1   | Forum SKPD dan Penyusunan Renja   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pertanian   | 90%  | Distan               |
| <b>Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang &amp; Bangunan</b>                |   | <b>Meningkatnya Produk Potensial</b>  |  |                      |
| 1   | SIG Tematik Bidang Pertanian  | Tersedianya SIG tematik bidang pertanian  | 1 paket  | Distan               |
| <b>Pengembangan Agribisnis Perkotaan</b>  |   | <b>Meningkatnya Produk Potensial</b>  |  |                      |
| 1   | Penyuluhan Petani   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani  | 30%  | Distan               |
| 2   | Pelatihan Budidaya Peternakan   | Terlatihnya peternak sapi perah melalui pelatihan bintek budidaya ternak, meningkatnya kegiatan budidaya peternakan   | 30 orang, 10%  | Distan               |
| 3   | Fasilitasi Pusat Informasi dan Promosi TPPH                             | Terbangunnya pagar kantor hortikultura, terfasilitasinya informasi pasar hortikultura, Terfasilitasinya pertemuan kelembagaan pasar dan UKM olahan, terfasilitasinya pameran/prolisi TPPH | 1 unit 115 m, 1 tahun, 2 komoditas UKM olahan 3 kali, 1 kali | Distan               |
| 4   | Pelatihan Budidaya Hortikultura dan Pengadaan Bibit Tanaman             | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi hortikultura   |  | Distan               |
| 5   | Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian (HKP)                              | Meningkatnya jaringan pemasaran bagi pelaku agribisnis perkotaan  | 10%  | Distan               |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera</b>                                 |   | <b>Meningkatnya Kualitas Masyarakat</b>   |  |                      |
| 1   | Pemberdayaan Usaha Tani dan Wanita Tani untuk Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemampuan wirausaha kelompok orang miskin  | 50%  | Distan               |
| <b>Urusan : Kelautan dan Perikanan</b>  |   |   |  |                      |
| <b>SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan</b>   |   |   |  |                      |
| <b>Pengembangan Agribisnis Perkotaan</b>  |   | <b>Meningkatnya Produk Potensial</b>  |  |                      |
| 1   | Pembangunan Balai Benih Ikan Tahap 1                                    | Tersedianya pembangunan balai benih ikan  | 1 unit   | Distan               |
| 2   | Pelatihan dan Promosi Ikan Hias dan Ikan Konsumsi                       | Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan petani ikan hias dan ikan konsumsi, terpromosikannya ikan hias di Kota Depok   | 60 orang, 15 %   | Distan               |
| <b>Urusan : Energi dan Sumberdaya Mineral</b>   |   |   |  |                      |
| <b>SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>                                     |   |   |  |                      |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>   |  |                      |
| 1   | Pengawasan, Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG              | Tersedianya informasi pendistribusian minyak tanah, gas LPG dan SPBU  | 25%  | Dinas Indag          |
| <b>Urusan : Ketahanan Pangan</b>  |   |   |  |                      |
| <b>SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>                                     |   |   |  |                      |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>  |  |                      |
| 1   | Monitoring Perkembangan Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok          | Terpenuhinya data perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok   | 75%  | Dinas Indag          |
| 2   | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa                        | Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen  | 10%  | Dinas Indag          |
| <b>Urusan : Perdagangan</b>   |   |   |  |                      |
| <b>SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>                                     |   |   |  |                      |

| No  | Program/Kegiatan  | Sasaran  | Target   | ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|--|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 6                    |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |   | <b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |  |                      |
| 1   | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 100%   | Dinas Indag          |
| 2   | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor                            | Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor   | 100%   | Dinas Indag          |
| 3   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor   | 100%   | Dinas Indag          |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan  | 100%   | Dinas Indag          |
| 5   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor         | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                        | 100%   | Dinas Indag          |
| 6   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga  | 100%   | Dinas Indag          |
| 7   | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman   | 100%   | Dinas Indag          |
| 8   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                                     | Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 100%   | Dinas Indag          |
| 9   | Penyediaan Sarana Informasi   | Meningkatnya Informasi   | 100%   | Dinas Indag          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |   | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  |                      |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                                 | Terpeliharanya gedung kantor   | 100%   | Dinas Indag          |
| 2   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                  | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional   | 100%   | Dinas Indag          |
| 3   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        | 100%   | Dinas Indag          |
| 4   | Penyediaan Gedung Kantor  | Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor   | 100%   | Dinas Indag          |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |   | <b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                          |  |                      |
| 1   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                    | Terukurinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                  | 100%   | Dinas Indag          |
| <b>Peningkatan Manajemen Pelayanan</b>  |   | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan</b>                                   |  |                      |
| 1   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 100%   | Dinas Indag          |
| 2   | Fasilitasi Tera Ulang Luar Kantor   | Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen | 30%  | Dinas Indag          |
| 3   | Pelaksanaan Pasar Murah   | Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau                            | 10 Komoditi bhn pokok                                  | Dinas Indag          |
| 4   | Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan Perkembangan Ekspor Depok       | Tersedianya Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan Perkembangan Ekspor Depok            | 25 Bukukesepakatan bilateral, 25 buku informasi ekspor | Dinas Indag          |
| 5   | Sosialisasi Perda perindustrian dan Perdagangan                           | Terpenuhinya peningkatan PAD   | 55%  | Dinas Indag          |
| 6   | Sosialisasi dan Pendataan Potensi Gudang                                  | Teridentifikasinya data potensi gudang   | 50 gudang  | Dinas Indag          |
| 7   | Fasilitasi Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat   | Terbentuknya LPKSM   | 1 LPKSM  | Dinas Indag          |
| 8   | Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol                                 | Terawasinya peredaran MB Gol B dan C   | 15%  | Dinas Indag          |
| 9   | Pengawasan Potensi Kemetrolgian   | Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen | 6 Kec  | Dinas Indag          |
| <b>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>                  |   | <b>Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif</b>  |  |                      |
| 1   | Penyelenggaraan Forum SKPD dan Penyusunan Renja                           | Meningkatnya kualitas usulan program dinas dan renja dinas                                 | 70%  | Dinas Indag          |
| 2   | Penyusunan Renstra SKPD   | Tersusunnya Rencana Strategis Dinas  |  | Dinas Indag          |
| <b>Peningkatan Daya Tarik Investasi</b>   |   |  |  |                      |
| 1   | Promosi Potensi Daerah  | Meningkatnya Peluang Pasar & Pendapatan Masyarakat   | 10%  | Dinas Indag          |
| <b>Urusan :</b>   |   | <b>Industri</b>  |  |                      |
| <b>SKPD :</b>   |   | <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>   |  |                      |
| <b>Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah</b>                   |   | <b>Terwujudnya Sentra Industri Kecil dan Menengah</b>                                      |  |                      |
| 1   | Pelatihan Teknik Produksi Handycraft dari Kayu                            | Meningkatnya keterampilan pengusaha IKM kerajinan Meuble dan furniture dari kayu           | 90%  | Dinas Indag          |
| 2   | Gugus Kendali mutu Industri Kecil   | Meningkatnya pemahaman peserta tentang kendali mutu industri kecil tingkat dasar           | 10 orang   | Dinas Indag          |
| 3   | Kajian Sentra IKM   | Terbentuknya sentra IKM  | 2 sentra IKM   | Dinas Indag          |
| 4   | Kajian Industri Kompetensi ( dalam rangka one village one product )       | Meningkatnya kualitas produk konveksi kec. Pan Mas   | 15 orang   | Dinas Indag          |
| 5   | Pelatihan Creation of Enterprisess Formation of Entrepreneur              | Terlaksananya Pelatihan CEFE   | 20 Orang   | Dinas Indag          |
| 6   | Pelatihan Industri Kecil dan Menengah                                     | Meningkatny kualitas SDM IKM Kota Depok  | 50%  | Dinas Indag          |
| <b>Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa</b>  |   | <b>Meningkatnya Usaha Perdagangan dan Jasa</b>   |  |                      |
| 1   | Fasilitasi Stabilitas Harga   | Terpenuhinya kebutuhan dengan harga terjangkau   | 50%  | Dinas Indag          |
| 2   | Sosiliasi Pengawasan dan Perijinan Bidang Perdagangan kepada pelaku Usaha |  |  | Dinas Indag          |
| 3   | Profil Perusahaan   | Tersedianya data perusahaan yang berbadan hukum  | 3 bentuk perusahaan                                    | Dinas Indag          |

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL